



LAPORAN KINERJA

TRIWULAN I
2026

DIREKTORAT JENDERAL
PENGUATAN DAYA SAING
PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN



Nilai Tambah

Meningkatnya Nilai Tambah
dan Daya Saing Produk
Kelautan dan Perikanan di
Pasar Domestik dan
Internasional



Tata Kelola Pemerintahan

Terwujudnya Tata Kelola
Pemerintahan yang Bersih, Efektif
dan Berkualitas

PDSPKP

Ditjen Penguatan Daya Saing
Produk Kelautan dan Perikanan

KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) Triwulan I Tahun 2026 disusun sebagai salah satu implementasi atas penyelenggaraan pemerintah yang baik sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan 5 kebijakan ekonomi biru KKP, Ditjen PDSPKP memperkuat peningkatan daya saing hasil kelautan dan perikanan sebagai upaya meningkatkan nilai tambah produk kelautan dan perikanan yang berdaya saing, dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di Lingkungan Ditjen PDSPKP. Upaya memperkuat daya saing tersebut telah dijabarkan pada perjanjian kinerja Ditjen PDSPKP, yang juga menjadi ukuran dalam penilaian keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran program. Secara garis besar pencapaian kinerja Ditjen PDSPKP triwulan I tahun 2026 ditunjukkan dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Ditjen PDSPKP sebesar 83,79.

Akhir kata, semoga Laporan ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kepada seluruh pemangku kepentingan atas mandat dan kinerja yang telah ditetapkan kepada kami. Dengan semangat internalisasi #KITAPDS yaitu Kompetensi, Inovasi-Integritas, Transparansi, Akuntabel dapat mendorong peningkatan kinerja organisasi Ditjen PDSPKP dalam mendukung kebijakan ekonomi biru KKP.

Jakarta, 29 April 2026

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Machmud', written in a cursive style.

Machmud

TIM PENYUSUN

PENGARAH

Machmud

PENYUSUN

Budi Yuwono

Andika Adisukma

Agustina Pujiastuti

Rifai Dwi Prasetio

Ayu Wahdania

Muqaromah Fitra Hasanah

Devi Sari

KONTRIBUTOR

Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja Lingkup Direktorat Jenderal Penguatan
Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

IKHTISAR EKSEKUTIF

Ditjen PDSPKP telah menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2026. Berdasarkan PK tersebut, terdapat lima indikator kinerja yang terdiri dari tiga Indikator yang periode pelaporannya bersifat triwulanan, dan dua bersifat tahunan.

Sebanyak lima indikator kinerja tersebut seluruhnya telah dilakukan pengukuran pada triwulan I tahun 2026. Hasil pengukuran Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Ditjen PDSPKP triwulan I Tahun 2026 yang ditunjukkan pada Aplikasi Kinerjaku adalah sebesar 83,79%.

Perincian capaian Sasaran Program dan Indikator Kinerja Ditjen PDSPKP Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

1. Sasaran Program Meningkatnya Nilai Tambah Produk Kelautan dan Perikanan yang Berdaya Saing dengan Indikator Kinerja Nilai Ekspor Rumput Laut (USD Juta), Nilai Ekspor Produk Perikanan Lainnya (USD Miliar), Nilai Pemasaran Produk Perikanan Dalam Negeri (Rp Triliun), Persentase UMKM Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan (Persen)
2. Sasaran Program Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di Lingkungan Ditjen PDSPKP dengan Indikator Kinerja Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Lingkup Ditjen PDSPKP (Nilai)
3. Tiga indikator kinerja yang periode pelaporannya bersifat triwulanan yaitu Nilai Ekspor Rumput Laut, Nilai Ekspor Produk Perikanan Lainnya, dan Persentase UMKM Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan Naik Kelas; dan dua indikator kinerja yang periode pelaporannya bersifat tahunan yaitu Nilai Pemasaran Produk Perikanan Dalam Negeri, dan Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP.
4. Indikator kinerja Nilai Ekspor Rumput Laut dengan prognosa sampai dengan Maret mencapai sebesar USD 62,21 juta atau 40,40% dari target triwulan I sebesar yaitu USD 154 juta atau setara dengan 9,61 dari target tahun 2026 sebesar USD 647 juta.

5. Indikator Kinerja Ekspor Perikanan lainnya dengan prognosa sampai dengan Maret mencapai sebesar USD 1,31 miliar atau 90,97% dari target triwulan I sebesar yaitu USD 1,44 miliar atau setara dengan 21,65% dari target tahun 2026 sebesar USD 6,05 miliar.
6. Indikator Kinerja Persentase UMKM Pengolahan Produk KP Naik Kelas sampai dengan triwulan I tahun 2026 mencapai 0,70% atau 140% dari target triwulan I sebesar 0,50% atau setara 12,72% dari target tahun 2026 sebesar 5,50%
7. Indikator Kinerja Nilai Pemasaran Produk Perikanan Dalam Negeri dan Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen PDSPKP merupakan indikator yang bersifat tahunan sehingga capaian akan diukur pada akhir tahun berjalan
8. Alokasi anggaran pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan adalah sebesar Rp276.024.243.000,- (*Dua ratus tujuh puluh enam miliar dua puluh empat juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah*) yang seluruhnya merupakan APBN rupiah murni dan PNBPN. Dari pagu anggaran tersebut, terdapat blokir dan efisiensi anggaran sebesar Rp21.906.773.000,- (*Dua puluh satu miliar sembilan ratus enam juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah*) sehingga pagu anggaran efektif menjadi sebesar Rp254.117.470.000,- (*Dua ratus lima puluh empat miliar seratus tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah*) Realisasi anggaran Ditjen PDSPKP sampai dengan Triwulan I tahun 2026 adalah sebesar Rp39.464.055.000,- (*Tiga puluh sembilan miliar empat ratus enam puluh empat juta lima puluh lima ribu rupiah*) atau setara dengan 14,30% terhadap total pagu anggaran awal atau 15,53% terhadap pagu anggaran pagu efektif.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
TIM PENYUSUN	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Tugas dan Fungsi	2
D. Keragaan Sumber Daya Manusia Aparatur	6
E. Permasalahan Utama.....	6
1. Permasalahan dan Tantangan Dalam Negeri	6
2. Permasalahan dan Tantangan Global.....	10
F. Sistematika Penyajian	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	18
1. Rencana Strategis	18
A. Visi	18
B. Misi	19
C. Tujuan	20
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2026	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	23
1. Capaian Kinerja	23
2. Evaluasi dan Analisis Kinerja.....	24
Sasaran Program 1. Meningkatnya Nilai Tambah Produk Kelautan dan Perikanan yang Berdaya Saing	25
A. IKU 1. Nilai Ekspor Rumput Laut.....	25
B. IKU 2. Nilai Ekspor Produk Perikanan Lainnya	31

C. IKU 3. Nilai Pemasaran Produk Perikanan Dalam Negeri.....	62
D. IKU 4. Persentase UMKM Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan Naik Kelas.....	89
Sasaran Program 2. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	100
E. IKU 5. Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Lingkup Ditjen PDSPKP	100
3. Alokasi Anggaran Ditjen PDSPKP	110
BAB IV PENUTUP	112
1. Kesimpulan	112
2. Permasalahan dan Rekomendasi	112
DAFTAR LAMPIRAN	115

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Perjanjian Kinerja Ditjen PDSPKP Tahun 2026	22
Tabel 2.	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Ditjen PDSPKP Triwulan I Tahun 2026 .	24
Tabel 3.	Ikhtisar Pencapaian Nilai Ekspor Rumput Laut	25
Tabel 4.	Ikhtisar Pencapaian Nilai Ekspor Produk Perikanan Lainnya.....	32
Tabel 5.	Ikhtisar Pencapaian Nilai Pemasaran Produk Perikanan Dalam Negeri.....	62
Tabel 6.	Ikhtisar Pencapaian Persentase UMKM Pengolahan Produk KP Naik Kelas	90
Tabel 7.	Ikhtisar Pencapaian Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Lingkup Ditjen PDSPKP	100
Tabel 8.	Realisasi Penyerapan Anggaran Ditjen PDSPKP berdasarkan Jenis Kegiatan Tahun 2026 (Dalam Rp.000).....	110
Tabel 9.	Realisasi Penyerapan Anggaran Ditjen PDSPKP Menurut Kewenangan Tahun 2026 (Dalam Rp.000)	111
Tabel 10.	Permasalahan dan Rekomendasi atas Indikator kinerja yang tidak mencapai target pada Triwulan I Tahun 2026	112
Tabel 11.	Tindak Lanjut Rekomendasi pada Laporan Kinerja Tahun 2025.....	114

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Struktur Organisasi Ditjen PDSPKP	4
Gambar 2.	Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan	5
Gambar 3.	Keragaan Sumber Daya Manusia Aparatur	6
Gambar 4.	Sistematika Peyajian	17
Gambar 5.	Capaian NKO pada Triwulan I tahun 2026	23
Gambar 6.	Persiapan Pelaksanaan Buyer Mission	28
Gambar 7.	Fasilitasi kerjasama adalah inisiasi kerjasama antara World Wide Fund for Nature (WWF) dan pembudidaya skala kecil	29
Gambar 8.	Kegiatan Penyusunan Rekomendasi Rancangan Peraturan Menteri terkait mengenai Ketertelusuran dan Sertifikasi Ikan Hasil Tangkapan	36
Gambar 9.	Kegiatan Penyusunan Rekomendasi Rancangan Peraturan Menteri terkait mengenai Ketertelusuran dan Sertifikasi Ikan Hasil Tangkapan	37
Gambar 10.	Penyusunan profil pasar luar negeri Cumi, Sotong dan Gurita	40
Gambar 11.	Koordinasi Penghitungan Susut Hasil	42
Gambar 12.	Pembahasan Rencana Pelaksanaan Pendataan VPO Unit Pengolahan Ikan (UPI) Tahun 2025 dan 2026	43
Gambar 13.	Penetapan Populasi Unit Pengolahan Ikan (UPI) Skala Mikro dan Kecil Tahun 2025	43
Gambar 14.	Pembinaan SKP dan HACCP untuk UMKM Naik Kelas	45
Gambar 15.	Bimbingan Teknis Pembinaan Mutu dan Usaha Pengolahan	46
Gambar 16.	Pembahasan modul penanganan pasca panen dalam rangka operasional Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP)	47
Gambar 17.	Pembinaan Kelayakan Pengolahan untuk KNMP	47
Gambar 18.	Pembinaan Unit Penanganan dan Unit Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan Skala Menengah dan Besar yang Dibina	48
Gambar 19.	Implementasi pelayanan perizinan berusaha sektor Kelautan dan Perikanan	49
Gambar 20.	Pendampingan Pelaku Usaha pada Realisasi Investasi	51
Gambar 21.	Pemetaan Usaha dan Investasi di KDKMP Pangkahwetan dan KDKMP Pangkahkulon	52
Gambar 22.	Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penerapan Aplikasi SIP-CS	54
Gambar 23.	Pembahasan Hasil Monitoring dan Evaluasi Operasionalisasi STELINA	56
Gambar 24.	Pembahasan Renaksi Penyusunan Rancangan Perpres tentang Rencana Aksi Percepatan Implementasi SLIN	57
Gambar 25.	Coaching Clinic Pembinaan Cara Distribusi Ikan Yang Baik (CDIB)	60
Gambar 26.	Pelaksanaan Kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan	64

Gambar 27.	Kesepakatan Pemasaran Produk Perikanan di Dalam Negeri	65
Gambar 28.	Pembinaan Pelaku Usaha Pemasaran.....	66
Gambar 29.	Penyusunan Profil Pasar Dalam Negeri Hasil Kelautan dan Perikanan.....	67
Gambar 30.	Rapat Penguatan Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Produk Perikanan	69
Gambar 31.	Rapat Penyusunan Konsep (RSNI1) Ekstrak Cair Spirulina	69
Gambar 32.	Pengenalan Produk UMKM Kelautan dan Perikanan kepada SPPG	72
Gambar 33.	Pembinaan Diversifikasi Produk Bernilai Tambah Non Pangan melalui Kunjungan Lapang yang dilaksanakan selama periode Triwulan I	72
Gambar 34.	Pembinaan UPI skala mikro dan kecil	75
Gambar 35.	Workshop Pendampingan Proses Produk Halal (P3H)	75
Gambar 36.	Penyaluran Bantuan Cool Box di Papua	76
Gambar 37.	Pembahasan dan Penyusunan Modeling Unit Pengolahan Ikan (UPI) Mendukung Budidaya Tematik dan UPI Pindang Modern	78
Gambar 38.	Pembahasan Pengalihan Bantuan Pemerintah di Lingkungan Ditjen PDSPKP dalam Rangka Monitoring Pemanfaatan Bantuan	79
Gambar 39.	Layanan Penilaian Kesesuaian Produk Kelautan dan Perikanan...	81
Gambar 40.	Pelatihan pengoperasian alat GCMS sesuai metode pengujian etanol pada makanan.....	83
Gambar 41.	Pemeliharaan Sistem Manajemen Produsen Bahan Acuan sesuai SNI ISO 17034	84
Gambar 42.	Kegiatan perluasan ruang lingkup LSPro-HP	85
Gambar 43.	Asesmen reakreditasi dan perluasan ruang lingkup oleh KAN.....	85
Gambar 44.	Pelaksanaan Workshop Diversifikasi dan Inovasi Produk.....	87
Gambar 45.	Koperasi Desa Merah Putih Mekarmukti Cihampelas	91
Gambar 46.	Koperasi Desa Merah Putih Mekarsari Kecamatan Cipongkor	92
Gambar 47.	Peningkatan Komptensi Pemberdayaan Usaha.....	94
Gambar 48.	Temu Fasilitasi Akses Pembiayaan.....	94
Gambar 49.	ToT Uji Coba Modul Literasi Keuangan dan Akses Pembiayaan UMKM Sektor Kelautan dan Perikanan.....	95
Gambar 50.	Business Matching UMKM Hasil Kelautan dan Perikanan dengan Retail Modern.....	97
Gambar 51.	Bimbingan Teknis Kewirausahaan dan Akses Permodalan	98
Gambar 52.	Inisiasi peluang kerjasama KDMP Kec. Cikeusik dengan Koperasi Produsen Mina Muara Sejahtera	100
Gambar 53.	Pembahasan Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal.....	101
Gambar 54.	Rapat Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi Lingkup Ditjen PDSPKP periode triwulan IV tahun anggaran 2025.....	102

Gambar 55.	Rapat Rekonsiliasi Kinerja dalam Rangka Persiapan Penilaian SAKIP Tahun 2026	103
Gambar 56.	Rapat Koordinasi Persiapan Sosialisasi Bantuan Pemerintah (BP) Tahun 2026.....	104
Gambar 57.	Rapat Koordinasi pembahasan dukungan Ditjen PDSPKP terhadap Program Prioritas Presiden RI Tahun 2026	104
Gambar 58.	Kegiatan persiapan pembinaan SPIP tahun 2026 oleh tim BPKP	105
Gambar 59.	Rapat Monitoring dan Evaluasi Disiplin dan Kinerja Pegawai Triwulan IV	105
Gambar 60.	Sosialisasi Permen KP Nomor 13 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan KKP	106
Gambar 61.	Rapat Pemantauan Pembangunan Zona Integritas Direktorat Pemberdayaan Usaha dan Direktorat Pemasaran.....	108
Gambar 62.	Rapat Identifikasi SOP di Direktorat Pemasaran.....	109

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.	115
--	-----

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan diarahkan untuk mewujudkan produk kelautan dan perikanan yang memiliki daya saing tinggi sehingga dapat bersaing baik di pasar domestik maupun internasional. Kebijakan dimaksud mengacu pada pendekatan *market driven* atau pasar yang menjadi acuan kebijakan, sehingga ketersediaan produk dapat diterima dan diminati oleh konsumen. Dengan demikian, produk yang dihasilkan harus merupakan produk kelautan dan perikanan yang memiliki sifat *high quality, safe, traceable, high value content* dan *competitive*. Kebijakan ini akan dilaksanakan dalam kurun waktu tahunan dan lima tahunan.

Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan Nomor 94 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan Tahun 2025 – 2029 merupakan dokumen perencanaan strategis Ditjen PDSPKP yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu lima tahunan. Mengacu pada dokumen Renstra tersebut, setiap unit kerja lingkup Ditjen PDSPKP membuat perencanaan tahunan guna mencapai indikator sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan program yang termuat dalam Renstra. Perencanaan tersebut dibuat dengan disertai indikator sasaran dan cara mencapai sasaran tersebut secara strategis.

Dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Ditjen PDSPKP sebagai Entitas Akuntabilitas Kinerja berkewajiban menyusun dokumen perencanaan kinerja, pengukuran capaian kinerja, pengelolaan data capaian kinerja, serta menyampaikan Laporan Kinerja yang merupakan wujud akuntabilitas dari mandat yang diemban.

Dokumen Laporan Kinerja Ditjen PDSPKP merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Instansi Pemerintah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan baik berdasarkan Renstra maupun rencana kinerja tahunan yang dibuat sebelumnya. Dokumen ini menjadi sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja ini akan menginformasikan capaian kinerja periode triwulan I tahun 2026 atas pelaksanaan sasaran program dan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Ditjen PDSPKP triwulan I tahun 2026 adalah untuk mengomunikasikan pencapaian sasaran program pada triwulan I tahun 2026 kepada *stakeholders* guna mewujudkan akuntabilitas kepada pihak-pihak yang memberi mandat atau amanah.

C. Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, kedudukan Ditjen PDSPKP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan. Dalam kedudukannya, Ditjen PDSPKP mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan daya saing dan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan.

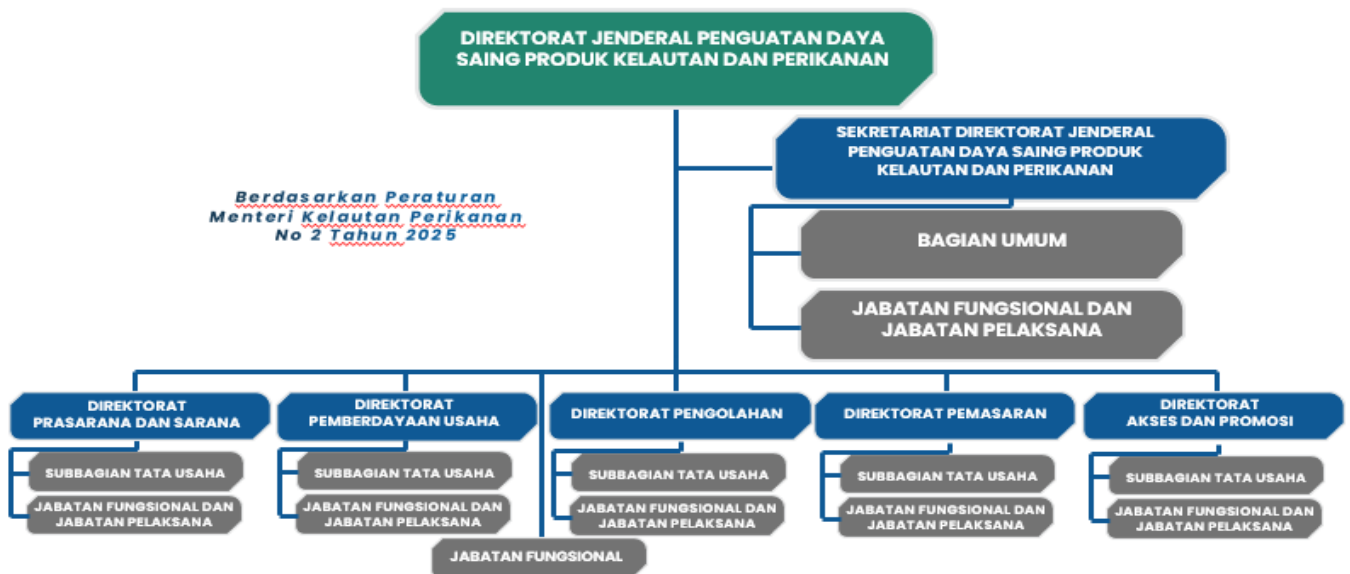
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Ditjen PDSPKP menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang standardisasi, peningkatan nilai tambah, dan pengelolaan ketertelusuran produk kelautan dan perikanan, pengelolaan logistik ikan nasional, fasilitasi pemberdayaan usaha kelautan dan perikanan, serta pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi, peningkatan nilai tambah, dan pengelolaan ketertelusuran produk kelautan dan perikanan, pengelolaan logistik ikan nasional, fasilitasi pemberdayaan usaha kelautan dan perikanan, serta pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang standardisasi, peningkatan nilai tambah, dan pengelolaan ketertelusuran produk kelautan dan perikanan, pengelolaan logistik ikan nasional, fasilitasi pemberdayaan usaha kelautan dan perikanan, serta pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi, peningkatan nilai tambah, dan pengelolaan ketertelusuran produk kelautan dan perikanan, pengelolaan logistik ikan nasional, fasilitasi pemberdayaan usaha kelautan dan perikanan, serta pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang standardisasi, peningkatan nilai tambah, dan pengelolaan ketertelusuran produk kelautan dan perikanan, pengelolaan logistik ikan nasional, fasilitasi pemberdayaan usaha kelautan dan perikanan, serta pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Ditjen PDSPKP dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal dan terdiri atas:

Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan; Direktorat Prasarana dan Sarana; Direktorat Pemberdayaan Usaha; Direktorat Pengolahan; Direktorat Pemasaran dan Direktorat Akses dan Promosi.



Gambar 1. Struktur Organisasi Ditjen PDSPKP

Ditjen PDSPKP memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan (BBP3KP) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 68/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan, BBP3KP mempunyai tugas melaksanakan uji terap teknik pengolahan dan pemasaran, pengujian dan sertifikasi produk, serta pelayanan pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan.

Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang pengujian penerapan produk kelautan dan perikanan;
2. Pelaksanaan uji terap teknik pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan;

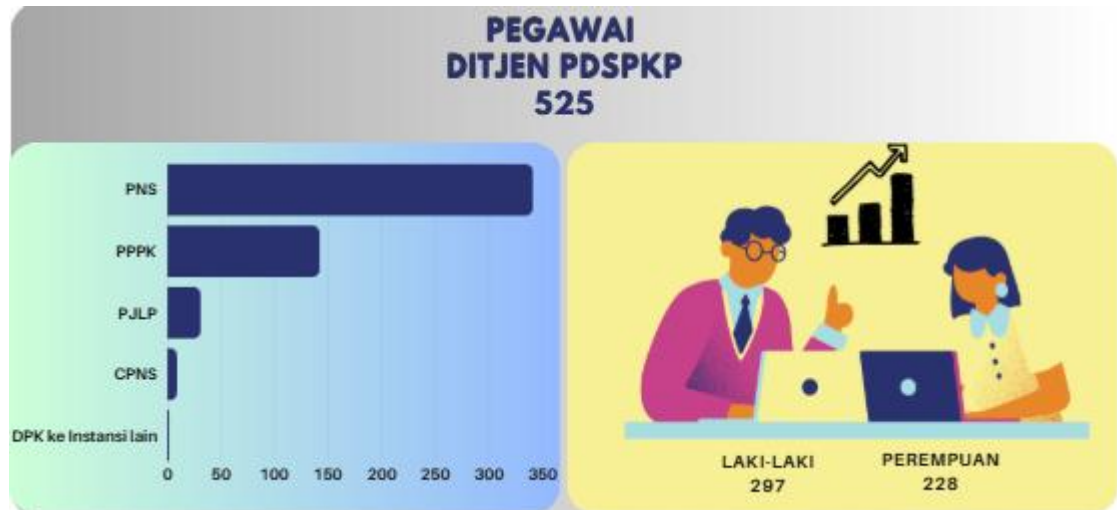
3. Pelaksanaan pengujian persyaratan kelayakan pengolahan dan penganekaragaman produk kelautan dan perikanan;
4. Pelaksanaan penyiapan bahan standarisasi pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan;
5. Pelaksanaan sertifikasi produk penggunaan tanda Standar Nasional Indonesia (SNI) dan tanda kesesuaian produk kelautan dan perikanan;
6. Pelaksanaan pelayanan pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan;
7. Pelaksanaan bimbingan teknis hasil uji terap, pengujian, dan sertifikasi produk kelautan dan perikanan; dan
8. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.



Gambar 2. Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan

D. Keragaan Sumber Daya Manusia Aparatur

Jumlah pegawai Ditjen PDSPKP Tahun 2026 mencapai 525 orang yang terdiri dari 297 pegawai Laki-laki dan 228 pegawai perempuan, dengan rincian sebagai berikut:



Gambar 3. Keragaan Sumber Daya Manusia Aparatur

Keterangan:

Total jumlah pegawai adalah 525 orang, terdiri dari 341 PNS, 142 PPPK, 9 CPNS, 31 PJLP, 2 DPK. (297 laki-laki dan 228 Perempuan)

E. Permasalahan Utama

1. Permasalahan dan Tantangan Dalam Negeri

Dalam pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi. Permasalahan dan tantangan tersebut berkaitan dengan produk perikanan yang mudah rusak (*perishable product*), produksi ikan bersifat musiman, disparitas wilayah produksi dan industri, logistik dan konektivitas antar wilayah, industri pengolahan yang didominasi skala mikro kecil, ketersediaan dan keterhubungan informasi produksi dan pasar, persyaratan, hambatan dan diplomasi perdagangan, serta SDM bidang pengolahan, mutu dan pemasaran ikan yang perlu ditingkatkan.

Terkait produk perikanan yang mudah rusak (*perishable product*), perlu dilakukan penanganan ekstra dalam penyajiannya. Kedepan, pembinaan terhadap unit pengolahan ikan (UPI) dalam penyediaan produk perikanan yang berkualitas perlu diperkuat, sehingga terjadi diversifikasi produk terutama dalam penyajiannya, serta pengujian mutu perlu dilakukan bertingkat. Di samping itu, sebagai upaya untuk memastikan keamanan produk perikanan yang diperdagangkan, penilaian sertifikasi perlu terus digenjut, terutama untuk UPI, pelaku pasar dan logistik perikanan yang berskala besar dan mempunyai jangkauan pasar yang luas. Hal ini penting, mengingat produk perikanan akan terus dibutuhkan masyarakat luas, selain karena bahan pangan ini rasanya enak dan ekonomis, juga mempunyai kandungan gizi yang tinggi.

Produksi ikan yang bersifat musiman juga menjadi permasalahan dan tantangan tersendiri dalam penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan. Data statistik perikanan tangkap menunjukkan produksi ikan laut sangat fluktuatif sepanjang tahun dan mengalami musim puncak, musim, sedang, dan musim paceklik penangkapan ikan. Pada musim puncak produksi ikan sangat berlimpah, sementara di musim paceklik hasil tangkapan susah didapat. Pola musim tersebut juga bisa berbeda di setiap wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (WPP-RI). Hal ini kemudian menjadi pemicu terjadinya disparitas produksi ikan yang tinggi antar wilayah kepulauan Indonesia.

Disparitas yang menonjol berikutnya dan berpengaruh besar terhadap perekonomian nasional di bidang kelautan dan perikanan adalah disparitas wilayah produksi ikan dan industri pengolahan. Saat ini, sekitar 82% produksi perikanan tangkap berada di luar Jawa, sedangkan 45% sebaran UPI tersebar di Pulau Jawa. Dampaknya, banyak industri pengolahan ikan kekurangan bahan baku dalam waktu lama yang berakibat pada penghentian aktivitas industri bahkan PHK. Hal itu selalu terjadi setiap tahun, meskipun pada waktu yang sama produksi ikan di Wilayah Indonesia Timur tinggi. Ke depan, hal ini perlu dicari jalan keluar yang tepat, yang tidak merugikan pelaku UPI dan juga nelayan. UPI banyak

dikembangkan di Pulau Jawa lebih karena kedekatan dengan pasar potensial yang sebagian besar berada di wilayah Jawa.

Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk mengurangi disparitas wilayah produksi ikan dan industri pengolahan adalah dengan penguatan sistem logistik ikan. Sistem logistik ikan dapat membantu UPI mendapatkan bahan baku ikan secara kontinyu, sekaligus mendukung distribusi dan pemasaran ikan hasil tangkapan nelayan yang banyak tersebar di Kawasan Indonesia Timur. Namun ternyata sistem logistik ini juga masih menemui banyak kendala terutama terkait konektivitas antar wilayah. Dalam 5 tahun terakhir, kinerja logistik ikan nasional berada di angka 60-70 (skala 1-100). Hal perlu ditingkatkan antara lain melalui penyiapan ekosistem logistik yang baik dan efisien. Koordinasi, kerjasama, dan simbiosisitas aktivitas diantara pelaku logistik perlu ditingkatkan, begitu juga dukungan pemerintah melalui kebijakan taktis yang memicu berkembangnya aktivitas logistik ikan perlu diupayakan. Hal ini akan mendorong tumbuhnya aktivitas logistik ikan di wilayah produksi, pengumpulan, dan pasar, yang sekaligus memperkuat konektivitas wilayah-wilayah tersebut.

Tantangan berikutnya terjadi pada industri pengolahan ikan, dimana saat ini masih didominasi UPI berskala mikro kecil. Jumlahnya mencapai 81.350 unit, sementara UPI skala menengah dan besar hanya 1.475 unit. Akibatnya mereka kurang bisa bersaing terutama dalam pemodalan dan ekspansi usaha, meskipun kebijakan berpihak kepada mereka. Ke depan, UPI skala mikro kecil tersebut perlu dibina dan difasilitasi sehingga lebih berkembang dan meningkat kelasnya. Hal ini perlu dilakukan antara lain dengan memperbanyak inkubator bisnis produk KP yang nantinya bisa melatih UPI dalam pengembangan produk dan memfasilitasi UPI untuk naik kelas. Upaya berikut perlu dilakukan adalah fasilitasi akses pembiayaan usaha dan fasilitasi kemitraan usaha, sehingga membantu perluasan usaha dan jaringan kerjasama UPI.

Untuk mendukung ekspansi bisnis dan pasar produk kelautan dan perikanan, terutama dalam memperluas jaringan ke pasar ekspor, maka ketersediaan dan keterhubungan informasi produksi dan pasar perlu ditingkatkan,

serta persyaratan, penyelesaian hambatan dan diplomasi perdagangan perlu diperkuat. Saat ini, informasi produksi seperti musim ikan, jadwal tebar dan panen hanya terjalin antar nelayan, pemilik kapal, pembudidaya, penyedia pakan, dan penyedia perbekalan, sementara informasi pasar hanya terjadi diantara pedagang, pengumpul, dan pelaku ekspor. Ke depan jalur informasi tersebut perlu diperluas dan dikembangkan dari hulu ke hilir, sehingga semua pelaku usaha/bisnis perikanan dapat saling mendukung dan mengatasi permasalahan yang dihadapi bersama. Hal ini penting untuk peningkatan efisien dan pemanfaatan maksimal peluang pasar yang ada. Terkait persyaratan pasar dan hambatan pasar, akan selalu terjadi karena negara importir memiliki regulasi tersendiri atas produk impor dan berupaya melindungi pasar domestik produk mereka. Saat ini ekspor produk kelautan dan perikanan Indonesia masih bertumpu pada pasar tradisional negara tujuan (AS, Tiongkok, Jepang, dan Uni Eropa), sementara diversifikasi pasar dan produk ekspor belum optimal, dan UPI terutama yang berskala mikro kecil belum menerapkan prinsip mutu produk ekspor yang baik. Hal ini perlu dipecahkan secara komprehensif, dimana perundingan penyelesaian hambatan ekspor, harus dibarengi dengan upaya peningkatan mutu produk ekspor dan pengembangan intellegent pasar yang membantu diversifikasi pasar produk perikanan dan kelautan. Perwakilan dagang RI di luar negeri (*Indonesia Trade Promotion Center*) dapat membantu dari segi diplomasi

Kualitas SDM bidang pengolahan, pengetahuan tentang mutu dan dinamika pasar menjadi permasalahan dan tantangan lain yang harus dipecahkan dalam rangka penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, terutama di pasar ekspor. Saat ini baru tersedia 190 Pembina Mutu dan 264 Analis Pasar Hasil Perikanan di seluruh Indonesia, padahal posisinya sangat vital sebagai pelopor mutu dan pengembangan pasar terutama di wilayah Indonesia yang aksesnya terbatas. Pembina Mutu dan Analis Pasar akan menjembatani penyediaan produk kelautan dan kelautan yang berkualitas dengan jaringan logistik dan pasar potensial di dalam dan luar negeri. Dalam konteks pengembangan SDM pengolahan, pelaku UPI perlu ditransfer *knowledge* berkaitan dengan standar

mutu (GMP, SSOP, HACCP, *Traceability*) dan informasi pasar sehingga terjadi konsistensi dalam penyediaan produk KP berkualitas yang dibutuhkan pasar. Pembina Mutu dan Analis Pasar membantu hal tersebut di lapangan, sementara pada lingkup yang lebih luas Ditjen PDSPKP dapat mengakomodasinya, melalui pengembangan sertifikasi kesesuaian mutu, fasilitasi sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran, fasilitasi promosi dan pameran produk KP, serta fasilitasi kesepakatan pemasaran produk KP di pasar potensial dalam dan luar negeri.

2. Permasalahan dan Tantangan Global

Permintaan global terhadap produk-produk seafood dipenuhi melalui jaringan perdagangan yang kompleks dan tersebar di berbagai belahan dunia. Seiring dengan meningkatnya populasi dan kesadaran konsumen terhadap pola makan sehat, permintaan ini terus tumbuh, menciptakan peluang sekaligus tantangan bagi industri perikanan global. Pada tahun 2024, total nilai impor produk perikanan dunia mencapai USD 183,97 miliar, mengalami penurunan 1,6% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, rata-rata pertumbuhan impor perikanan dari 2020 hingga 2024 sebesar 5,3% menunjukkan potensi perkembangan yang berkelanjutan. Uni Eropa, Amerika Serikat, Tiongkok, dan Jepang menjadi importir terbesar.

Uni Eropa mendominasi pasar global dengan nilai impor USD 61,52 miliar, meski pertumbuhannya minus 1,4% (YoY). Amerika Serikat berada di posisi kedua dengan USD 27,43 miliar, naik 0,2%. Tiongkok dan Jepang juga berkontribusi signifikan dengan nilai impor masing-masing USD 22,60 miliar dan USD 13,57 miliar, keduanya mengalami penurunan masing-masing 3,1% dan 5,6% dari tahun sebelumnya (YoY).

Pada tahun 2024, impor perikanan dunia didominasi oleh komoditas salmon dan trout, dengan nilai mencapai USD 37,21 miliar, mencakup 20,2% dari total perdagangan perikanan global, meskipun turun 1,1% dibandingkan tahun sebelumnya. Komoditas udang berada di posisi kedua dengan nilai USD 25,90

miliar, menyumbang 14,1%, namun mengalami penurunan sebesar 4,9%. Tuna-tongkol-cakalang mencatat nilai impor USD 16,22 miliar (8,8% dari total), meningkat 1,9%. Cumi-sotong-gurita mencatat impor USD 11,27 miliar (6,1% dari total), meskipun turun 1,2%. Tepung-pelet ikan berkontribusi USD 6,50 miliar (3,5%), dengan penurunan 0,8%. Nilai impor kepiting atau rajungan sebesar USD 6,19 miliar (3,4%), naik 4,1%. Lobster mencatat impor USD 5,61 miliar (3,0%), dengan kenaikan 10,2%.

Saat ini, negara-negara eksportir terbesar di dunia adalah Tiongkok, Norwegia, Ekuador, dan Vietnam. Tiongkok mendominasi dengan nilai ekspor sebesar USD 20,92 miliar, mencakup 11,2% dari total perdagangan dunia, naik 1,1% dibandingkan tahun sebelumnya. Norwegia berada di posisi kedua dengan nilai ekspor USD 16,07 miliar (8,6% dari total) dan mencatat pertumbuhan positif meskipun sangat kecil. Ekuador dan Vietnam masing-masing mencatat nilai ekspor USD 9,24 miliar (5,0%) dan USD 8,82 miliar (4,7%), dengan Ekuador mengalami kenaikan 2,3%, sementara Vietnam turun 7,1%. Indonesia berada di peringkat ke-10 dengan nilai ekspor USD 5,9 miliar, berkontribusi 3,2% terhadap total perdagangan perikanan dunia.

Tahun 2023 Uni Eropa mendominasi pasar global dengan nilai impor USD 61,85 miliar, meski pertumbuhannya hanya 0,05%. Amerika Serikat berada di posisi kedua dengan USD 27,38 miliar, meski turun 16,23%. Tiongkok dan Jepang juga berkontribusi signifikan dengan nilai impor masing-masing USD 23,32 miliar dan USD 14,37 miliar, keduanya mengalami penurunan masing-masing 0,59% dan 9,21% dari tahun sebelumnya (YoY). Pada tahun 2023, impor perikanan dunia didominasi oleh komoditas trout dan salmon, dengan nilai mencapai USD 35,87 miliar, mencakup 19,4% dari total perdagangan perikanan global, dan tumbuh 1,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Komoditas udang berada di posisi kedua dengan nilai USD 27,00 miliar, menyumbang 14,6%, namun mengalami penurunan sebesar 13,9%. Tuna, tongkol, dan cakalang mencatat nilai impor USD 15,92 miliar (8,6% dari total), dengan penurunan 5,8%. Cumi-cumi, sotong, dan gurita mencatat impor USD 11,44 miliar (6,2% dari total), meskipun turun 2,7%.

Tepung dan pakan ikan berkontribusi USD 6,50 miliar (3,5%), dengan penurunan 0,2%. Nilai impor kepiting atau rajungan sebesar USD 5,92 miliar (3,2%), turun 20,6%. Ikan cod mencatat impor USD 5,49 miliar (3,0%), dengan penurunan 9,5%.

Indonesia masih menjadi importir *seafood* untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang tidak dapat dipenuhi oleh produksi lokal. Pada tahun 2023, Indonesia mengimpor produk perikanan sekitar 366.791,62 ton. Impor ini mencakup berbagai jenis *seafood*, termasuk ikan segar, beku, dan olahan mulai dari makarel hingga rumput laut. Nilai impor hasil perikanan Indonesia pun bervariasi dengan makarel menjadi komoditas impor terbesar sebesar USD 136,98 juta. Di sisi lain, ikan Cod dan Rumput Laut mencatat nilai impor yang lebih rendah, masing-masing sekitar USD 36,55 juta dan USD 33,96 juta. Udang dan Cumi-Sotong-Gurita memiliki nilai impor paling kecil, masing-masing USD 38,78 juta dan USD 19,93 juta. Komoditas lain seperti Tepung Ikan juga memiliki nilai impor tinggi hingga USD 64,59 juta.

Saat ini, negara-negara eksportir terbesar di dunia adalah Tiongkok, Norwegia, Ekuador, dan Chili. Tiongkok mendominasi dengan nilai ekspor sebesar USD 20,68 miliar, mencakup 11,18% dari total perdagangan dunia, meskipun turun 11,93% dibandingkan tahun sebelumnya. Norwegia berada di posisi kedua dengan nilai ekspor USD 16,05 miliar (8,68% dari total), dan mencatat pertumbuhan positif sebesar 2,80%. Ekuador dan Chili masing-masing mencatat nilai ekspor USD 9,04 miliar (4,89%) dan USD 8,89 miliar (4,81%), dengan Ekuador mengalami penurunan 10,72%, sementara Chili tumbuh 1,71%. Indonesia berada di peringkat ke-13 dengan nilai ekspor USD 5,6 miliar, berkontribusi 3,03% terhadap total perdagangan perikanan dunia.

Beberapa komoditas unggulan ekspor Indonesia masih menghadapi tantangan di pasar global, dengan pangsa pasar yang relatif kecil dan kalah bersaing dibandingkan negara-negara lain. Salah satu contoh adalah udang, yang menjadi andalan ekspor Indonesia dengan kontribusi sebesar 30,7% dari total ekspor produk perikanan Indonesia pada tahun 2023. Meskipun demikian, Indonesia hanya berada di peringkat kelima sebagai eksportir udang utama dunia,

di bawah Ekuador yang memiliki pangsa pasar 25,6%, India (17,3%), Vietnam (10,3%), dan Tiongkok (6,8%).

Ekspor udang Indonesia juga tengah menghadapi tantangan di pasar Amerika Serikat, yang merupakan importir udang terbesar di dunia. Berdasarkan hasil Preliminary Determination dari United States Department of Commerce (USDOC), Indonesia dinyatakan melakukan tindakan dumping pada periode investigasi 1 September 2022 hingga 31 Agustus 2023. Akibatnya, sejak 1 Juni 2024, ekspor udang beku Indonesia dikenakan tambahan tarif anti-dumping sementara sebesar 6,3%. Besaran tarif anti-dumping final akan ditetapkan setelah penerbitan *Final Determination* secara resmi oleh USDOC. Selain itu, Indonesia juga belum terdaftar sebagai negara yang dapat mengekspor udang hasil tangkapan (*certified nation*) ke Amerika Serikat, yang menyebabkan kendala tambahan bagi ekspor udang Indonesia.

Di sisi lain, Indonesia merupakan produsen utama tuna-cakalang-tongkol dunia, dengan produksi mencapai 1,44 juta ton pada tahun 2024. Namun, kontribusi besar ini belum tercermin dalam pangsa pasar tuna-cakalang-tongkol Indonesia di dunia. Pada tahun 2024, Indonesia hanya menempati peringkat kelima eksportir utama tuna-cakalang-tongkol dengan pangsa pasar 6,3% atau setara dengan USD 1,01 miliar, masih di bawah Thailand (16,1%), Ekuador (10,1%), Tiongkok (8,9%), dan Spanyol (8,3%).

Tantangan lainnya datang dari pengenaan tarif tinggi untuk produk olahan (tariff escalation) oleh Uni Eropa dan Jepang, yang merupakan importir utama tuna-cakalang-tongkol dunia. KKP terus melakukan negosiasi untuk menurunkan tarif tersebut. Melalui forum Indonesia–Japan Economic Partnership Agreement (IJ-EPA) yang ditandatangani pada 8 Agustus 2024, disepakati penurunan tarif 4 (empat) post tarif untuk tuna-cakalang-tongkol kaleng dan olahan lainnya menjadi 0%, yang ditargetkan berlaku efektif pada triwulan I tahun 2026. Negosiasi serupa berlangsung dalam forum Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), yang bertujuan menurunkan tarif impor

produk perikanan Indonesia termasuk tuna olahan sampai dengan 0% baik secara langsung maupun gradual.

Indonesia juga hanya menempati peringkat keempat sebagai eksportir global untuk komoditas cumi-sotong-gurita dan rajungan-kepiting. Pada tahun 2024, ekspor cumi-sotong-gurita Indonesia mencapai USD 0,87 miliar dengan pangsa pasar 7,1%, berada di bawah Tiongkok (29,5%), Spanyol (10,8%), dan Maroko (8,5%). Sementara itu, ekspor rajungan-kepiting Indonesia mencapai USD 0,45 miliar dengan pangsa pasar 7,2%, dibawah Rusia (30,9%), Kanada (18,1%), dan Tiongkok (10,3%).

Namun, Indonesia memiliki posisi yang lebih baik sebagai eksportir rumput laut. Pada tahun 2024, Indonesia menduduki peringkat ketiga sebagai eksportir rumput laut dunia dengan nilai ekspor sebesar USD 0,34 miliar dan pangsa pasar 11,4%, hanya kalah dari Tiongkok yang memiliki pangsa pasar 23,2% dan Korea Selatan 16,9%. Potensi peningkatan ekspor rumput laut Indonesia sangat besar, terutama karena ekspor saat ini didominasi oleh rumput laut kering dengan kontribusi 56,3%, yang sebagian besar diekspor ke Tiongkok. Produksi karaginan Tiongkok sangat bergantung pada bahan baku impor dari Indonesia, khususnya *Kappaphycus alvarezii* (Cottonii) dan *Eucheuma denticulatum* (Spinsum), dengan volume impor sebesar 117.004 ton atau setara dengan 92,8% dari total impor Dried Eucheuma oleh Tiongkok.

Tantangan lainnya pada industri perikanan Indonesia adalah masalah keamanan pangan, dimana kontaminasi oleh bakteri patogen seperti *Salmonella* sp., *Listeria* sp., dan *Vibrio* sp. Dapat menimbulkan risiko kesehatan yang serius bagi konsumen. Kontaminasi ini bisa terjadi sepanjang rantai pasok, mulai dari lingkungan alam, selama proses penangkapan, hingga tahap pengolahan dan distribusi. Di samping itu, munculnya produk substitusi berbasis sel dan tumbuhan juga menjadi tantangan baru bagi industri perikanan tradisional. Produk-produk ini semakin dilirik karena dianggap lebih berkelanjutan dan etis, mengingat proses produksinya tidak melibatkan penangkapan ikan dan dapat dirancang untuk memiliki profil nutrisi yang lebih baik. Walaupun saat ini produk substitusi tersebut

masih dalam tahap pengembangan, potensi pertumbuhannya sangat besar dan bisa menjadi pesaing serius bagi produk perikanan konvensional di masa depan.

Hambatan ekspor non tarif lainnya yang saat ini dihadapi oleh Indonesia adalah ditemukannya kandungan Radionuklida Cesium 137 (Cs-137) pada produk udang yang di ekspor ke Amerika Serikat, hal ini menjadikan United States Food and Drug Administration (USFDA) menerbitkan import alert untuk udang Indonesia yang berasal dari UPI tertentu, sehingga harus diterbitkan sertifikat tambahan yang menjamin bahwa udang Indonesia bebas kandungan Cs-137 untuk dapat masuk ke pasar Amerika Serikat. Selain isu Cs-137, Indonesia juga harus berhadapan dengan larangan impor masuk ke pasar Uni Eropa untuk produk perikanan budi daya mulai 3 September 2026 berdasarkan EU Commission Implementing Regulation (EU) 2024/2598 terkait larangan penggunaan produk obat antimikroba tertentu. Indonesia harus memastikan bahwa produk budidaya tidak mengandung produk obat antimikroba yang dilarang untuk ekspor ke pasar Uni Eropa.

Disamping itu pada bulan Agustus tahun 2025, Indonesia juga dikenakan tarif resiprokal sebesar 19% termasuk produk perikanan yang di ekspor ke Amerika Serikat. Tambahan tarif bea masuk ini menambahkan tekanan pada daya saing produk perikanan ke Amerika Serikat setelah sebelumnya terkena tarif dumping 3,9%.

Berbagai hambatan ekspor baik tarif dan non tarif di atas dikeluarkan oleh negara yang menjadi tujuan ekspor utama Indonesia yaitu Amerika Serikat dan Uni Eropa. Pemerintah harus merespon dengan cepat dan tepat dengan menyusun berbagai langkah perbaikan baik yang sifatnya teknis maupun penguatan diplomasi. Pada masa mendatang, hambatan non tarif akan menjadi trade barrier yang lebih dominan, mulai dari isu keamanan pangan, keberlanjutan, konservasi, perlindungan tenaga kerja, dan lain sebagainya. Pada saat yang sama, pemerintah akan terus memperjuangkan penghapusan atau eliminasi tarif bea masuk melalui berbagai perundingan perdagangan bebas dengan mitra

dagang baik secara bilateral, regional dan multilateral untuk menjadikan daya saing hasil perikanan Indonesia lebih kompetitif di pasar global.

Menghadapi tantangan-tantangan ini, sektor kelautan dan perikanan Indonesia perlu terus berinovasi dan meningkatkan standar kualitas, sekaligus memanfaatkan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki. Dengan pendekatan yang tepat, Indonesia dapat memperkuat posisinya sebagai pemain utama dalam industri perikanan global, sekaligus mendorong keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat pesisir yang bergantung pada sektor ini. Potensi besar yang dimiliki Indonesia dalam produksi rumput laut, tuna, dan komoditas perikanan lainnya harus dioptimalkan untuk memenuhi permintaan pasar global yang terus berkembang, sambil tetap menjaga kelestarian sumber daya laut yang ada.

F. Sistematika Penyajian

Penyusunan Laporan Kinerja Ditjen PDSPKP triwulan I tahun 2026 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan capaian kinerja Ditjen PDSPKP pada triwulan I tahun 2026. Capaian Kinerja (*Performance Results*) triwulan I tahun 2026 tersebut dibandingkan dengan Rencana Kinerja (*Performance Plan*) Tahun 2026 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi.



Gambar 4. Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN KINERJA

1. Rencana Strategis Ditjen PDSPKP Tahun 2025-2029

A. Visi

Visi Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan tahun 2025-2029 ditujukan untuk mendukung Visi Indonesia Emas 2045 dan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden tahun 2025-2029. Pada RPJPN, Visi Indonesia Emas 2045 dibagi dalam beberapa tahapan yang dilakukan secara terukur dan konsisten. Tahap pertama (tahun 2025- 2029), difokuskan pada penguatan fondasi transformasi. Tahap kedua (tahun 2030-2034), melakukan akselerasi untuk mewujudkan transformasi yang sudah diperkuat fondasinya. Selanjutnya pada tahap ketiga (tahun 2035-2039), Indonesia memulai langkah untuk melakukan ekspansi global. Kemudian pada tahap terakhir RPJPN (tahun 2040-2045), Indonesia diharapkan dapat mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 yaitu “Indonesia sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan”.

Visi Indonesia Emas 2045 didasari oleh landasan pemikiran tentang visi abadi Indonesia yang tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil, dan Makmur. Visi Presiden dan Wakil Presiden ini juga didukung oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Untuk tahap penguatan fondasi transformasi tahun 2025-2029, Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rencana strategis tahun 2025-2029 menetapkan visi: “Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan Sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan untuk Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Sebagai organisasi yang berada di bawah Presiden dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), maka Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan mendukung Visi Presiden dan Wakil Presiden serta Visi KKP. Pada tahap penguatan transformasi tahun 2025-2029, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan menetapkan

Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan Nomor 94 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan Tahun 2025 – 2029 dalam

rangka dalam rangka mendukung dua dari lima agenda transformasi yang didukung KKP, yaitu: (a) transformasi ekonomi, dan (b) ketahanan sosial budaya dan ekologi.

Untuk mendukung agenda pembangunan/penguatan transformasi, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan mendukung 2 arah kebijakan KKP yaitu sebagai berikut :

a. Arah Kebijakan :

- 1) Penangkapan ikan secara terukur berbasis kuota dan zona penangkapan
- 2) Pengembangan Perikanan Budi Daya di Laut, Pesisir dan Darat yang Berkelanjutan

b. Strategi

- 1) Hilirisasi penangkapan ikan berbasis komoditas unggulan
- 2) Meningkatkan investasi dan kemudahan berusaha
- 3) Peningkatan tata kelola dan kinerja sistem logistik ikan nasional termasuk pengembangan sistem telusur logistik ikan nasional
- 4) Pengembangan industri pengolahan dan pemasaran untuk mendukung hilirisasi dan peningkatan nilai tambah
- 5) Meningkatkan mutu, nilai tambah, dan daya saing produk kelautan dan perikanan
- 6) Penguatan pasar dalam negeri melalui peningkatan akses kemudahan Masyarakat
- 7) Penguatan pasar luar negeri

Selanjutnya upaya transformasi super prioritas (*Game Changers*) yang dilakukan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan tahun 2025-2029 adalah:

- 1) Industrialisasi yang berorientasi pada hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor
- 2) Ketahanan energi dan air, serta kemandirian pangan dengan pendekatan terpadu FEW Nexus (*Food, Energy, Water*)

B. Misi

Dalam rangka mencapai visi dan dua agenda pembangunan/penguatan transformasi yang didukung, maka Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing

Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) perlu menentukan misi yang akan dilakukan untuk tahun 2025-2029. Misi Ditjen PDSPKP akan mendukung Misi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden serta Misi KKP.

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan dan untuk melaksanakan misi Presiden dan wakil Presiden dalam RPJMN tahun 2025-2029, Kementerian Kelautan dan Perikanan melaksanakan 7 dari 8 Misi/Asta Cita yang dirumuskan sebagai berikut:

- 1) “Menjaga Keberlanjutan Ekosistem dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan” yang melaksanakan Asta Cita 2 dan 8;
- 2) “Mengembangkan Sektor Kelautan dan Perikanan Sebagai Penggerak Utama Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan” yang melaksanakan Asta Cita 2, 3, 5, dan 6;
- 3) “Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan” yang melaksanakan Asta Cita 4; dan
- 4) “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif dan Berkualitas” yang melaksanakan Asta Cita 7.

Dari empat misi KKP tersebut, Ditjen PDSPKP mendukung dua misi, yaitu:

- 1) Mengembangkan sektor kelautan dan perikanan sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi berkelanjutan
- 2) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berkualitas

C. Tujuan

Guna mendukung visi dan misi yang telah ditetapkan, maka perlu dirumuskan tujuan pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan untuk tahun 2025–2029. Mengacu Rencana Strategis (Renstra) KKP Tahun 2025–2029, ada empat tujuan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2025–2029, yaitu:

1. Meningkatnya efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;

2. Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan secara berkelanjutan serta pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berdaya saing;
3. Meningkatnya kompetensi SDM kelautan dan perikanan; dan
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berkualitas

Dari empat tujuan tersebut yang menjadi tujuan dari pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan adalah :

1. Meningkatkan akses pasar produk kelautan dan perikanan di pasar dalam dan luar negeri serta usaha pengolahan dan pemasaran. Pencapaian tujuan ini ditandai dengan:
 - a) Target Indikator Nilai Ekspor Rumput Laut tahun 2026 sebesar USD 647 juta dan meningkat menjadi sebesar USD 898 juta pada tahun 2029;
 - b) Target Indikator Nilai Ekspor Produk Perikanan Lainnya tahun 2026 sebesar USD 6,05 miliar dan meningkat menjadi sebesar USD 7,60 miliar pada tahun 2029;
 - c) Target Nilai Pemasaran Produk Perikanan Dalam Negeri tahun 2026 sebesar Rp320,80 triliun dan meningkat menjadi sebesar Rp352,01 triliun pada tahun 2029;
 - d) Target Persentase UMKM Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan Naik Kelas tahun 2026 sebesar 5,50% dan meningkat menjadi sebesar 7% pada tahun 2029.
2. Mewujudkan tata kelola birokrasi yang efisien, profesional, dan berorientasi hasil dalam mendukung penguatan daya saing sektor kelautan dan perikanan. Pencapaian tujuan ini ditandai dengan:

Target Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Lingkup Ditjen PDSPKP tahun 2026 sebesar 86,50 dan meningkat menjadi sebesar 88 pada tahun 2029

2. Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Sebagai upaya perbaikan perencanaan, Ditjen PDSPKP melakukan reviu terhadap Sasaran Program dan Indikator Kinerja Ditjen PDSPKP dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pada tahun 2025, masukan dari Sekretariat Jenderal KKP, serta rekomendasi dari Inspektorat Jenderal KKP.

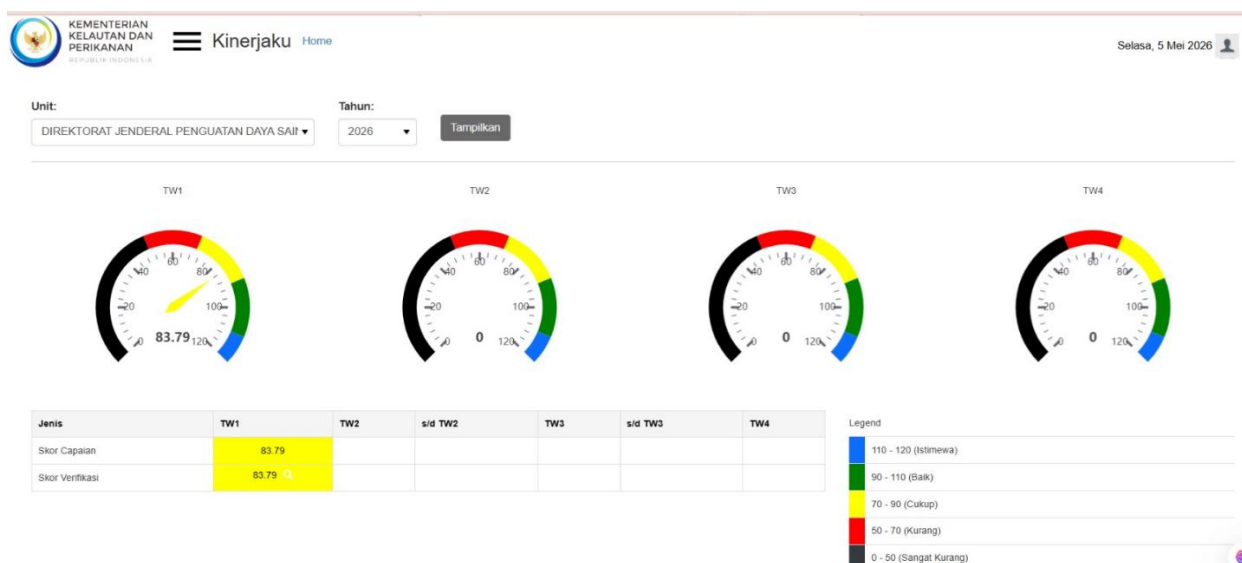
Tabel 1. Perjanjian Kinerja Ditjen PDSPKP Tahun 2026

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET
1	Meningkatnya Nilai Tambah Produk Kelautan dan Perikanan yang Berdaya Saing	1.	Nilai Ekspor Rumput Laut (USD Juta)	647
		2.	Nilai Ekspor Produk Perikanan Lainnya (USD Miliar)	6,05
		3.	Nilai Pemasaran Produk Perikanan Dalam Negeri (Rp Triliun)	320,80
		4.	Persentase UMKM Pengolahan Produk KP Naik Kelas (%)	5,50
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan Ditjen PDSPKP	5.	Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Lingkup Ditjen PDSPKP (Nilai)	86,50

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

1. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Triwulan I tahun 2026 merupakan hasil dari pelaksanaan program/kegiatan Ditjen PDSPKP dari Januari sampai dengan Maret 2026. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) merupakan gambaran nilai kinerja suatu organisasi secara terukur keseluruhan yang bisa diperoleh dari Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK). NKO Ditjen PDSPKP Triwulan I tahun 2026 adalah sebesar 83,79. Capaian NKO Triwulan I 2026 meningkat sebesar 7,46% dari capaian periode yang sama tahun 2025 yaitu sebesar 77,97. Adapun capaian NKO Triwulan I 2026 sebagaimana terdapat pada Gambar 6.



Gambar 5. Capaian NKO pada Triwulan I tahun 2026

Target Sasaran Program dan Indikator Kinerja Ditjen PDSPKP pada Triuwlan I Tahun 2026 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Ditjen PDSPKP Triwulan I Tahun 2026

Indikator Kinerja		Target		Realisasi TW I 2026	Persentase terhadap Target (%)	
		Tahun 2026	TW I 2026		Tahun 2026	TW I 2026
1	Nilai Ekspor Rumput Laut (USD Juta)	647	154	62,21*	9,61	40,40
2	Nilai Ekspor Produk Perikanan Lainnya (USD Miliar)	6,05	1,44	1,31*	21,65	90,97
3	Nilai Pemasaran Produk Perikanan Dalam Negeri (Rp Triliun)	320,8	-	-	-	-
4	Persentase UMKM Pengolahan Produk KP Naik Kelas (%)	5,5	0,5	0,7	12,72	140
5	Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Lingkup Ditjen PDSPKP (Nilai)	86,5	-	-	-	-

2. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Evaluasi dan analisis capaian kinerja menjelaskan realisasi indikator kinerja, permasalahan dan kendala yang dihadapi serta upaya perbaikan yang dilakukan ke depan dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan kinerja Ditjen PDSPKP. Analisis untuk setiap sasaran strategis dan indikator kinerja utama dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran Program 1. Meningkatnya Nilai Tambah Produk Kelautan dan Perikanan yang Berdaya Saing

A. IKU 1. Nilai Ekspor Rumput Laut

Ekspor rumput laut merupakan kegiatan pengiriman komoditas rumput laut dari wilayah pabean Indonesia ke luar negeri, baik untuk tujuan komersial maupun non-komersial seperti hibah, sumbangan, atau hadiah. Kegiatan ini juga mencakup pengiriman rumput laut untuk diolah di luar negeri dan hasilnya dimasukkan kembali ke Indonesia. Nilai ekspor rumput laut dihitung berdasarkan total nilai seluruh kode *Harmonized System (HS)* terkait rumput laut sebagaimana tercantum dalam *Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2022*, dan dinyatakan dalam satuan dolar Amerika Serikat (USD).

Tabel 3. Ikhtisar Pencapaian Nilai Ekspor Rumput Laut

Indikator Kinerja	Target			Realisasi			% Realisasi Terhadap Target TW I 2026	% Realisasi s.d TW I Terhadap Target 2026	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi TW I 2025
	TW I 2026	TW I 2025	Tahun 2026	TW I 2026	TW I 2025	S.d TW I 2026			
Nilai Ekspor Rumput Laut (USD Juta)	154	0,14	647	62,21	73,51	62,21	40,40	9,61	-15,37

Sumber Data: BPS, Prognosa Maret 2026, Diolah Ditjen PDSPKP

*angka prognosa sampai dengan Maret

1. Analisa Capaian Indikator Kinerja Nilai Ekspor Rumput Laut

Ditjen PDSPKP melakukan perhitungan prognosa capaian ekspor rumput laut hingga Triwulan I tahun 2026 dengan menggunakan pendekatan data historis (*time series*) tahun sebelumnya. Pendekatan ini digunakan karena terdapat *lag* publikasi data ekspor dari Badan Pusat Statistik (BPS) sekitar satu bulan. Sampai dengan penyusunan laporan ini, data ekspor rumput laut Indonesia dari BPS yang tersedia adalah data sampai dengan bulan Februari 2026 sehingga data Maret 2026 merupakan angka prognosa.

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, nilai ekspor rumput laut hingga Triwulan I tahun 2026 diperkirakan mencapai USD 62,21 juta atau setara dengan 40,40% dari target Triwulan I sebesar USD 154 juta dan 9,61% dari target tahun 2026

sebesar USD 647 juta. Selain itu, jika dibandingkan dengan realisasi Triwulan I tahun 2025, nilai ekspor ini menunjukkan penurunan sebesar 15,37%, yang mengindikasikan adanya tekanan pada kinerja ekspor di awal tahun 2026.

Hasil perhitungan prognosa hingga bulan Maret tahun 2026 juga mengindikasikan bahwa kinerja ekspor rumput laut Indonesia masih belum mencapai target yang ditetapkan. Sementara itu, berdasarkan data resmi BPS hingga Februari 2026, nilai ekspor rumput laut Indonesia tercatat sebesar USD 43,5 juta dengan volume mencapai 28,5 ribu ton. Dari sisi tujuan ekspor, Tiongkok masih menjadi pasar utama dengan nilai ekspor sebesar USD 26,08 juta atau berkontribusi sebesar 59,9% terhadap total ekspor rumput laut Indonesia. Selanjutnya diikuti oleh Uni Eropa sebesar USD 6,47 juta (14,9%), Jepang sebesar USD 1,73 juta (4,0%), ASEAN sebesar USD 1,65 juta (3,8%), dan Amerika Serikat sebesar USD 1,27 juta (2,9%).

Ketidaktercapaian indikator kinerja nilai ekspor rumput laut dan penurunan ekspor rumput laut Indonesia pada periode Februari 2026 terutama dipengaruhi oleh melemahnya permintaan dari pasar utama, khususnya Tiongkok yang menyerap sekitar 59,9% total ekspor rumput laut nasional. Perlambatan ekonomi dan penyesuaian pada industri pengolahan di negara tersebut mendorong penurunan impor bahan baku, termasuk rumput laut, yang tercermin dari turunnya volume ekspor Indonesia hingga -17,3% sedangkan secara nilai turun -7,1% yang menunjukkan masih dominannya ekspor produk bahan mentah daripada produk nilai tambah.

Di sisi lain, pasar alternatif seperti Uni Eropa, Jepang, dan ASEAN juga mengalami pelemahan permintaan akibat tekanan ekonomi global dan perubahan pola konsumsi, sehingga belum mampu mengompensasi penurunan dari Tiongkok. Kondisi ini menunjukkan bahwa penurunan ekspor rumput laut lebih disebabkan oleh faktor eksternal berupa perlambatan permintaan global dan tingginya ketergantungan pada pasar tertentu, dibandingkan karena peningkatan daya saing negara pesaing. Namun demikian, struktur ekspor yang masih didominasi bahan mentah menjadikan Indonesia lebih rentan terhadap fluktuasi pasar internasional, sehingga memperdalam dampak penurunan tersebut.

Dari sisi struktur produk, ekspor rumput laut Indonesia terdiri atas rumput laut kering dan produk olahan. Secara historis, ekspor rumput laut nasional masih

cenderung didominasi produk bahan baku/kering sehingga nilai ekspor relatif rentan terhadap fluktuasi harga global serta perubahan permintaan dari negara pengolah utama. Kondisi tersebut menyebabkan nilai tambah yang diperoleh belum optimal dibandingkan potensi produksi nasional. Namun demikian, hingga Februari 2026 nilai ekspor produk olahan rumput laut tercatat mencapai USD 21,8 juta atau meningkat sebesar 10,5% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, meskipun secara volume menurun -7,1% yang menggambarkan nilai peningkatan produk olahan. Prognosa peningkatan ini diikuti dengan kenaikan proporsi produk olahan menjadi 48,31% dari total ekspor rumput laut, atau meningkat 5,38% dibandingkan periode sebelumnya. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan struktur ekspor ke arah produk bernilai tambah yang lebih tinggi. Meskipun demikian, peningkatan tersebut belum mampu mengimbangi penurunan kinerja ekspor secara keseluruhan, sehingga total nilai ekspor rumput laut masih mengalami tekanan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, rekomendasi tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada triwulan II tahun 2026 yaitu Penerbitan Sertifikat Standar PT Seaweed Indonesia Trading, Koordinasi dengan Asosiasi Industri Rumput Laut, Pembahasan *Launching Forum to Boost The Seafood / Aquatic Business Between Indonesia And China* bersama China Fisheries Association(CFA), Webinar terkait Rumput Laut pada Pameran Indofisheris, Penjajakan Kerjasama Akses Pasar Pengolah Rumput Laut dan Penyusunan Profilling Industri Karagenan.

2. Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja

Ditjen PDSPKP telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini antara lain:

1) Pelaksanaan Promosi Produk Rumput Laut Skala Internasional

Ditjen PDSPKP berencana memfasilitasi pertemuan langsung antara pelaku usaha Indonesia dan mitra pasar internasional melalui kegiatan *Buyer Mission* untuk produk rumput laut. Dalam rangka kegiatan tersebut, dilakukan persiapan pelaksanaan *buyer mission* produk rumput laut yang bertujuan untuk meningkatkan peluang transaksi, memperluas akses pasar ekspor, membangun kepercayaan pembeli internasional terhadap kualitas, kapasitas dan keberlanjutan produk perikanan Indonesia serta mengidentifikasi kebutuhan pasar dan potensi

pengembangan produk sesuai permintaan global melalui penguatan *market intelligence*. Selain itu, adanya sosialisasi upaya promosi/sosialisasi terkait biodiversitas dan potensi rumput laut di Indonesia dalam rangka memperluas basis pemanfaatan dan pasar rumput laut.

Dalam pelaksanaan *buyer mission* rumput laut akan melibatkan kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari SIPPO (*Swiss Export Promotion Organization*) sebagai mitra utama, perwakilan RI di luar negeri (KBRI, KJRI, ITPC), hingga mitra kerja seperti GQSP-UNIDO (*Global Quality and Standards Programme*) dan *Promise II Impact*. Teknis pelaksanaannya mencakup rangkaian kegiatan seperti *market intelligence*, *business matching* (*B2B meeting*), kunjungan lapangan ke pabrik pengolahan, hingga opsi pertemuan secara daring untuk efisiensi biaya dan waktu.



Gambar 6. Persiapan Pelaksanaan Buyer Mission

2) Pelaksanaan Kerjasama Pemasaran Rumput Laut

Kerjasama pemasaran rumput laut adalah bentuk kolaborasi antara pelaku usaha (pembudidaya, kelompok nelayan, koperasi, pengolah, hingga perusahaan) untuk memasarkan produk rumput laut secara lebih efektif, luas, dan menguntungkan. Secara sederhana, hal ini berarti tidak menjual sendiri-sendiri, tetapi bekerja bersama dalam hal penjualan, distribusi, promosi, hingga akses pasar. Tujuan utama kerjasama pemasaran rumput laut untuk meningkatkan harga jual dan daya tawar petani/nelayan, memperluas akses pasar (lokal, nasional, ekspor), menjamin keberlanjutan penyerapan hasil panen, serta meningkatkan nilai tambah (misalnya diolah dulu sebelum dijual).

Salah satu fasilitasi kerjasama adalah inisiasi kerjasama antara *World Wide Fund for Nature* (WWF) dan pembudidaya skala kecil pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2026. Dalam upaya mendorong peningkatan kehidupan pembudidaya

skala kecil, WWF memelopori *Challenge Project* (2021–2026) yang merupakan kompetisi berhadiah berbasis pengembangan Program *AgResult: Indonesia Pay-for-Results*. Kompetisi ini terbagi ke dalam dua kategori, yaitu kategori Teknologi yang diikuti oleh 13 perusahaan dan kategori Pendampingan Teknis yang diikuti oleh 8 perusahaan. Insentif yang diberikan dalam program *AgResult* dimanfaatkan oleh perusahaan rintisan untuk mempromosikan serta meningkatkan penggunaan produk teknologi budidaya kepada pembudidaya skala kecil, utamanya adalah pembudidaya rumput laut. Kegiatan *roadshow AgResult* dilaksanakan di berbagai wilayah yang merupakan sentra budidaya perikanan, antara lain di Cilacap, Lampung, dan Sumbawa.

Ditjen PDSPKP memberikan catatan atas usulan proposal dari WWF, supaya kompetisi *AgResult* dapat mengikutsertakan perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan hasil perikanan termasuk produk rumput laut, termasuk penyedia peralatan pengolahan dan *buyer* juga. Usulan ini bertujuan untuk memperkuat akses pasar hasil produksi pembudidaya rumput laut.



Gambar 7. Fasilitasi kerjasama adalah inisiasi kerjasama antara World Wide Fund for Nature (WWF) dan pembudidaya skala kecil

3) Penumbuhan Eksportir Produk Rumput Laut

Ditjen PDSPKP melaksanakan koordinasi internal lintas unit serta inisiasi identifikasi pelaku usaha rumput laut yang berpotensi menjadi eksportir baru. Kegiatan ini difokuskan pada pemetaan pelaku usaha, kesiapan produksi, legalitas usaha, mutu produk, serta potensi akses pasar ekspor. Periode Triwulan I Tahun 2026, penumbuhan eksportir rumput laut berada pada tahap identifikasi dan peninjauan kesiapan usaha. Proses tersebut memerlukan waktu, mengingat pelaku

usaha perlu memahami persyaratan ekspor, standar mutu, kontinuitas pasokan, pengemasan, serta administrasi perdagangan internasional.

Sebagai tindak lanjut, koordinasi awal telah dilaksanakan dengan salah satu UMKM pengolah rumput laut yang memproduksi bahan pangan berbasis rumput laut dan memiliki potensi untuk dikembangkan ke pasar ekspor. Inisiasi tersebut selanjutnya akan diperdalam melalui kegiatan *business matching* UMK Siap Ekspor guna mempertemukan pelaku usaha dengan calon *buyer* dan mitra usaha, sekaligus meningkatkan pemahaman terhadap kebutuhan pasar ekspor.

3. Tindak lanjut atas rekomendasi Triwulan IV Tahun 2025

Pada Triwulan I Tahun 2026 Ditjen PDSPKP telah melaksanakan kegiatan koordinasi dan komunikasi intensif dengan pelaku usaha rumput laut, termasuk Unit Pengolahan Rumput Laut (UPRL), eksportir, serta pemangku kepentingan terkait lainnya. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperoleh informasi terkini mengenai perkembangan produksi, penyerapan bahan baku, dinamika harga, kondisi permintaan pasar ekspor, serta berbagai kendala yang dihadapi pelaku usaha dalam proses pengolahan dan pemasaran.

Melalui pelaksanaan koordinasi tersebut, diperoleh gambaran bahwa kinerja ekspor rumput laut pada awal tahun 2026 masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain perlambatan permintaan dari pasar utama, fluktuasi harga bahan baku di tingkat pembudidaya, pengaruh faktor cuaca terhadap pasokan dan kualitas produk, serta tingginya sensitivitas ekspor terhadap perubahan harga global. Di sisi lain, pelaku usaha juga menyampaikan adanya tren positif pada peningkatan ekspor produk olahan rumput laut yang menunjukkan pergeseran struktur ekspor ke arah produk bernilai tambah lebih tinggi.

Kegiatan koordinasi ini juga menjadi sarana sinkronisasi langkah antara pemerintah dan pelaku usaha dalam mendorong peningkatan daya saing sektor rumput laut, termasuk penguatan hilirisasi, perluasan akses pasar, peningkatan kualitas produk sesuai standar negara tujuan, serta pemanfaatan peluang pasar non-tradisional. Selain itu, komunikasi yang terbangun secara berkelanjutan diharapkan dapat mempercepat respons terhadap dinamika pasar global serta mendukung perumusan kebijakan yang lebih adaptif dan tepat sasaran. Dengan terlaksananya

kegiatan koordinasi pada Triwulan I Tahun 2026, diharapkan upaya percepatan pemulihan kinerja ekspor rumput laut dapat terus diperkuat, seiring peningkatan kontribusi produk olahan terhadap total ekspor nasional dan terjaganya keberlanjutan usaha pada rantai nilai rumput laut nasional.

4. Realisasi anggaran

Ditjen PDSPKP telah mengalokasikan anggaran dalam rangka pencapaian indikator kinerja Nilai Ekspor Rumput Laut sebesar Rp565.630.000,- sampai dengan periode Triwulan I tahun 2026 telah direalisasikan sebesar Rp5.607.380,- atau setara dengan 0,99%, -.

B. IKU 2. Nilai Ekspor Produk Perikanan Lainnya

Komoditas produk perikanan lainnya merupakan hasil perikanan yang ditangani, diolah, dan/atau dijadikan produk akhir berupa ikan segar, ikan beku, serta berbagai produk olahan selain komoditas rumput laut. Ekspor produk perikanan lainnya merupakan kegiatan pengeluaran komoditas tersebut dari wilayah pabean Republik Indonesia (*the customs frontier*), baik untuk tujuan komersial maupun non-komersial (hibah, sumbangan, atau hadiah) serta produk yang dikirim ke luar negeri untuk diolah lebih lanjut dan hasil olahannya kemudian dimasukkan kembali ke Indonesia. Nilai ekspor produk perikanan lainnya dihitung berdasarkan total nilai ekspor seluruh produk perikanan di luar komoditas rumput laut, dengan mengacu pada klasifikasi kode HS (*Harmonized System*) sebagaimana tercantum dalam *Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2022*, dan dinyatakan dalam satuan mata uang Dolar Amerika Serikat (USD).

Tabel 4. Ikhtisar Pencapaian Nilai Ekspor Produk Perikanan Lainnya

Indikator Kinerja	Target			Realisasi			% Realisasi Terhadap Target TW I 2026	% Realisasi s.d TW I Terhadap Target 2026	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi TW I 2025
	TW I 2026	TW I 2025	Tahun 2026	TW I 2026	TW I 2025	S.d TW I 2026			
Nilai Ekspor Produk Perikanan Lainnya (USD Miliar)	1,44	1,35	6,05	1,31	1,43	1,31	90,97	21,65	-8,39

Sumber Data: BPS, Prognosa Maret 2026, Diolah Ditjen PDSPKP

*angka prognosa sampai dengan Maret 2026

1. Analisa Capaian Indikator Kinerja Nilai Ekspor Produk Perikanan Lainnya

Sehubungan dengan adanya jeda waktu publikasi data ekspor selama satu bulan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai sumber utama data ekspor produk perikanan lainnya, maka Ditjen PDSPKP melakukan perhitungan prognosa capaian ekspor perikanan lainnya hingga Triwulan I tahun 2026 dengan menggunakan pendekatan data historis (*time series*) tahun sebelumnya. Pendekatan ini digunakan karena ketersediaan data ekspor dari Badan Pusat Statistik (BPS) mengalami keterlambatan publikasi (lag) sekitar satu bulan. Sampai dengan penyusunan laporan ini, data ekspor perikanan lainnya Indonesia dari BPS yang tersedia adalah data sampai dengan bulan Februari 2026 sehingga data Maret 2026 merupakan angka prognosa.

Berdasarkan hasil perhitungan prognosa tersebut, nilai ekspor perikanan lainnya hingga Triwulan I tahun 2026 diperkirakan mencapai USD 1,31 miliar. Capaian ini setara dengan 90,97% dari target Triwulan I sebesar USD 1,44 miliar dan 21,65% dari target tahun 2026 sebesar USD 6,05 miliar. Jika dibandingkan dengan realisasi Triwulan I tahun 2025 sebesar USD 1,35 Miliar, nilai ekspor ini menunjukkan penurunan sebesar 8,39%, yang mengindikasikan adanya tekanan pada kinerja ekspor di awal tahun 2026.

Beberapa hal yang menyebabkan tidak tercapainya Indikator Kinerja Nilai Ekspor Produk Perikanan Lainnya, serta terjadinya penurunan kinerja ekspor perikanan Indonesia hingga Februari–Maret 2026 dipengaruhi oleh kombinasi faktor eksternal dan domestik. Dari sisi eksternal, pelemahan permintaan global menjadi faktor utama, seiring kondisi ekonomi dan geopolitik dunia yang masih menunjukkan

kehati-hatian. Hal ini tercermin dari penurunan permintaan di beberapa pasar utama seperti Tiongkok, Jepang, dan Uni Eropa, yang berdampak langsung pada penurunan volume ekspor hampir di seluruh komoditas perikanan. Selain itu, terjadi perubahan pola konsumsi global yang cenderung beralih ke produk dengan harga lebih terjangkau (*downtrading*), serta fenomena *destocking* oleh importir yang menahan pembelian baru.

Di sisi lain, gangguan pada rantai pasok global akibat eskalasi geopolitik di kawasan Timur Tengah sejak akhir Februari 2026 turut memperburuk kondisi tersebut. Gangguan ini menyebabkan perubahan rute pengiriman, peningkatan biaya logistik, serta keterbatasan ketersediaan kontainer dan kapal induk (*mother vessel*). Kenaikan harga energi, khususnya Bahan Bakar Minyak (BBM), juga berdampak pada meningkatnya biaya operasional nelayan dan distribusi pelaku usaha, yang pada akhirnya mempengaruhi produktivitas dan daya saing harga produk perikanan Indonesia di pasar internasional. Secara indikatif, kondisi ini turut menekan volume ekspor pada awal Maret 2026, meskipun penurunan nilai relatif lebih terbatas dibandingkan penurunan volume, yang mengindikasikan adanya penyesuaian komposisi produk ke arah yang lebih bernilai.

Faktor domestik juga berkontribusi terhadap tertahannya realisasi ekspor, khususnya pada periode Hari Raya Idul Fitri tanggal 21 Maret 2026. Libur nasional dan tradisi mudik menyebabkan penyesuaian aktivitas operasional pada eksportir, unit pengolahan ikan, serta layanan logistik.

Selain faktor-faktor tersebut, struktur ekspor perikanan Indonesia yang masih terkonsentrasi pada pasar dan komoditas tertentu turut meningkatkan kerentanan terhadap fluktuasi permintaan global. Ketergantungan pada pasar utama serta dominasi produk berbasis bahan mentah menyebabkan dampak penurunan permintaan menjadi lebih dalam dibandingkan negara pesaing yang telah lebih terdiversifikasi dan mengembangkan produk bernilai tambah. Meskipun demikian, terdapat indikasi awal perbaikan struktur ekspor, di mana penurunan nilai relatif lebih terbatas dibandingkan volume, serta peningkatan kontribusi produk olahan pada beberapa komoditas, yang menunjukkan arah transformasi ke produk bernilai tambah mulai berkembang, meskipun belum cukup kuat untuk menahan tekanan penurunan ekspor secara keseluruhan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, upaya perbaikan yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator Nilai Ekspor Produk Perikanan Lainnya yaitu

- a. Percepatan penyelesaian isu hambatan non-tarif di pasar utama (AS, Uni Eropa, Jepang) melalui koordinasi dan rapat pembahasan lintas unit kerja /Eselon I lingkup KKP dan atau K/L terkait;
- b. Pembahasan Launching Forum to Boost The Seafood / Aquatic Business Between Indonesia And China bersama China Fisheries Association(CFA)
- c. Penumbuhan eksportir baru yang memanfaatkan tarif preferensi IJ-EPA;
- d. Promosi Produk perikanan pada pameran Indonesia Internasional Seafood and Meat (IISM)

Berdasarkan data resmi BPS hingga Februari 2026, nilai ekspor perikanan lainnya tercatat sebesar USD 0,9 miliar dengan volume mencapai 165,5 ribu ton. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar 4,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dari sisi tujuan ekspor, Amerika Serikat masih menjadi pasar utama dengan nilai ekspor sebesar USD 337,2 juta atau berkontribusi sebesar 37,3% terhadap total ekspor perikanan lainnya. Selanjutnya diikuti oleh Tiongkok sebesar USD 143,02 juta (15,8%), ASEAN sebesar USD 126,29 juta (14%), Jepang sebesar USD 87,2 juta (9,6%), dan Uni Eropa sebesar USD 58,45 juta (6,5%). Kontribusi dari lima negara utama tujuan ekspor perikanan lainnya mencapai 83,2%.

Dari sisi jenis komoditasnya, ekspor perikanan lainnya didominasi 4 komoditas utama yaitu udang (34,8%), tuna-cakalang (15,6%), cumi-sotong-gurita (13,5%) dan kepiting-rajungan (9,6%) atau memberi kontribusi ekspor 73,4% dari total ekspor perikanan lainnya. Tiga komoditas utama, yakni tuna–cakalang, cumi-sotong-gurita dan rajungan-kepiting mengalami penurunan yang cukup signifikan berturut-turut sebesar 15,2%, 7,1% dan 3,6% sedangkan ekspor udang meningkat namun sangat kecil yaitu 0,5%.

Gambaran 4 komoditas utama ekspor perikanan lainnya sebagai berikut:

- a. Pasar utama Udang meliputi Amerika Serikat sebesar USD 202,44 Juta (64,3% dari total nilai ekspor Udang Indonesia), diikuti oleh Jepang USD 45,34 Juta (14,4%), Tiongkok USD 21,11 Juta (6,7%), ASEAN USD 14,66 Juta (4,7%) dan Uni Eropa USD 9,31 Juta (3,0%). Nilai ekspor Udang Indonesia hingga Februari 2026 mengalami kenaikan 0,5% dibanding periode yang sama tahun 2025.

- b. Pasar utama Tuna-Cakalang meliputi ASEAN sebesar USD 34,50 Juta (24,5% dari total nilai ekspor Tuna-Cakalang Indonesia), diikuti oleh Amerika Serikat USD 28,26 Juta (20,1%), Jepang USD 25,63 Juta (18,2%), Uni Eropa USD 17,25 Juta (12,3%) dan Timur Tengah USD 15,43 Juta (11,0%). Nilai ekspor Tuna-Cakalang Indonesia hingga Februari 2026 mengalami penurunan 15,2% dibanding periode yang sama tahun 2025.
- c. Pasar utama Cumi-Sotong-Gurita meliputi Tiongkok sebesar USD 54,01 Juta (44,3% dari total nilai ekspor Cumi-Sotong-Gurita Indonesia), diikuti oleh ASEAN USD 35,40 Juta (29,0%), Uni Eropa USD 12,07 Juta (9,9%), Amerika Serikat USD 6,75 Juta (5,5%) dan Taiwan USD 5,00 Juta (4,1%). Nilai ekspor Cumi-Sotong-Gurita Indonesia hingga Februari 2026 mengalami penurunan 7,1% dibanding periode yang sama tahun 2025.
- d. Pasar utama Rajungan-Kepiting meliputi Amerika Serikat sebesar USD 54,40 Juta (62,7% dari total nilai ekspor Rajungan-Kepiting Indonesia), diikuti oleh Tiongkok USD 18,40 Juta (21,2%), ASEAN USD 5,15 Juta (5,9%), Uni Eropa USD 2,87 Juta (3,3%) dan Jepang USD 1,99 Juta (2,3%). Nilai ekspor Rajungan-Kepiting Indonesia hingga Februari 2026 mengalami penurunan 3,6% dibanding periode yang sama tahun 2025.

2. Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja

Ditjen PDSPKP telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini antara lain:

- 1) Penanganan Hambatan Ekspor dan Perluasan Akses Pasar Luar Negeri melalui Kertas Posisi Runding.

Ditjen PDSPKP telah melakukan upaya penanganan hambatan ekspor untuk memitigasi dampak dari ketentuan pasar tujuan ekspor, terutama di pasar Uni Eropa. Upaya penanganan dilakukan melalui diselenggarakannya serangkaian rapat koordinasi lintas unit teknis terkait amandemen regulasi *IUU Fishing* Uni Eropa terkait sertifikasi hasil tangkapan ikan. Selain itu, pada Triwulan I telah disusun satu dokumen rekomendasi kebijakan (*policy brief*) mengenai penguatan koordinasi kebijakan ketertelusuran dalam kerangka Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional (STELINA), yang secara umum mendukung penguatan koordinasi kebijakan ketertelusuran dan sinergi antar unit

teknis dengan merekomendasikan pembagian peran yang jelas antara fungsi teknis penangkapan, sertifikasi mutu, dan fasilitasi perdagangan agar tidak menghambat kinerja perdagangan global. Usulan rekomendasi juga telah dituangkan dalam Rancangan Peraturan Menteri terkait mengenai Ketertelusuran dan Sertifikasi Ikan Hasil Tangkapan sebagaimana masukan yang disampaikan melalui nota dinas Sesditjen PDSPKP kepada Biro Hukum nomor 1029/DJPDSPKP.1/HK.160/III/2026 tanggal 17 Maret 2026.

Guna memitigasi penurunan kinerja ekspor, Ditjen PDSPKP juga melakukan pemetaan dan pemantauan hambatan ekspor di pasar Amerika Serikat dan pasar utama lainnya.



Gambar 8. Kegiatan Penyusunan Rekomendasi Rancangan Peraturan Menteri terkait mengenai Ketertelusuran dan Sertifikasi Ikan Hasil Tangkapan

2) Pelaksanaan Promosi Produk Kelautan dan Perikanan Skala Internasional

Ditjen PDSPKP berencana memfasilitasi pertemuan langsung antara pelaku usaha Indonesia dan mitra pasar internasional melalui kegiatan *Buyer Mission* untuk produk *seafood*. Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung pada minggu ke-4 Juni 2026 di Jakarta serta lokasi fasilitas produksi eksportir terkait. Berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut, telah dilaksanakan rapat persiapan kegiatan *Buyer Mission* (BM) 2026 pada 25 Februari 2026 di Raiser Ikan Hias Cibinong. Rapat ini dilakukan untuk mematangkan strategi perluasan pasar ekspor produk *seafood* dan rumput laut Indonesia melalui pertemuan langsung dengan mitra internasional.

Agenda utama pembahasan mencakup finalisasi materi pendukung seperti penyusunan KAK/TOR, rencana anggaran (RAB), serta kurasi daftar calon *buyers* dan eksportir peserta. Langkah ini diambil dengan cara menargetkan *buyers*

potensi dari ajang internasional (SEG 2026 dan FIE 2025) serta memperkuat koordinasi dengan organisasi mitra seperti SIPPO, Promise II Impact, dan GQSP guna memastikan kelancaran teknis dan pembagian beban biaya (*sharing cost*) selama kegiatan berlangsung.



Gambar 9. Kegiatan Penyusunan Rekomendasi Rancangan Peraturan Menteri terkait mengenai Ketertelusuran dan Sertifikasi Ikan Hasil Tangkapan

3) Penumbuhan Eksportir Kelautan Perikanan Baru

Ditjen PDSPKP melaksanakan implementasi Protokol Perubahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Jepang mengenai Indonesia–Japan Economic Partnership Agreement (IJ-EPA) pada sektor kelautan dan perikanan selama Triwulan I Tahun 2026.

Sebagai langkah awal, telah dilaksanakan verifikasi administrasi dan teknis tahap pertama terhadap Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang berminat memanfaatkan tarif preferensi IJ-EPA untuk produk olahan tuna dan sejenisnya pada kode HS 1604.14.091 dan HS 1604.14.099. Kegiatan ini bertujuan membuka peluang ekspor baru, meningkatkan daya saing produk nasional di pasar Jepang, serta mendorong bertambahnya pelaku usaha perikanan yang mampu menembus pasar ekspor premium.

Pada tahap awal registrasi, tercatat sebanyak 30 UPI mengajukan permohonan pemanfaatan tarif preferensi IJ-EPA. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen administrasi, sebanyak 13 UPI dinyatakan memenuhi persyaratan untuk melanjutkan ke tahap inspeksi lapangan. Selanjutnya, pada periode pertengahan Februari hingga pertengahan Maret 2026, telah dilakukan inspeksi terhadap 8 UPI. Berdasarkan hasil evaluasi Komite Audit, sebanyak 7 UPI dinyatakan memenuhi persyaratan dan 1 UPI belum memenuhi persyaratan.

Tindak lanjut yang akan dilaksanakan meliputi penyampaian daftar UPI teregistrasi beserta dokumen pendukung kepada Pemerintah Jepang melalui jalur diplomatik, penyelesaian inspeksi terhadap 4 UPI lainnya, penyampaian registrasi tahap lanjutan, serta pembukaan registrasi tahap kedua pada April 2026. Melalui langkah tersebut, diharapkan semakin banyak pelaku usaha perikanan nasional yang dapat memanfaatkan fasilitas perdagangan internasional dan meningkatkan ekspor produk perikanan Indonesia ke pasar Jepang.

4) Pelaksanaan Promosi Usaha dan Investasi KP

a. Pembahasan Persiapan *Investment Mission*

Ditjen PDSPKP telah melaksanakan rapat Pembahasan Persiapan *Investment Mission* 2026 secara daring pada tanggal 9 Januari 2026. Pertemuan yang dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Promosi Internasional dan Investasi ini dihadiri oleh Chairman KADIN ITH, US Chapter Washington DC, dengan tujuan utama untuk mendapatkan masukan strategis serta memetakan produk investasi yang siap ditawarkan (*ready to offer*). Dalam rapat tersebut, diidentifikasi beberapa potensi investasi utama, seperti pengolahan tuna di Biak, industri ikan di Tual, pengolahan rumput laut di Wakatobi, serta industri udang di Kebumen. Sebagai langkah strategis, KKP akan menyiapkan informasi komprehensif terkait peluang di sektor kelautan dan perikanan, serta aktivitas untuk mendukung promosi investasi sektor kelautan dan perikanan salah satunya berencana berpartisipasi dalam *Select USA Investment Summit* pada Mei 2026 guna menjaring investor internasional.

b. Persiapan *Investment Mission* 2026

Untuk mendukung *Persiapan Investment Mission* 2026 rapat lanjutan juga diadakan kembali pada tanggal 5 Februari 2026 Ketua Tim Kerja Penguatan Promosi Internasional dan Investasi bersama perwakilan internal KKP dan *Country Representative & Export Manager Swiss Import Promotion Programme* (SIPPO) menyelenggarakan rapat koordinasi secara luring untuk mematangkan persiapan teknis kegiatan *Buyer Mission* 2026. Pertemuan ini bertujuan untuk menyempurnakan dokumen TOR, materi promosi, serta pembagian tanggung jawab antarpihak guna memastikan efisiensi dan efektivitas promosi produk *seafood* dan *seaweed* di pasar global.

5) Penyusunan Profil Pasar Ekspor Hasil Kelautan Perikanan

Ditjen PDSPKP telah melaksanakan penyusunan satu dokumen Profil Pasar Ekspor Hasil Kelautan dan Perikanan untuk komoditas Cumi-Sotong-Gurita (CSG) sebagai upaya mendukung perumusan kebijakan dalam meningkatkan daya saing ekspor. Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan informasi yang komprehensif mengenai kondisi pasar global, kinerja ekspor Indonesia, posisi daya saing dibandingkan negara pesaing, serta peluang dan tantangan pada pasar utama dan potensial. Penyusunan profil dilaksanakan dengan menggunakan data terkini bersumber BPS dan *Trademap*, dengan cakupan analisis meliputi pasar global dan fokus pada negara tujuan utama, yaitu Tiongkok, kawasan ASEAN, Uni Eropa, Taiwan, dan Amerika Serikat.

Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa pada tahun 2024 nilai impor global komoditas CSG mencapai USD 11,28 miliar dengan volume 2,30 juta ton, menempatkan komoditas ini sebagai salah satu produk perikanan utama di perdagangan dunia dengan pangsa sebesar 6,1%. Indonesia menempati posisi sebagai eksportir keempat dunia dengan nilai ekspor sebesar USD 874,12 juta dan mencatat pertumbuhan sebesar 14,6%. Pada tahun 2025, nilai ekspor Indonesia meningkat menjadi USD 889,73 juta dengan tren pertumbuhan rata-rata sebesar 8,7% per tahun selama periode 2018–2025. Dari sisi pasar tujuan, ekspor Indonesia masih didominasi ke Tiongkok dan ASEAN, masing-masing dengan kontribusi sebesar 39,5% dan 36,6%, sementara pangsa ke Uni Eropa relatif lebih kecil. Struktur ekspor CSG Indonesia juga masih didominasi oleh produk mentah beku dengan proporsi mencapai 96,2%, yang menunjukkan bahwa nilai tambah produk masih terbatas.

Lebih lanjut, hasil analisis menunjukkan bahwa karakteristik masing-masing pasar berbeda. Pasar Tiongkok dan ASEAN cenderung menyerap produk bahan baku, sedangkan pasar Uni Eropa dan Amerika Serikat memiliki peluang lebih besar untuk pengembangan produk olahan dan bernilai tambah. Khususnya di pasar Amerika Serikat, proporsi produk non-mentah relatif lebih tinggi dibandingkan pasar lainnya, sehingga memberikan peluang strategis bagi diversifikasi produk ekspor Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan langkah strategis yang terarah untuk meningkatkan daya saing dan nilai ekspor CSG Indonesia. Upaya

yang dapat dilakukan antara lain mendorong diversifikasi pasar ke negara non-tradisional dan pengembangan produk bernilai tambah seperti *fillet*, *cooked*, dan siap saji, khususnya untuk pasar Amerika Serikat dan Uni Eropa, meningkatkan promosi ekspor melalui pameran internasional dan *business matching*; mendorong pemenuhan standar internasional melalui sertifikasi dan peningkatan kualitas produk; serta memperkuat sistem data dan informasi pasar sebagai dasar pengambilan kebijakan.



Gambar 10. Penyusunan profil pasar luar negeri Cumi, Sotong dan Gurita

6) Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pemasukan Hasil Perikanan Berbasis Mekanisme Neraca Komoditas

a. Penyusunan profil pelaku usaha impor melalui NK Perikanan

Penyusunan profil pelaku usaha impor dilaksanakan pada 11-12 Februari 2026. Tujuannya untuk menyusun tampilan profil, baik dalam format bahan tayang maupun digital berbasis website yang mengacu kepada data pelaku usaha yang mengusulkan permohonan impor komoditas perikanan melalui mekanisme Neraca komoditas. Profil pelaku usaha impor akan menjadi rujukan bagi pimpinan dalam memetakan kebutuhan pelaku usaha importasi komoditas perikanan. Sampai dengan Maret tahun 2026 telah diperoleh 204 pelaku usaha yang telah terdata profilnya. Sumber penyusunan berasal dari aliran data yang diinput oleh pelaku usaha melalui INSW ke sistem inhouse NK KKP, kinerja realisasi, dan dokumen-dokumen yang berasal dari kelengkapan pengajuan pelaku usaha yang dikirim melalui *email*.

- b. Verifikasi usulan perubahan rencana kebutuhan impor komoditas perikanan triwulan I tahun 2026

Verifikasi usulan perubahan rencana kebutuhan impor komoditas perikanan Triwulan I Tahun 2026 dilaksanakan pada 23 Februari-12 Maret 2026 terhadap 168 perusahaan dari 186 perusahaan yang diundang. Perusahaan diminta menyampaikan data dukung dan informasi usulan rencana kebutuhan yang terdiri atas (a) Pakta Integritas, (b) NIB dan Sertifikat Standar, (c) Status wajib pajak, (d) Laporan realisasi dan distribusi di aplikasi STELINA, (e) Bukti penguasaan gudang dan foto dokumentasi gudang, (f) Data karyawan, (g) Data produksi, pembelian dan penjualan ikan lokal, realisasi dan penjualan ikan impor, data ekspor, (h) Matriks perhitungan usulan perubahan kebutuhan impor 2026, (i) Bukti PO/forecast dan calon penerima ikan impor dan (j) Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) atau Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI).

Berdasarkan data dukung dan informasi dukung dimaksud, dilakukan konfirmasi/klarifikasi kepada perusahaan terkait dengan:

- a. Kesesuaian volume usulan, kapasitas gudang dan distribusi.
- b. Kesesuaian antara realisasi impor 2024-2025 dengan usulan 2026.
- c. Proporsi penyerapan ikan lokal dibandingkan ikan impor.
- d. Validitas bukti pemesanan dan end user.
- e. Konsistensi data pada matriks perhitungan dan usulan pada sistem.

7) Penyusunan Profil Industri Pengolahan Hasil Perikanan

Kegiatan ini merupakan jumlah data dan informasi industri pengolahan hasil perikanan berupa data *losses* dan utilitas yang dihasilkan dalam satu periode waktu. Kegiatan ini memiliki target sebanyak 6 dokumen (Profil Pemetaan UPI, VPO MB, VPO MK, Utilitas, Susut Hasil, dan Rendemen) yang akan dicapai pada triwulan IV. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung Penyusunan Profil Industri Pengolahan Hasil Perikanan, yaitu:

- a. Koordinasi Penghitungan Susut Hasil

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 4 Februari 2026 dilaksanakan secara *hybrid* di R.R. Pembinaan Mutu Lt. 12A GMB 3. dihadiri oleh Plt. Kapuskajis beserta tim susut hasil 2023 yaitu Dr. Singgih Wibowo (BRIN) dan Dr. Muhamad Darmawan (BPPSDMKP), perwakilan Direktorat Statistik Sumber

Daya Hayati dan Direktorat Metodologi Statistik dan Sains Data (Badan Pusat Statistik), Setditjen Perikanan Tangkap, Direktorat Pengolahan. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah untuk sinergitas dan sinkronisasi penghitungan susut hasil perikanan tahun 2026 dengan unit kerja atau K/L terkait, sehubungan dengan keterbatasan sumberdaya baik SDM maupun anggaran. Disepakati bahwa penghitungan tahun 2026 perlu difokuskan dengan tujuan yang spesifik dan ruang lingkup terbatas, mencakup komoditas, rantai pasok, dan lokasi tertentu. Hasil penghitungan tidak dimaksudkan sebagai angka nasional, tetapi sebagai dasar penyusunan rekomendasi kebijakan untuk menekan susut hasil perikanan.



Gambar 11. Koordinasi Penghitungan Susut Hasil

b. Pembahasan Rencana Pelaksanaan Pendataan VPO Unit Pengolahan Ikan (UPI) Tahun 2025 dan 2026

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2026 secara luring di R.R. Sekretariat Ditjen PDSPKP Lt. 14. Kegiatan dihadiri oleh perwakilan Pusat Data dan Informasi Sekjen KKP, Setditjen PDSPKP, Tim Kerja Diversifikasi dan Inovasi Produk Non Pangan, Tim Kerja Pemetaan dan Analisis Pengolahan dan PT. Bagus Harapan Tritungggal (pengembang portal data KKP). Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah untuk mengetahui perkembangan hasil validasi nasional data VPO UPI MK semester 1 Tahun 2025, rencana pelaksanaan validasi nasional data VPO UPI MK semester 2 Tahun 2025 dan rencana pelaksanaan VPO UPI Mikro dan Kecil (MK) dan Menengah dan Besar (MB) Tahun 2026. Kegiatan membahas perkembangan validasi nasional data VPO UPI MK semester 1 tahun 2025 serta rencana pelaksanaan validasi semester 2 tahun 2025 dan pendataan tahun 2026.



Gambar 12. Pembahasan Rencana Pelaksanaan Pendataan VPO Unit Pengolahan Ikan (UPI) Tahun 2025 dan 2026

c. Penetapan Populasi Unit Pengolahan Ikan (UPI) Skala Mikro dan Kecil Tahun 2025

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2026 dilaksanakan di R.R. Meeting 2 Lt. 15, GMB III, KKP. Kegiatan dihadiri oleh perwakilan Pusdatin, Direktorat Pemberdayaan Usaha, Tim Kerja Pembinaan Mutu dan Keamanan Produk, dan Tim Kerja Pembinaan Pengolahan Hasil. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah menyepakati bersama kriteria UPI MK serta menetapkan populasi UPI MK, yang akan menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan. Populasi UPI yang dipublikasi pada tahun berjalan merupakan data per 31 December tahun sebelumnya. Hasil kegiatan menyepakati kriteria dan penetapan populasi UPI mikro dan kecil (MK) sebagai dasar pelaksanaan pembinaan, dengan menggunakan data KUSUKA per 31 Desember 2025. Kriteria yang digunakan meliputi identitas pelaku usaha, lokasi, skala usaha, serta jenis kegiatan pengolahan. Berdasarkan hasil pembersihan data sesuai kriteria tersebut, ditetapkan populasi UPI MK tahun 2026 sebanyak 81.429 unit yang tersebar di 37 provinsi dan 488 kabupaten/kota. Data ini akan menjadi acuan resmi publikasi dan perencanaan kegiatan ke depan.



Gambar 13. Penetapan Populasi Unit Pengolahan Ikan (UPI) Skala Mikro dan Kecil Tahun 2025

8) Pembinaan Industri Pengolahan Produk KP (DITLAH)

Kegiatan ini dilaksanakan melalui berbagai bentuk intervensi, antara lain sosialisasi, bimbingan teknis (bimtek), serta pembinaan lapangan kepada pelaku industri. Output yang dihasilkan mencakup penyusunan rekomendasi perbaikan, penyediaan manual Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP), serta laporan hasil pembinaan sebagai dasar tindak lanjut peningkatan mutu dan produktivitas industri.

Pada Triwulan I Tahun 2026, realisasi kinerja tercatat sebanyak 58 industri, yang terdiri atas 28 industri dalam lingkup pembinaan mutu dan 30 industri dalam lingkup pembinaan produktivitas. Adapun rangkaian kegiatan pendukung yang telah terlaksana meliputi:

a. Pembinaan Penerapan Kelayakan Pengolahan dan Penerapan HACCP

Kegiatan dilaksanakan selama bulan Januari-Maret 2026 dilaksanakan secara daring melalui *Zoom Meeting*. Kegiatan diikuti oleh unsur Direktorat Pengolahan (Tim Pembina Mutu Pusat), Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi (Jawa Timur dan Jawa Barat), Dinas Kabupaten/Kota (Bondowoso, Bogor, Bekasi, Probolinggo), UPT terkait, dan pelaku usaha/UPI. Kegiatan juga melibatkan pembina mutu daerah baik secara langsung maupun daring. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah untuk melaksanakan pembinaan penerapan kelayakan pengolahan dalam persiapan sertifikasi SKP/HACCP pada UPI dan UMKM perikanan, mempercepat proses pengajuan dan perpanjangan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP), termasuk penyelesaian kendala perizinan (NIB, KBLI, Sertifikat Standar), meningkatkan kesiapan pelaku usaha dalam penerapan sistem mutu, SNI, dan HACCP guna mendukung daya saing dan ekspor, memperkuat koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah dalam pelaksanaan pembinaan mutu dan keamanan produk.

b. Pembinaan SKP dan HACCP untuk UMKM Naik Kelas

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2026, di R.R. Pembinaan Mutu Lt. 12A GMB III, KKP. Kegiatan diikuti oleh Tim Pembina Mutu Pusat, Tim Pendamping lingkup Direktorat Pengolahan, perwakilan Direktorat Pemberdayaan Usaha, serta pelaku usaha UMKM pengolahan hasil perikanan

(UMKM Naik Kelas dan UMKM menuju ekspor). Tujuan pelaksanaan kegiatan, yaitu:

- 1) pelaksanaan tindak lanjut pembinaan penerapan kelayakan pengolahan (GMP dan SSOP) serta sistem HACCP pada UMKM naik kelas.
- 2) Identifikasi tingkat kesiapan UMKM dalam pemenuhan persyaratan pengajuan SKP dan sertifikasi HACCP.
- 3) perkembangan hasil pembinaan HACCP pasca kunjungan lapangan serta merumuskan langkah tindak lanjut percepatan sertifikasi.
- 4) mendorong peningkatan mutu, keamanan produk, dan daya saing UMKM, khususnya dalam rangka kesiapan ekspor.

Sebanyak 11 UMKM telah dinilai siap untuk melanjutkan ke tahap penerapan HACCP, sementara UMKM lainnya masih dalam tahap pemenuhan aspek dasar dan legalitas. Meskipun masih terdapat kendala, terutama pada aspek KBLI dan keterbatasan pembina mutu di daerah, melalui pendampingan berkelanjutan dan koordinasi lintas instansi diharapkan seluruh UMKM dapat segera memperoleh sertifikasi.



Gambar 14. Pembinaan SKP dan HACCP untuk UMKM Naik Kelas

c. Bimbingan Teknis Pembinaan Mutu dan Usaha Pengolahan

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2026, dilaksanakan secara *hybrid* di Hotel Lido Lake Part Resort, Bogor. Kegiatan dibuka Plt. Dirjen PDSPKP dan dipimpin oleh Direktur Pengolahan. Dihadiri oleh Pembina Mutu Pusat sebanyak 55 orang dan 9 perwakilan Pembina Mutu Daerah dari Kab Bogor, Kab Depok, Kab. Sukabumi dan Kota. Bogor, dan peserta offline sebanyak 500 orang. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi pembina mutu di bidang pengolahan hasil kelautan dan perikanan, memperkuat peran pembina mutu

dalam penerapan standar mutu, keamanan pangan, dan persyaratan pasar dan mendukung penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan agar mampu memenuhi tuntutan pasar domestik dan internasional. Kebijakan pembinaan mutu tahun 2026 difokuskan pada peningkatan daya saing produk melalui penerapan CPIB/SKP dan PMMT/HACCP yang didukung oleh peran Pembina Mutu secara berjenjang. Hal ini diperkuat dengan penerapan SNI sebagai instrumen jaminan mutu dan keamanan pangan, serta dukungan pembinaan bagi UMK melalui skema SNI Bina UMK.



Gambar 15. Bimbingan Teknis Pembinaan Mutu dan Usaha Pengolahan

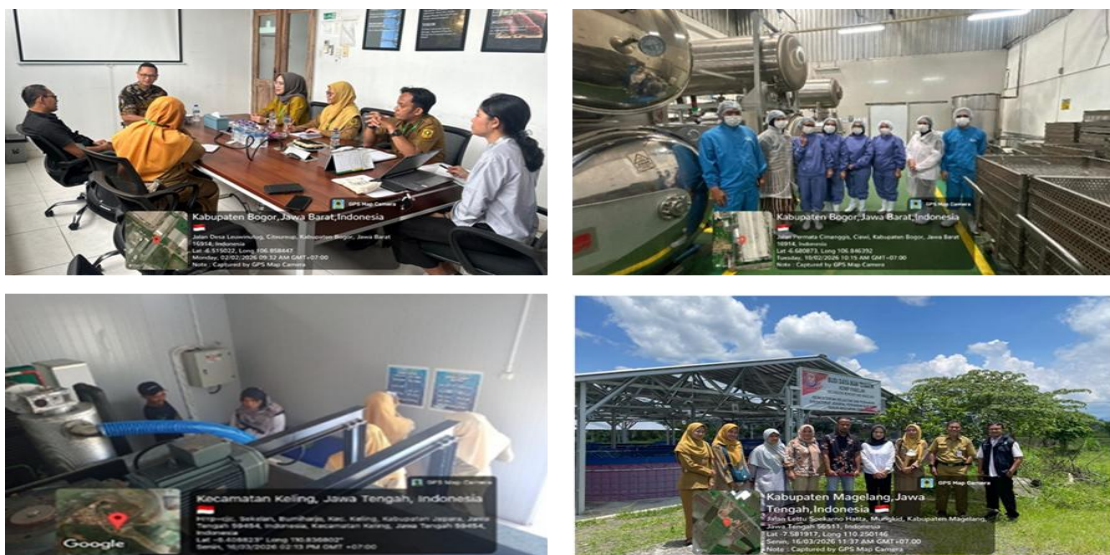
d. Pembahasan modul penanganan pasca panen dalam rangka operasional Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP)

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2026, dilaksanakan di R.R. Pembinaan Mutu Lt. 12A GMB III, KKP. Kegiatan dihadiri oleh perwakilan dari Direktorat Prasarana dan Sarana serta Tim Kerja lingkup Direktorat Pengolahan. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah membahas modul penanganan pasca panen yang akan digunakan sebagai instrument dalam operasionalisasi KNMP. Diperlukan langkah strategis untuk mendukung implementasi program melalui penguatan kelembagaan dan operasional. Hal ini mencakup pentingnya pendampingan operasional kepada KNMP agar kegiatan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.



f. Pembinaan Unit Penanganan dan Unit Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan Skala Menengah dan Besar yang Dibina

Kegiatan dilaksanakan selama bulan Februari - Maret 2026, dilaksanakan di beberapa lokasi (PT. Indogal Agro, Kabupaten Bogor; PT. Jakarana Tama, Kabupaten Bogor; KDMP Pabelan, Kabupaten Magelang ; dan KNMP Bumiharjo, Kabupaten Jepara). Kegiatan diikuti oleh perwakilan dari Direktorat Pengolahan, pengelola UPI, pemerintah daerah, dan pelaku usaha. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah untuk mengidentifikasi potensi, kendala, dan peluang pengembangan usaha demi meningkatkan nilai tambah dan keberlanjutan industri pengolahan hasil perikanan.



Gambar 18. Pembinaan Unit Penanganan dan Unit Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan Skala Menengah dan Besar yang Dibina

9) Fasilitasi Pelaku Usaha pada Perizinan Berusaha Sub Sektor Pengolahan dan Pemasaran

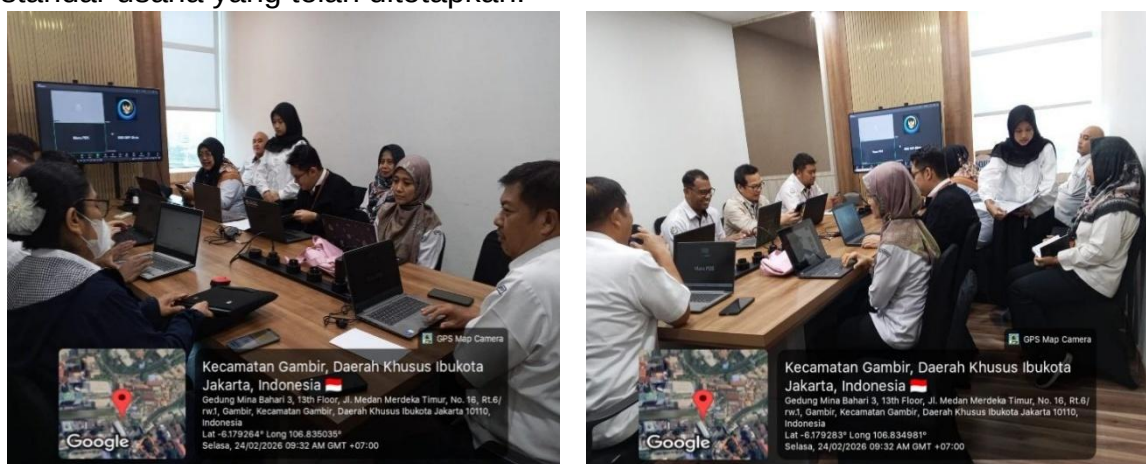
Kegiatan Fasilitasi Perizinan Berusaha Sub Sektor Pengolahan dan Pemasaran merupakan upaya terstruktur untuk membantu pelaku usaha memperoleh legalitas usaha melalui pendampingan pengurusan perizinan seperti NIB dan sertifikat standar, bimbingan penggunaan sistem OSS, serta koordinasi dengan instansi terkait guna mempercepat proses penerbitan izin. Kegiatan ini diawali dengan identifikasi pelaku usaha yang belum memiliki izin, dilanjutkan dengan pendampingan teknis hingga monitoring dan evaluasi penyelesaian perizinan. Melalui fasilitasi ini diharapkan meningkatnya jumlah pelaku usaha yang legal, terbukanya akses terhadap pembiayaan dan pasar, serta

meningkatnya daya saing produk pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan dalam ekosistem usaha yang lebih formal dan terintegrasi.

Realisasi fasilitasi perizinan berusaha kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan pada Triwulan I Tahun 2026 mencapai 4 badan usaha. Adapun capaian tersebut terlaksana dalam bentuk fasilitasi perizinan berusaha pada 2 (dua) pelaku usaha pengolahan yaitu PT. Mustika Mina Aurora dan PT Live Shell yang masih dalam tahapan perbaikan dokumen oleh pelaku usaha, dan 2 (dua) pelaku usaha pemasaran yaitu PT. Cendana Indo Pearls dan PT. Indo Mina Bahari yang telah terbit sertifikat standarnya.

Kegiatan verifikasi kelengkapan standar berusaha pengolahan dan pemasaran selama periode Triwulan I 2026, telah dilaksanakan 1 (satu) kali rapat verifikasi dan pembahasan dokumen persyaratan. Pertemuan ini bertujuan dalam rangka membahas kelengkapan komitmen, rencana usaha dan permohonan penerbitan standar usaha. Pertemuan dihadiri oleh tim verifikasi pada tanggal 24 Februari 2026 di ruang rapat Direktorat Pemberdayaan Usaha, serta melalui *video conference*.

Adapun Selama periode Triwulan I telah diterbitkan 2 Sertifikat Standar Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan kepada 2 pelaku usaha (PT. Indo Mina Bahari dan PT. Cendana Indo Pearls) yang bermohon yang sesuai dengan ketentuan Permen KP No. 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Kelautan dan Perikanan, dimana pelaku usaha tersebut harus memenuhi standar usaha yang telah ditetapkan.



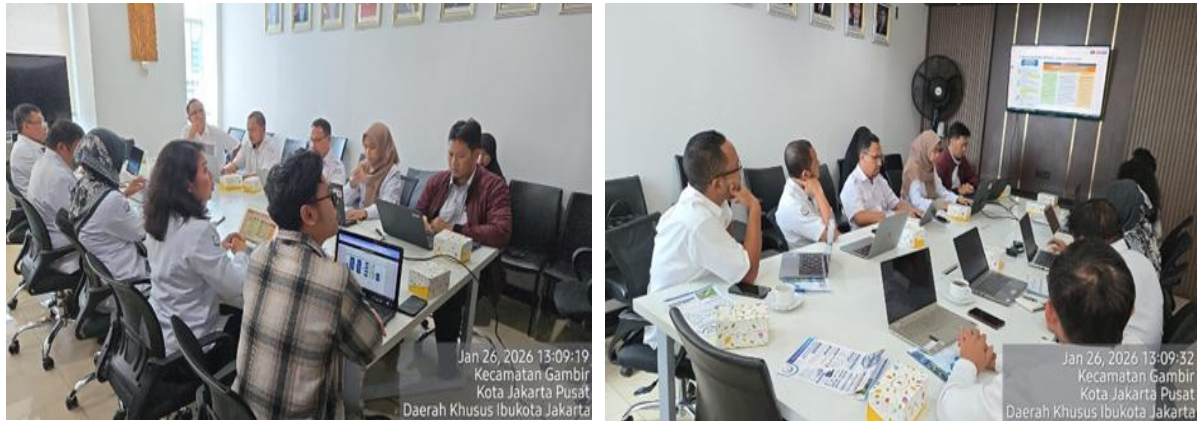
Gambar 19. Implementasi pelayanan perizinan berusaha sektor Kelautan dan Perikanan

10) Fasilitasi Pendampingan Pelaku Usaha pada Realisasi Investasi

Kegiatan fasilitasi pendampingan pelaku usaha pada Realisasi Investasi merupakan upaya pendampingan terintegrasi kepada pelaku usaha untuk memastikan rencana investasi dapat terealisasi secara efektif, tepat waktu, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Kegiatan ini mencakup identifikasi potensi dan kesiapan usaha, asistensi penyusunan rencana bisnis dan kebutuhan investasi, fasilitasi akses pembiayaan dan kemitraan, serta pendampingan pemenuhan aspek legalitas dan operasional. Selain itu, dilakukan koordinasi dengan lembaga keuangan, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan terkait untuk mengatasi hambatan yang dihadapi pelaku usaha, disertai monitoring dan evaluasi progres realisasi investasi. Melalui kegiatan ini diharapkan terjadi peningkatan realisasi investasi yang berdampak pada penguatan kapasitas usaha, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan nilai tambah dan daya saing sektor.

Adapun kegiatan persiapan dalam rangka pendampingan investasi sektor kelautan dan perikanan berupa rapat koordinasi dan penyiapan materi peluang investasi sektor kelautan dan perikanan yang dilaksanakan pada 26 Januari 2026 di Ruang Rapat Direktorat Pemberdayaan Usaha, Gedung Mina Bahari III, Lt. 12, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Rapat dipimpin oleh Direktur Pemberdayaan Usaha, dimana rapat ini dihadiri oleh Tenaga Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Pengembangan Bisnis dan Valuasi Ekonomi Bidang Kelautan (Bapak Rino Febrian), perwakilan dari Direktorat Akses dan Promosi serta pegawai lingkup Direktorat Pemberdayaan Usaha. Pertemuan tersebut terkonfirmasi akan dihadiri minimal lima perusahaan China yang bergerak di bidang tangkap, budidaya, pengolahan, dan finance. Bapak Rino Febrian selaku Tenaga Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Pengembangan Bisnis dan Valuasi Ekonomi Bidang Kelautan akan mewakili KKP untuk hadir dalam fórum tersebut.

Pada fórum tersebut KKP diminta untuk menjelaskan kebijakan dan program Pemerintah Indonesia terbaru yang berhubungan dengan sektor kelautan dan perikanan. Hal ini dinilai sangat penting bagi pengusaha China karena sebagian besar industri perikanan mereka memperoleh bahan baku ikan dari Indonesia. Misi delegasi Indonesia dalam fórum tersebut yaitu menawarkan peluang investasi sektor kelautan dan perikanan, terutama pada komoditas unggulan yaitu: rumput laut, tuna, udang, lobster, kepiting/rajungan, dan nila.



Gambar 20. Pendampingan Pelaku Usaha pada Realisasi Investasi

11) Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pemberdayaan Usaha dan Investasi

Kegiatan Rekomendasi Kebijakan Pemberdayaan Usaha dan Investasi merupakan proses analisis dan penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis data untuk mendukung penguatan pelaku usaha dan peningkatan investasi di sektor terkait. Kegiatan ini diawali dengan pemetaan potensi, profil usaha, kebutuhan pembiayaan, serta kendala yang dihadapi di lapangan, dilanjutkan dengan analisis gap antara kondisi eksisting dan target pengembangan. Direktorat Pemberdayaan Usaha kemudian merumuskan alternatif kebijakan dan strategi intervensi yang mencakup aspek pembiayaan, perizinan, kemitraan, dan penguatan kelembagaan, melalui koordinasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya. Hasil kegiatan berupa rekomendasi kebijakan yang aplikatif dan terukur, yang diharapkan dapat mendorong peningkatan akses usaha terhadap sumber daya, mempercepat realisasi investasi, serta meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha.

Adapun kegiatan yang telah dilakukan antara lain Pemetaan Usaha dan Investasi di KDKMP Pangkahwetan dan KDKMP Pangkahkulon, Kab. Gresik provinsi Jawa Timur dilaksanakan pada tanggal 9 - 11 Maret 2026. KDKMP Pangkahwetan dan Pangkahkulon merupakan koperasi desa yang dikembangkan untuk mendukung usaha sektor kelautan dan perikanan dengan komoditas unggulan masing-masing, yaitu ikan bandeng di Pangkahwetan dan rumput laut *Gracilaria sp.* di Pangkahkulon. Pemerintah Kabupaten Gresik melalui dinas terkait memberikan dukungan pengembangan melalui pendampingan teknis dan nonteknis, serta mendorong peran dan fungsi KDKMP disosialisasikan lebih lanjut

kepada masyarakat guna meningkatkan partisipasi masyarakat dan dapat terus berkembang hingga pasar ekspor.



Gambar 21. Pemetaan Usaha dan Investasi di KDKMP Pangkahwetan dan KDKMP Pangkahkulon

12) Penyusunan Profil Ketersediaan dan Kebutuhan Hasil KP

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka penyusunan profil ketersediaan dan kebutuhan hasil KP adalah sebagai berikut :

a. Pembahasan Ketersediaan dan Stok Ikan Kembung

Kegiatan dilaksanakan pada hari Rabu, 28 Januari 2026 pukul 13.00 WIB di Ruang Rapat Karaginan GMB 3 Lantai 14 KKP. Rapat dihadiri oleh perwakilan lintas unit, antara lain Dit. Pemasaran, Setditjen PDSPKP, Setditjen PT, Dit. Pengolahan, dan anggota tim kerja lingkup Direktorat Prasarana dan Sarana. Berdasarkan hasil pembahasan, diketahui bahwa produksi ikan kembung di Provinsi Sumatera Utara mengalami penurunan dari sekitar 41.500 ton pada tahun 2024 menjadi sekitar 26.000 ton pada tahun 2025 (masih dalam proses validasi). Secara nasional, penggunaan ikan kembung untuk bahan baku pemindangan relatif kecil, yaitu sekitar 3%, dengan konsentrasi terbesar di Provinsi Sumatera Utara. Di Kota Medan terdapat 16 unit usaha pemindangan, namun hingga saat ini belum terdapat laporan resmi dari dinas setempat terkait kesulitan bahan baku.

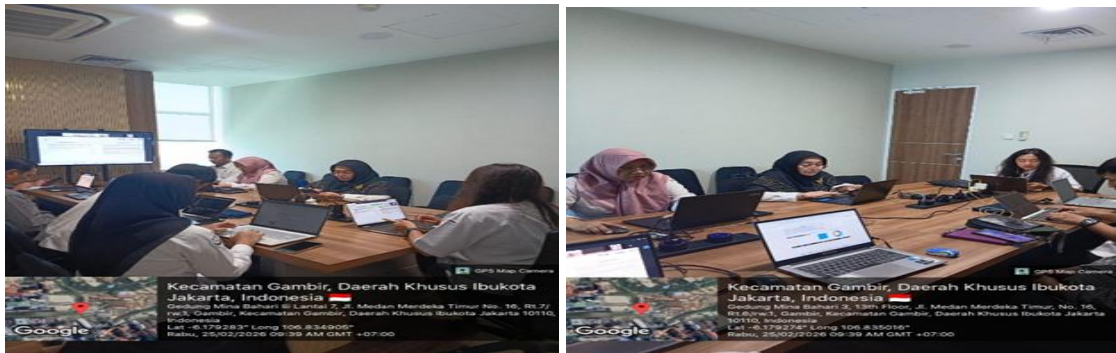
Dari sisi neraca nasional, ketersediaan ikan kembung tahun 2025 diproyeksikan sebesar 183.124 ton, sementara kebutuhan mencapai 824.231 ton, sehingga terdapat defisit yang cukup besar. Informasi dari importir di Provinsi Sumatera Utara menyebutkan bahwa kebutuhan bahan baku pemindangan mencapai 96 ribu ton per tahun, dengan kebutuhan khusus Kota Medan sebesar 16 ribu ton per tahun. Sementara itu, kuota impor pada tahun 2025 sebesar 3.400 ton dengan realisasi 3.075 ton, dan pada tahun 2026 menurun menjadi 1.600 ton. Rapat menyepakati bahwa ketersediaan bahan baku pemindangan tidak hanya ditentukan oleh produksi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor distribusi, serapan pasar, serta lokasi pendaratan ikan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif dalam menjaga ketersediaan bahan baku.

Sebagai tindak lanjut, akan dilakukan pendalaman dan verifikasi data produksi ikan kembung baik secara nasional maupun di Provinsi Sumatera Utara, termasuk rincian per jenis dan wilayah. Selain itu, akan dihimpun data kebutuhan pemindangan di Kota Medan dan Provinsi Sumatera Utara, serta dilakukan optimalisasi distribusi antar daerah sebagai langkah awal sebelum mempertimbangkan kebijakan impor. Koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara juga akan diperkuat untuk memastikan kondisi dan ketersediaan bahan baku ikan kembung di lapangan.

b. Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penerapan Aplikasi SIP-CS

Kegiatan dilaksanakan secara hybrid pada Rabu, 25 Februari 2026, bertempat di Ruang Rapat Ditjen PDSPKP. Rapat dihadiri secara luring oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sangihe, Ketua Koperasi Santo Pindang Jaya Bahari, dan Tim Pusdatin. Kegiatan ini juga diikuti secara daring oleh 128 perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota serta pengelola Cold Storage Bantuan Pemerintah (CS BP). Tujuannya untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi Aplikasi SIP-CS pada Cold Storage Bantuan Pemerintah, serta memantau ketersediaan stok ikan secara nasional menjelang dan selama bulan Ramadhan serta Idul Fitri sebagai bagian dari dukungan terhadap Tim Pengendali Inflasi Pusat.

Sebagai tindak lanjut, akan dilakukan monitoring berkala terhadap pengelola gudang beku dalam penginputan data pada Aplikasi SIP-CS. Selain itu, akan diberikan pendampingan teknis kepada pengelola yang belum terdaftar maupun yang belum rutin menggunakan aplikasi. Koordinasi dengan Pusdatin juga akan terus dilakukan dalam rangka pengembangan dan penyempurnaan fitur aplikasi SIP-CS.



Gambar 22. Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penerapan Aplikasi SIP-CS

c. Koordinasi Perkembangan Pemantauan Stok dan Harga Ikan di CS/ICS pada 9 kota besar

Kegiatan dilaksanakan pada hari Selasa, 3 Maret 2026 bertempat di Ruang Rapat Direktorat Prasarana dan Sarana. Rapat dihadiri oleh perwakilan Pusdatin, Sekretariat Jenderal KKP, Tim Data dan Layanan Publik DJPDSPKP, serta perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan dari beberapa provinsi.

Dashboard monitoring yang digunakan meliputi dashboard populasi CS/ICS, status pelaporan bulanan, serta stok dan harga per komoditas. Akses dashboard menggunakan email dinas resmi dan dibatasi per provinsi, serta dilengkapi fitur ekspor data. Dalam pelaksanaannya, beberapa daerah menyampaikan kendala seperti rendahnya tingkat pelaporan, keterbatasan admin, perbedaan PIC, kendala akses dashboard, hingga kekhawatiran terkait kerahasiaan data. Selain itu, terdapat usulan pelibatan UPT pelabuhan perikanan guna meningkatkan kelengkapan data.

Berdasarkan hasil diskusi, disepakati bahwa target pelaporan mencakup seluruh populasi CS/ICS, dengan frekuensi pelaporan selama Ramadan ditingkatkan menjadi setiap tiga hari atau minimal mingguan. Ditekankan pula pentingnya validasi anomali data secara segera, pembaruan database secara berkala, serta pelaksanaan bimbingan teknis bagi daerah yang mengalami kendala.

Sebagai tindak lanjut, dinas diminta melakukan konfirmasi terhadap data anomali dan menyampaikan perbaikan tanpa perlu input ulang, dengan tetap menggunakan tanggal sistem. Selain itu, dilakukan pembaruan database CS/ICS, penambahan jenis ikan dalam kuesioner, serta penguatan pengingat kepada pelaku usaha. Pelibatan UPT pelabuhan perikanan juga didorong untuk memperkuat cakupan data, disertai pelaksanaan bimbingan teknis dashboard dan penyusunan pedoman waktu pembaruan data.

13) Implementasi Sistem Telusur Logistik Ikan Nasional (STELINA) oleh Pelaku Usaha

Ditjen PDSPKP telah melaksanakan perluasan penerapan implementasi STELINA secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan transparansi, daya saing, serta akses pasar. Pada triwulan I tahun 2026, target ditetapkan sebesar 3,6 persen atau setara dengan peningkatan pada 6 badan usaha. Realisasi capaian pada periode tersebut mencapai 3,6 persen atau sebanyak 6 badan usaha telah menerapkan STELINA. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut :

a. Pembahasan Hasil Monitoring dan Evaluasi Operasionalisasi STELINA

Kegiatan dilaksanakan pada Senin, 5 Januari 2025 di Ruang Rapat VIP GMB 2 Lantai GF. Rapat dihadiri oleh Ketua Tim Kerja Data dan Pelayanan Publik Setditjen PDSPKP beserta tim, Tim Pusdatin, dan Direktorat Prasarana dan Sarana. Tujuannya untuk membahas hasil monitoring dan evaluasi operasionalisasi aplikasi STELINA serta rencana perbaikan dan pengembangan pada tahun 2026, guna meningkatkan implementasi oleh pelaku usaha dan mendukung pelaksanaan pengawasan oleh Ditjen PSDKP.

Berdasarkan hasil pembahasan, disampaikan bahwa keterbatasan anggaran akibat efisiensi berdampak pada terbatasnya pemeliharaan aplikasi STELINA pada TA 2026. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dari Tim Data dan Pelayanan Publik serta Pusdatin untuk perbaikan *bug* dan pengembangan fitur prioritas.

Sebagai tindak lanjut, akan disusun daftar perbaikan STELINA berdasarkan tingkat urgensi beserta timeline pelaksanaannya, dengan target penyelesaian prioritas pada akhir Januari 2026. Selain itu, akan disusun rencana kegiatan penyempurnaan dan implementasi STELINA, termasuk pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis secara berkala kepada pelaku usaha, serta persiapan menuju sertifikasi ISO 27000 Sistem Manajemen Keamanan Informasi (ISMS).



Gambar 23. Pembahasan Hasil Monitoring dan Evaluasi Operasionalisasi STELINA

b. Bimbingan Teknis Pengisian Aplikasi STELINA kepada UPI

Kegiatan dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting pada hari Rabu, 21 Januari 2026. Kegiatan dihadiri secara bergantian oleh PT Phillips Seafoods Indonesia Unit Makassar, CV Maju Bersama Karib, serta anggota tim lingkup Direktorat Prasarana dan Sarana. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas permohonan asistensi yang disampaikan oleh UPI melalui call center STELINA pada tanggal 15 Januari 2026. Asistensi diawali dengan pengenalan STELINA Versi 2, termasuk penyampaian bahwa sistem telah GDST capable sehingga memungkinkan integrasi dengan aplikasi lain seperti Trace Register tanpa perlu melakukan penginputan data ganda. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pelaporan oleh pelaku usaha.

Sebagai tindak lanjut, seluruh masukan dari pelaku usaha telah dicatat untuk penyempurnaan fitur STELINA, termasuk pengembangan fitur upload data, perbaikan tampilan volume produksi, fleksibilitas pemilihan produk, serta pencatatan multi sumber dalam satu transaksi. Selanjutnya, rencana integrasi dengan aplikasi pihak ketiga seperti *Trace Register* akan dibahas lebih lanjut bersama GDST pada workshop yang direncanakan pada Februari 2026.

14)Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Tata Kelola Rantai Pasok

Kegiatan ini merupakan penyusunan rekomendasi dalam rangka penataan rantai pasok hasil perikanan mulai dari pra produksi, produksi, distribusi, pengolahan, sampai dengan pemasaran. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Pembahasan Rencana Aksi Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Percepatan Implementasi Sistem Logistik Nasional (SLIN)

Kegiatan dilaksanakan pada Januari - Februari 2026 dan dihadiri oleh Ketua Tim Kerja Data dan Layanan Publik Setditjen PDSPKP, perwakilan Tim Kerja Hukum Setditjen PDSPKP, serta tim kerja lingkup Direktorat Prasarana dan Sarana. Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun rencana aksi percepatan implementasi Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN), khususnya pada muatan pengembangan dan kolaborasi informasi logistik. Rencana aksi yang disusun difokuskan pada kegiatan yang memerlukan dukungan lintas kementerian/lembaga, dengan kebutuhan data antara lain meliputi lalu lintas ikan antar pulau, ekspor, impor, kepabeanaan, karantina, dan kepelabuhanan. Sebagai tindak lanjut, akan dilakukan penajaman target rencana aksi agar lebih terukur serta pengumpulan masukan tertulis dari unit kerja lingkup DJPDSPKP guna menyempurnakan rencana aksi dalam Perpres.



Gambar 24. Pembahasan Renaksi Penyusunan Rancangan Perpres tentang Rencana Aksi Percepatan Implementasi SLIN

- b. Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Kewajiban Pelayanan Publik Penugasan Operator Sistem Logistik Ikan Nasional dan Distribusi Ikan Dalam Negeri

Kegiatan dilaksanakan pada Januari - Februari 2026 dihadiri oleh Prof. Kuncoro Harto Widodo beserta tim dari Pustral UGM, perwakilan Tim Kerja Hukum Setditjen PDSPKP, serta tim kerja lingkup Direktorat Prasarana dan Sarana. Kegiatan ini bertujuan untuk membahas rencana kajian lanjutan, khususnya terkait penghitungan subsidi sebagai bahan penyempurnaan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Kewajiban Pelayanan Publik Penugasan Operator Sistem Logistik Ikan Nasional dan Distribusi Ikan Dalam Negeri. Draft RPerpres telah disusun dengan ruang lingkup pengadaan ikan dan/atau pengangkutan ikan, di mana dalam kondisi tertentu penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik dilakukan melalui penugasan kepada BUMN sebagai operator logistik ikan. Kondisi tertentu tersebut meliputi kelimpahan produksi dengan keterbatasan kapasitas penyimpanan, kelangkaan ketersediaan ikan, keterbatasan daya angkut dan moda transportasi, serta kondisi bencana alam, yang selanjutnya perlu dirumuskan secara kuantitatif. Lebih lanjut, Sebagai tindak lanjut, akan disusun rincian kebutuhan data termasuk identifikasi kesenjangan (*gap analysis*) dari data yang telah tersedia pada kajian sebelumnya serta penentuan kebutuhan data tambahan guna mendukung penyusunan kajian secara komprehensif.

15)Pembinaan Pelaku Usaha dalam rangka Penguatan Sistem Logistik

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pelaku usaha perikanan dalam mengelola sistem logistik yang efisien, terintegrasi, dan berkelanjutan, guna menjamin kelancaran distribusi produk perikanan dari hulu ke hilir. Pembinaan difokuskan pada pembinaan pelaku usaha dalam penerepan Cara Distribusi Ikan yang Baik (CDIB).

Dalam rangka penguatan Sistem Logistik, telah dilakukan pembinaan pelaku usaha sebanyak 50 UMKM yang bergerak di bidang distribusi, pengolahan, perdagangan, hingga komoditas ikan hias dan hasil perikanan beku. Adapun kegiatan yang telah dilakukan sebagai berikut :

- a. Sosialisasi dan Pembinaan Cara Distribusi Ikan Yang Baik (CDIB) dan Bimbingan Teknis Penyusunan Panduan Cara Distribusi Ikan Yang Baik (CDIB) Kegiatan dilaksanakan pada Januari sd Februari 2026 secara daring melalui *Zoom Meeting*. Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai perwakilan pelaku usaha. Tujuan kegiatan adalah untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha terkait

penerapan dan penyusunan panduan Cara Distribusi Ikan yang Baik (CDIB). Materi yang disampaikan meliputi sosialisasi penerapan CDIB dan panduan penggunaan Sistem Penilaian CDIB (SINADIN), serta penyusunan panduan CDIB oleh Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

Sebagai tindak lanjut, akan dilakukan pendampingan kepada pelaku usaha dalam penerapan CDIB serta penyusunan dan penyempurnaan dokumen panduan CDIB sebagai persyaratan dalam pengajuan penilaian.

b. Penilaian Penerapan Cara Distribusi Ikan yang Baik (CDIB)

Kegiatan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sistem Distribusi Ikan. Pada periode Januari - Februari 2026 telah dilakukan penilaian Cara Distribusi Ikan yang Baik (CDIB) terhadap 6 pelaku usaha yang sudah terdaftar.

c. *Coaching Clinic* Pembinaan Cara Distribusi Ikan Yang Baik (CDIB)

Kegiatan *coaching clinic* pembinaan dan penilaian Cara Distribusi Ikan yang Baik (CDIB) diselenggarakan oleh Direktorat Prasarana dan Sarana pada Jumat, 6 Februari 2026 secara hybrid. Kegiatan ini diikuti oleh 38 orang anggota tim teknis dengan tujuan menyamakan pemahaman terkait ruang lingkup CDIB serta tugas dan tanggung jawab tim, sekaligus meningkatkan kapasitas teknis dalam pelaksanaan pembinaan dan penilaian CDIB. Materi yang disampaikan meliputi sosialisasi pembinaan CDIB, teknis penyusunan panduan CDIB, serta teknis penilaian CDIB.

Pelaksanaan kegiatan akan difokuskan pada pendampingan pemenuhan standar CDIB secara bertahap sesuai dengan skala usaha, guna mendukung peningkatan mutu dan keamanan distribusi hasil kelautan dan perikanan.



Gambar 25. Coaching Clinic Pembinaan Cara Distribusi Ikan Yang Baik (CDIB)

d. Koordinasi Pengembangan Layanan Sistem Penilaian Cara Distribusi Ikan Yang Baik (SINADIN)

Kegiatan koordinasi penyempurnaan Sistem Penilaian Distribusi Ikan (SINADIN) dilaksanakan pada Jumat, 13 Februari 2026 di Ruang Rapat Karagenan, Gedung Mina Bahari III lantai 14. Rapat dihadiri oleh perwakilan Pusat Data dan Informasi Sekretariat Jenderal KKP, Sekretariat BPPMHKP, Pusat Mutu Pascapanen BPPMHKP, serta unit kerja terkait di lingkup Ditjen PDSPKP. Tujuannya untuk membahas penguatan sistem SINADIN, termasuk peluang interkoneksi antar sistem serta penyempurnaan proses bisnis penilaian CDIB sebagai dasar penerbitan SPDI. Proses penilaian CDIB sendiri dimulai dari permohonan pelaku usaha, dilanjutkan penilaian oleh tim, hingga menghasilkan dokumen hasil penilaian sebagai dasar penerbitan SPDI, dengan capaian sementara sebanyak 6 hasil penilaian yang telah diterbitkan. Sebagai tindak lanjut, akan dilakukan koordinasi teknis lanjutan antara Ditjen PDSPKP, BPPMHKP, dan Pusdatin untuk mempercepat integrasi SINADIN dengan SIAP Mutu. Upaya ini mencakup penyusunan mekanisme pertukaran data, penyamaan persepsi hasil penilaian dan inspeksi, serta validasi data KBLI dan NIB guna mendukung implementasi sistem yang lebih efektif dan terintegrasi.

e. Fasilitasi Pemanfaatan Layanan Kereta Api Logistik UMKM Hasil Perikanan

Kegiatan koordinasi pemanfaatan layanan distribusi produk kelautan dan perikanan melalui Kereta Api Logistik (Kalog) dilaksanakan pada Kamis, 26 Februari 2026 secara daring melalui *Zoom Meeting*. Rapat dihadiri oleh perwakilan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor serta pelaku usaha UMKM di wilayah Kabupaten Bogor. Kegiatan ini bertujuan untuk

memperkenalkan layanan Kalog, mengidentifikasi kebutuhan dan kendala distribusi, serta menjaring minat pelaku usaha dalam memanfaatkan layanan tersebut.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM di Kabupaten Bogor memproduksi produk olahan basah dan beku yang memerlukan penanganan rantai dingin. Selama ini, pelaku usaha masih mengandalkan jasa ekspedisi umum dan transportasi konvensional, dengan biaya yang relatif tinggi dan risiko penurunan mutu produk. Layanan Kalog dinilai berpotensi menjadi alternatif karena menyediakan pengiriman dengan kemasan *styrofoam* dan *dry ice* dengan ketahanan hingga 2×24 jam, layanan *pick-up* dan *door-to-door*, serta biaya yang lebih efisien untuk pengiriman jarak jauh dan volume besar, khususnya di wilayah Jawa.

Sebagai tindak lanjut, akan dilakukan koordinasi lebih lanjut dengan pihak Kalog untuk menyusun skema kerja sama yang lebih efisien, termasuk opsi konsolidasi muatan antar pelaku UMKM guna menekan biaya logistik. Selain itu, akan dilakukan identifikasi pelaku usaha yang berminat memanfaatkan layanan Kalog untuk selanjutnya diusulkan mengikuti proses kurasi dan pendampingan, sehingga dapat meningkatkan efisiensi distribusi dan daya saing produk kelautan dan perikanan.

3. Realisasi anggaran

Ditjen PDSPKP telah mengalokasikan anggaran dalam rangka pencapaian indikator kinerja Nilai Ekspor Produk Perikanan Lainnya sebesar Rp7.382.955.000,- dengan anggaran terblokir sebesar Rp375.441.000,- sampai dengan periode Triwulan I tahun 2026 telah direalisasikan sebesar Rp993.321.684,- atau setara dengan 14,17%,- dari pagu efektif.

C. IKU 3. Nilai Pemasaran Produk Perikanan Dalam Negeri

Nilai pemasaran produk perikanan dalam negeri merupakan total nilai yang dihasilkan dari serapan produk perikanan dalam rumah tangga nasional. Penghitungan nilai pemasaran produk perikanan dalam negeri menggunakan basis data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik yang diperoleh pada akhir tahun berjalan, sehingga capaian yang dihasilkan di akhir periode Triwulan IV.

Tabel 5. Ikhtisar Pencapaian Nilai Pemasaran Produk Perikanan Dalam Negeri

Indikator Kinerja	Target			Realisasi			% Realisasi Terhadap Target TW I 2026	% Realisasi s.d TW I Terhadap Target 2026	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi TW I 2025
	TW I 2026	TW I 2025	Tahun 2026	TW I 2026	TW I 2025	S.d TW I 2026			
Nilai Pemasaran Produk Perikanan Dalam Negeri (Rp Triliun)	-	-	320,8	-	-	-	-	-	-

Sumber Data: BPS, Diolah Ditjen PDSPKP

1. Analisa Capaian Indikator Kinerja Nilai Pemasaran Produk Perikanan dalam Negeri

Indikator Kinerja Nilai pemasaran produk perikanan dalam negeri merupakan indikator yang bersifat tahunan, sehingga pencapaian indikator akan diukur pada Triwulan IV tahun 2026.

2. Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja

Ditjen PDSPKP telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini antara lain :

1) Pelaksanaan Kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan)

Kampanye Gemarikan merupakan program strategis nasional dalam rangka pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) yang diselenggarakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan dengan cakupan wilayah yang lebih luas serta jangkauan sasaran yang lebih beragam. Program ini merupakan wujud komitmen pemerintah untuk mendorong peningkatan konsumsi ikan sebagai sumber protein hewani yang berkualitas,

aman, bergizi, dan berkelanjutan, sekaligus sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas gizi dan kesehatan masyarakat Indonesia.

Pelaksanaan Perluasan Safari Gemarikan atau kampanye Gemarikan dilakukan melalui sinergi dan kolaborasi lintas sektor, khususnya dengan Komisi IV DPR RI, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, serta pemangku kepentingan terkait lainnya, baik dari unsur pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat. Kolaborasi ini bertujuan untuk memperluas jangkauan pelaksanaan Gemarikan hingga ke daerah-daerah, termasuk wilayah dengan tingkat konsumsi ikan yang masih relatif rendah, sehingga pesan dan manfaat Gemarikan dapat diterima secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Kegiatan Perluasan Safari Gemarikan dilaksanakan dalam berbagai bentuk promosi dan edukasi, antara lain sosialisasi langsung kepada masyarakat, kampanye konsumsi ikan, kegiatan edukatif bagi pelajar dan keluarga, serta penyampaian informasi mengenai manfaat gizi ikan bagi pertumbuhan, kecerdasan, dan kesehatan. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk memperkenalkan beragam produk olahan hasil perikanan yang inovatif dan bernilai tambah, sehingga dapat meningkatkan minat dan preferensi masyarakat terhadap konsumsi ikan. Melalui pendekatan yang partisipatif dan berbasis kearifan lokal, Perluasan Safari Gemarikan diharapkan mampu mendorong perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat secara berkelanjutan, dari yang semula kurang mengonsumsi ikan menjadi lebih sadar akan pentingnya ikan sebagai bagian dari pola konsumsi sehari-hari. Pada akhirnya, program ini diharapkan dapat berkontribusi secara nyata terhadap peningkatan konsumsi ikan nasional, perbaikan status gizi masyarakat, penguatan ketahanan pangan, serta mendukung terwujudnya sumber daya manusia Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.

Pada kegiatan ini juga dilaksanakan distribusi Paket Gemarikan sebagai upaya untuk memperkenalkan beragam produk olahan ikan yang aman, bergizi, dan dapat dikonsumsi oleh seluruh lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Selain sebagai sarana edukasi konsumsi ikan, kegiatan ini juga dimanfaatkan untuk menampilkan dan mempromosikan produk olahan hasil perikanan yang dihasilkan oleh pelaku UMKM lokal. Melalui pengenalan produk UMKM tersebut, diharapkan dapat meningkatkan minat beli masyarakat, memperluas akses pasar, serta mendorong peningkatan pendapatan dan

keberlanjutan usaha UMKM setempat. pada Triwulan I Tahun 2026 Kampanye Gemarikan sebanyak 25 promosi atau 100% dari target renaksi yang dilaksanakan di beberapa daerah Kab/Kota, antara lain: Cilacap, Bogor, Jember, Boyolali, Jombang, Sidoarjo, Jepara, Kulon Progo, Pidie Jaya, Bantul, Bandung, Ds. Cot Bada Kab. Aceh Utara, Ds. Bantayan Kab. Aceh Utara, Air Tawar Barat Kota Padang, Ds. Banjarsari Ciamis, Ds. Langkap Sari Ciamis, Kulak Karang Selatan Kota Padang, Ds. Ule Glee Kab. Aceh Utara, Ds. Rawang Itek Kab. Aceh Utara, Ds. Geluntung Kab. Tabanan, Ds. Cau Belayu Kab. Tabanan, Ds. Apuan Kab. Tabanan, Ds. Angseri Kab. Tabanan.



Gambar 26. Pelaksanaan Kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan

2) Pelaksanaan Promosi Produk Kelautan dan Perikanan di Dalam Negeri

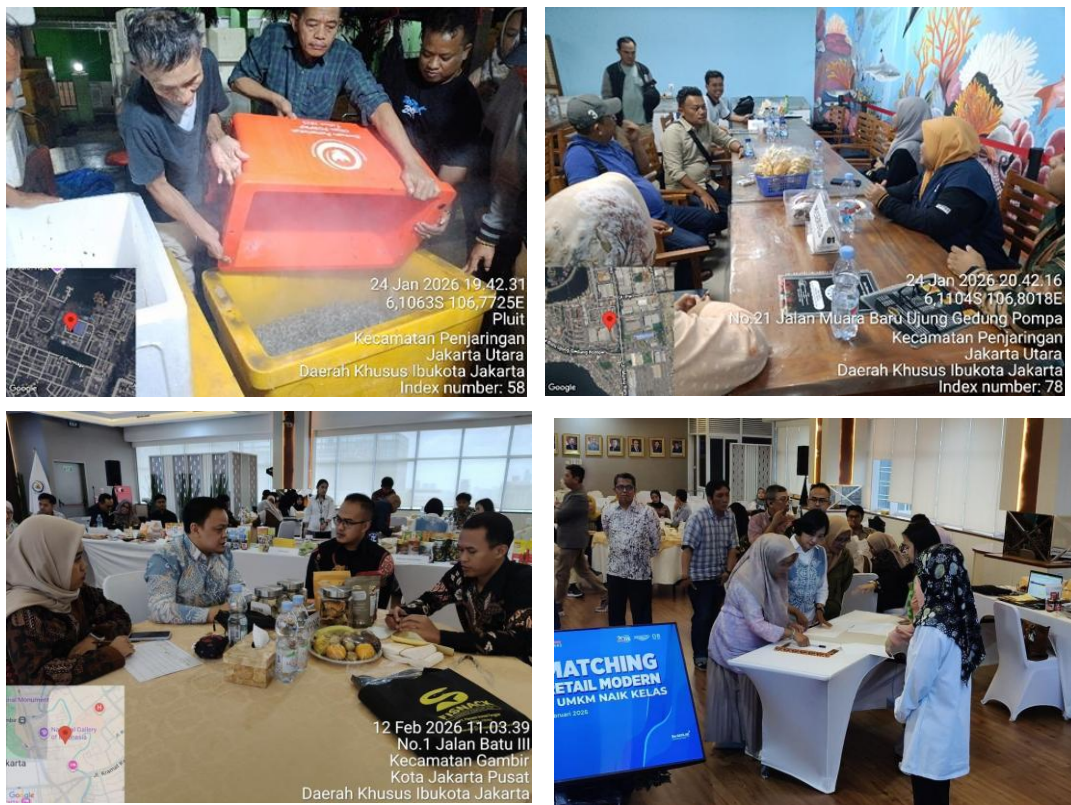
Pelaksanaan promosi produk kelautan dan perikanan di dalam negeri merupakan langkah strategis yang dilakukan secara berkelanjutan untuk memperkuat eksistensi serta meningkatkan daya saing produk di pasar domestik. Kegiatan promosi ini dilaksanakan melalui berbagai media dan kegiatan, antara lain penyelenggaraan bazar dan pameran produk, partisipasi aktif dalam kegiatan nasional seperti Hari Ikan Nasional, serta optimalisasi pemanfaatan media sosial dan platform digital guna memperluas jangkauan promosi kepada masyarakat. Melalui berbagai pendekatan tersebut, diharapkan promosi mampu meningkatkan minat konsumen, memperluas akses pasar bagi pelaku usaha, serta mendorong peningkatan konsumsi produk kelautan dan perikanan dalam negeri.

3) Pelaksanaan Kesepakatan Pemasaran Produk Perikanan di Dalam Negeri

Pelaksanaan kesepakatan pemasaran produk perikanan di dalam negeri bertujuan untuk memperkuat akses pasar dan memperluas jaringan distribusi produk perikanan nasional melalui kemitraan antara pelaku usaha, distributor, dan

pembeli potensial. Kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan penyerapan produk perikanan di pasar domestik, serta menjamin kontinuitas pasokan dari produsen ke konsumen. Selain itu, kesepakatan pemasaran ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepastian usaha bagi pelaku usaha perikanan, mendorong efisiensi rantai pasok, serta memperkuat daya saing produk perikanan nasional di pasar dalam negeri. Pada Triwulan I 2026 telah terdapat 4 kesepakatan pemasaran yaitu :

- a. Kesepakatan Pemasaran Produk Perikanan antara Koperasi Produsen Fajar Kaur Nusantara dengan pelaku usaha di Pasar Ikan Muara Angke
- b. Kesepakatan pemasaran antara UMKM SeGi dengan PT Cakra Berkah Rejekindo (Tuna Suwir), PT Marco Sekawan (Abon Tuna & Siomay Tenggiri), dan PT Sumber Alfaria Trijaya/Alfamart (Abon Tuna) melalui Letter of Intent (LoI);
- c. Kesepakatan pemasaran antara UMKM CV Bening Jati Anugerah dengan PT Cakra Berkah Rejekindo (Fish Katsu) melalui Letter of Intent (LoI);
- d. Kesepakatan pemasaran antara UMKM Enza Frozen Food dengan PT Cakra Berkah Rejekindo (Lele Bumbu/Fillet) melalui Letter of Intent (LoI);



Gambar 27. Kesepakatan Pemasaran Produk Perikanan di Dalam Negeri

4) Pembinaan Pelaku Usaha Pemasaran

Pembinaan Pelaku Usaha Pemasaran bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme pelaku usaha dalam melakukan pemasaran produk perikanan secara efektif, efisien, dan berdaya saing. Kegiatan pembinaan dilaksanakan melalui berbagai bentuk, antara lain pertemuan dan pelatihan yang melibatkan peserta dari pengelola pasar serta para pedagang. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara on the spot, baik di lokasi pasar maupun di kantor dinas yang membidangi sektor kelautan dan perikanan di tingkat kabupaten/kota, sehingga materi pembinaan dapat disesuaikan dengan kondisi lapangan. Pada Triwulan I Tahun 2026, telah dilaksanakan pembinaan terhadap 550 lembaga dari target tahunan sebanyak 3.500 lembaga. Selain itu, telah dilaksanakan kegiatan bimbingan teknis bekerja sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dengan materi peningkatan akses pemasaran melalui pemanfaatan ekosistem digital serta sosialisasi preferensi konsumen modern.

Kegiatan pembinaan telah dilaksanakan di beberapa wilayah, antara lain Kabupaten Bireuen, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Tulang Bawang, Kota Padang, Kota Palu, dan Kabupaten Lampung Tengah. Pelaksanaan kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam memperluas akses pasar, menyesuaikan strategi pemasaran dengan perkembangan tren konsumen, serta memperkuat posisi produk perikanan di pasar domestik.



Gambar 28. Pembinaan Pelaku Usaha Pemasaran

5) Penyusunan Profil Pasar Dalam Negeri Hasil Kelautan dan Perikanan

Penyusunan Profil Pasar Dalam Negeri Hasil Kelautan dan Perikanan bertujuan untuk menyediakan data dan informasi pasar yang komprehensif sebagai dasar dalam perumusan strategi pemasaran produk kelautan dan

perikanan di dalam negeri. Salah satu bentuk keluaran adalah preferensi konsumen terhadap produk kelautan dan perikanan. Pada Triwulan I telah tersedia satu dokumen analisis preferensi konsumen berdasarkan wilayah provinsi dilakukan dengan menggunakan data Konsumsi Ikan Masyarakat (KIM) tahun 2025. Adapun jenis ikan yang dianalisis sebanyak 47 jenis ikan sesuai dengan kuesioner Susenas BPS. Secara nasional, preferensi tertinggi terdapat pada jenis ikan segar dengan tingkat konsumsi sebesar 17,59 kg/kapita/tahun atau 67,43% dari total konsumsi ikan masyarakat (26,08 kg/kapita/tahun), dilanjutkan oleh ikan awetan sebesar 4,21 kg/kapita/tahun (16,13%), ikan matang 2,05 kg/kapita/tahun (7,87%), non-ikan segar 1,68 kg/kapita/tahun (6,45%), serta non-ikan awetan sebesar 0,55 kg/kapita/tahun (2,13%).

Selain itu, telah dilakukan sosialisasi penghitungan konsumsi ikan masyarakat kepada dinas provinsi dan kabupaten/kota yang membidangi kelautan dan perikanan pada tanggal 27 Januari 2026 secara hybrid. Pada sosialisasi tersebut dilakukan asistensi penghitungan KIM serta penyampaian data KIM, preferensi konsumen, serta nilai pemasaran produk perikanan dalam negeri berdasarkan Susenas BPS tahun 2025. Selain itu, sosialisasi juga dilakukan di Provinsi Jawa Tengah, Sumatera Utara dan Kepulauan Bangka Belitung pada bulan Februari-Maret 2026 secara luring dan daring.



Gambar 29. Penyusunan Profil Pasar Dalam Negeri Hasil Kelautan dan Perikanan

6) Perumusan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Hasil KP

Tahapan perumusan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) meliputi penyusunan RSNI 1, RSNI 2, RSNI 3, hingga penyampaian RSNI kepada Badan Standardisasi Nasional (BSN) untuk proses penetapan lebih lanjut. Proses perumusan ini dilaksanakan oleh Komite Teknis yang dikelola oleh Direktorat Pengolahan, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan

Perikanan. Pada tahun 2026, kegiatan perumusan RSNI ditargetkan menghasilkan 4 (empat) dokumen standar. Namun demikian, capaian target tersebut diproyeksikan baru dapat terealisasi pada Triwulan IV, mengingat tahapan perumusan yang memerlukan proses pembahasan teknis, konsensus para pemangku kepentingan, serta harmonisasi dengan standar yang berlaku.

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka perumusan Rancangan Standar Nasional Indonesia antara lain meliputi:

a. Rapat Koordinasi dengan Anggota Komite Teknis 65-05 dan 65-08

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal dilaksanakan 20 Januari 2026, dilaksanakan secara *hybrid* di R.R. Pembinaan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Lt. 12A GMB 3 KKP. Kegiatan Sekretaris Komite Teknis\diikuti oleh Perwakilan dari Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan dan Penilaian Kesesuaian Badan Standardisasi Nasional, anggota Komite Teknis 65-05: Produk Perikanan, anggota Komite Teknis 65-08: Produk Perikanan Nonpangan. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah mempersiapkan penyusunan RSNI yang masuk di dalam Program Nasional Perumusan Standar (PNPS) Tahun 2026 dimaksud, pada rapat koordinasi ini akan dilakukan diskusi dan pembahasan mengenai mekanisme perumusan Standar Nasional Indonesia serta peran, tugas, dan tanggung jawab dari Komite Teknis. Materi yang disampaikan terkait “Peraturan BSN Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengembangan Standar Nasional Indonesia.

b. Rapat Penguatan Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Produk Perikanan

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2026, dilaksanakan secara luring di R.R. Pembinaan Mutu Lt. 12A GMB 3. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah untuk menindaklanjuti rencana kerja sama antara Ditjen PDSPKP dengan BSN dalam rangka penguatan penerapan SNI produk perikanan terutama bagi UPI skala MK sebagai realisasi dari MoU antara KKP dan BSN. Pada tahun 2026, BSN akan memfasilitasi sertifikasi SNI bagi UMKM melalui skema pembiayaan CSR dan Bank Indonesia (BI), untuk itu diperlukan kolaborasi dengan KKP.



Gambar 30. Rapat Penguatan Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Produk Perikanan

c. Rapat Penyusunan Konsep (RSNI1) Ekstrak Cair Spirulina

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2026, dilaksanakan secara *hybrid* di Ruang Rapat Lt. 12A GMB 3. Kegiatan dibuka oleh Direktur Pengolahan dan dipimpin oleh Katimja Pengembangan dan Penerapan Standar Produk dan dihadiri oleh perwakilan dari BSN, anggota Komite Teknis 65-08, Konseptor, Editor Produk Perikanan Non Pangan, dan perwakilan Tim Kerja Lingkup Direktorat Pengolahan. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah untuk membahas substansi dan editorial RSNI Ekstrak Cair Spirulina. Pada rapat RSNI1 65-08 ini dilakukan pembahasan konsep yang telah disusun oleh konseptor berupa RSNI0 berdasarkan data dukung dan literatur.



Gambar 31. Rapat Penyusunan Konsep (RSNI1) Ekstrak Cair Spirulina

d. Rapat Persiapan RSNI Filet Patin

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 4 Maret 2026, dilaksanakan secara daring melalui zoom meeting. Kegiatan dibuka oleh Direktur Pengolahan dan dihadiri oleh perwakilan dari BBP3KP, asosiasi APCI, Tim konseptor dan perwakilan Tim Kerja Lingkup Direktorat Pengolahan. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah untuk menghasilkan konsep RSNI0 filet patin yang dapat implementasikan dan diterima oleh produsen dan konsumen.

7) Pembinaan Pelaku Usaha Diversifikasi Produk Bernilai Tambah

Merupakan upaya strategis yang difokuskan pada peningkatan kapasitas Unit Pengolahan Ikan (UPI), baik skala mikro dan kecil (MK) maupun skala menengah dan besar (MB). Kegiatan ini diarahkan untuk memperkuat pemenuhan kelayakan dasar pengolahan sekaligus mendorong inovasi dan pengembangan produk, baik pangan maupun non pangan, sehingga mampu menghasilkan produk dengan nilai tambah yang lebih tinggi dan berdaya saing di pasar. Melalui kegiatan identifikasi produk pangan dan non pangan bernilai tambah, pemerintah berupaya memperluas ragam dan diversifikasi produk hasil kelautan dan perikanan. Hingga triwulan I tahun 2026, capaian kegiatan ini telah menjangkau 165 UMKM atau setara 5,46% dari target tahunan sebesar 3.020 UMKM. Capaian tersebut menunjukkan bahwa proses pembinaan telah berjalan secara bertahap, meskipun masih diperlukan akselerasi pelaksanaan pada periode selanjutnya agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal.

Kegiatan pembinaan pelaku usaha diversifikasi produk bernilai tambah juga dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan Pengarusutamaan Gender (PUG) untuk memastikan kesetaraan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat bagi perempuan dan laki-laki melalui workshop, bimtek, dan sosialisasi. Pelaksanaan kegiatan dilakukan di berbagai wilayah Indonesia, meliputi Mataram, Pelabuhan Ratu, Ambon, Singkawang, Aceh Utara, Tulang Bawang, Lampung Utara, Lampung Tengah, Sigi, Cianjur, dan Kota Padang. Kegiatan mencakup workshop, bimbingan teknis, serta sosialisasi diversifikasi dan peningkatan nilai tambah produk perikanan. Peserta berasal dari pelaku UMKM perikanan, Poklahsar, pembudidaya ikan, dan masyarakat umum, dengan materi seperti teknik pengolahan, pengemasan, keamanan pangan, dan strategi pemasaran, serta dilengkapi praktik langsung.

Jumlah peserta perempuan (314 orang) sedikit lebih tinggi dibanding laki-laki (287 orang), menunjukkan peran dominan perempuan dalam sektor pengolahan hasil perikanan, khususnya skala UMKM. Program ini efektif dalam membuka akses dan mendorong partisipasi perempuan, meskipun terdapat variasi antar wilayah. Secara analitis, perempuan memiliki akses dan partisipasi tinggi serta aktif dalam kegiatan. Namun, kesetaraan belum sepenuhnya tercapai pada aspek kontrol dan akses terhadap sumber daya strategis seperti permodalan, teknologi, dan pasar, di mana laki-laki masih cukup dominan.

Kegiatan ini memberikan manfaat signifikan bagi perempuan, antara lain peningkatan keterampilan, peluang usaha, pendapatan, serta penguatan peran ekonomi dalam rumah tangga. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain :

b. Workshop Diversifikasi dan Nilai Tambah Produk Pangan

Kegiatan pembinaan pelaku usaha diversifikasi produk bernilai tambah hasil kelautan dan perikanan dilaksanakan pada tanggal 28 Januari, 9 Februari, 19 Februari, dan 12 Maret 2026, baik secara daring melalui *Zoom Meeting* dan *live streaming* YouTube maupun secara hybrid. Secara keseluruhan, kegiatan ini diikuti oleh total 2.420 peserta *workshop* melalui *Zoom Meeting* dan 372 peserta melalui *live streaming* YouTube. Peserta berasal dari UMKM, masyarakat umum, akademisi, serta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota di 38 provinsi di Indonesia. Kegiatan ini menunjukkan tingginya antusiasme dan partisipasi berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung pengembangan diversifikasi produk bernilai tambah hasil kelautan dan perikanan.

c. Pengenalan Produk UMKM Kelautan dan Perikanan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)

Kegiatan pembinaan pelaku usaha diversifikasi produk bernilai tambah hasil kelautan dan perikanan dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2026 secara *hybrid*, bertempat di Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar, Bogor. Kegiatan ini dibuka oleh Direktur Pengolahan dan diikuti oleh total 280 peserta, yang terdiri atas 240 peserta daring dan 40 peserta luring. Peserta yang hadir meliputi perwakilan perbankan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota, Kepala Wilayah Provinsi, perwakilan KPPG, perwakilan SPPG, yayasan, serta pelaku usaha/UMKM produk perikanan.

Materi yang disampaikan meliputi Diversifikasi dan Inovasi Produk Pangan oleh Direktorat Pengolahan, Akses Pasar Dalam Negeri oleh Direktorat Aksi, serta Akses Permodalan oleh Direktorat Pemberdayaan Usaha. Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan paparan produk olahan ikan oleh UMKM yang hadir secara luring sebagai bagian dari upaya promosi dan penajakan peluang kerja sama dengan SPPG.



Gambar 32. Pengenalan Produk UMKM Kelautan dan Perikanan kepada SPPG

d. Pembinaan Diversifikasi Produk Bernilai Tambah Non Pangan

Kegiatan dilaksanakan selama bulan Januari - Maret 2026, dilaksanakan di beberapa daerah di Jawa Timur, Jawa Barat, dan Kota Padang dan diikuti perwakilan pelaku usaha. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah pembinaan, identifikasi, dan pemetaan pelaku usaha produk non pangan pada Unit Penanganan dan Pengolahan Hasil Perikanan Non Pangan. Kegiatan ini mendukung upaya Direktorat Pengolahan dalam pengembangan Unit Pengolahan Produk Non Pangan (UPPN), meningkatkan nilai tambah hasil kelautan dan perikanan, serta memanfaatkan hasil samping perikanan dalam kerangka ekonomi sirkular.



Gambar 33. Pembinaan Diversifikasi Produk Bernilai Tambah Non Pangan melalui Kunjungan Lapangan yang dilaksanakan selama periode Triwulan I

8) Pembinaan Pelaku Usaha Pengolahan Produk KP Skala Mikro dan Kecil

Kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan (KP) Skala Mikro dan Kecil merupakan salah satu bentuk upaya pembinaan yang difokuskan pada pemenuhan kelayakan dasar pengolahan bagi Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala mikro dan kecil. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman pelaku usaha terhadap pentingnya penerapan jaminan mutu dan keamanan pangan, baik untuk melindungi konsumen maupun meningkatkan daya saing produk perikanan di pasar.

Pada triwulan I tahun 2026, kegiatan ini telah mencapai 50 UMKM atau sebesar 13,33% dari target tahunan yang ditetapkan sebanyak 375 UMKM. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan telah berjalan sesuai dengan rencana, meskipun masih diperlukan upaya percepatan pada triwulan berikutnya guna memastikan target tahunan dapat tercapai secara optimal. Berdasarkan hasil pembinaan terhadap 50 UMKM, sebaran pelaku usaha per provinsi menunjukkan bahwa pembinaan masih didominasi oleh wilayah Pulau Jawa, khususnya Jawa Barat (17 UMKM) dan DKI Jakarta (13 UMKM). Selanjutnya diikuti oleh Jawa Tengah (5 UMKM) dan Jawa Timur (3 UMKM). Sementara itu, provinsi lainnya memiliki jumlah yang lebih terbatas, yaitu Banten (2 UMKM), Kepulauan Bangka Belitung (2 UMKM), Sulawesi Tengah (2 UMKM), dan Sulawesi Tenggara (2 UMKM). Adapun provinsi dengan masing-masing 1 UMKM meliputi Lampung, Bengkulu, Nusa Tenggara Barat, dan DI Yogyakarta. Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan telah menjangkau berbagai wilayah di Indonesia, meskipun masih perlu ditingkatkan pemerataannya di luar Pulau Jawa.

Secara umum, sebagian besar UMKM masih berada pada tahap pengolahan sederhana hingga menengah dengan dominasi produk tradisional. Meskipun demikian, telah mulai terlihat adanya inovasi produk yang mengarah pada peningkatan nilai tambah. Beberapa kegiatan telah dilaksanakan antara lain :

a. Klinik Mutu

Pelaksanaan kegiatan Klinik Mutu pada Triwulan I Tahun 2026 dilakukan melalui pendekatan terpadu yang mencakup partisipasi dalam Bazar Perikanan KKP, edukasi melalui media sosial, serta perencanaan pengembangan platform digital. Kegiatan bazar dilaksanakan pada tanggal 8–9 Januari, 5–6 Februari, dan 5–6 Maret 2026 di Gedung Mina Bahari III, dengan memberikan layanan konsultasi dan edukasi langsung kepada pelaku usaha dan masyarakat terkait penerapan mutu dan keamanan pangan hasil perikanan. Metode pembinaan meliputi konsultasi, edukasi interaktif, pemantauan mutu produk, serta sosialisasi penerapan GMP, SSOP, HACCP, dan pemenuhan legalitas usaha.

Kegiatan ini memperoleh respons positif dan dinilai efektif dalam meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya mutu dan keamanan pangan. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala, antara lain penanganan produk yang belum optimal, penerapan sanitasi dan

higiene yang belum sesuai standar, kemasan dan label yang belum memenuhi ketentuan, serta keterbatasan kepemilikan legalitas usaha dan fasilitas pendukung seperti freezer. Sebagai tindak lanjut, dilakukan edukasi dan pendampingan untuk perbaikan penanganan produk, sanitasi, legalitas usaha, serta peningkatan kualitas kemasan, disertai dengan monitoring berkelanjutan dan peningkatan standar kurasi peserta bazar.

Selain kegiatan langsung, Klinik Mutu juga melaksanakan edukasi melalui media sosial dengan total 19 konten publikasi selama Triwulan I 2026 yang mencakup materi mutu, keamanan pangan, standar SNI, dan HACCP. Upaya ini efektif dalam meningkatkan literasi masyarakat, meskipun masih menghadapi kendala dalam jangkauan dan konsistensi konten. Untuk memperkuat layanan, direncanakan pengembangan *Website* Klinik Mutu sebagai platform informasi dan edukasi digital, namun masih memerlukan percepatan dalam integrasi sistem, koordinasi lintas unit kerja, serta peningkatan kualitas konten dan sinergi antara pembinaan daring dan luring.

b. Pembinaan UPI skala mikro dan kecil

Pembinaan UPI skala mikro dan kecil pada Triwulan I Tahun 2026 dilaksanakan melalui metode kunjungan langsung dan pembinaan jarak jauh sebagai upaya memberikan pendampingan yang komprehensif dan berkelanjutan. Kegiatan kunjungan langsung meliputi sosialisasi kewajiban sertifikasi halal tahun 2026, pembinaan penerapan HACCP, pembinaan mutu pada berbagai UPI, serta pendampingan pada kawasan KDMP dan KNMP di beberapa daerah seperti Bogor, Probolinggo, dan Blora. Sementara itu, pembinaan jarak jauh dilakukan melalui pendampingan hasil uji laboratorium, pembahasan tata letak ruang produksi, pendampingan pengurusan izin edar, serta konsultasi teknis terkait penerapan mutu dan pemenuhan legalitas usaha.

Hasil pembinaan menunjukkan bahwa sebagian besar UPI memiliki potensi pengembangan usaha yang cukup baik. Namun demikian, masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi, antara lain keterbatasan sarana dan prasarana produksi, belum optimalnya penerapan higiene dan sanitasi, serta rendahnya pemahaman terhadap standar mutu seperti GMP dan SSOP. Permasalahan lainnya mencakup keterbatasan akses terhadap pembiayaan dan pasar, serta belum terpenuhinya legalitas usaha secara lengkap.



Gambar 34. Pembinaan UPI skala mikro dan kecil

c. Workshop Pendampingan Proses Produk Halal (P3H)

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2026, dilaksanakan secara hybrid di R.R. Lt. 12A GMB 3. Kegiatan dihadiri oleh Direktur Pengolahan, perwakilan SMESCO Indonesia, Direktorat Pengolahan yang telah memiliki Nomor Register Pendamping Proses Produk Halal (P3H), serta perwakilan dari unit kerja lainnya di lingkungan KKP. Jumlah peserta yang hadir dalam kegiatan ini sebanyak 72 orang. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah untuk pendampingan pemahaman mendalam tentang Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan regulasi terbaru dan untuk menyelaraskan persepsi mengenai kriteria produk yang wajib bersertifikat halal dan tata cara pengajuannya. Kegiatan ini memberikan pemahaman dan pengalaman praktis kepada peserta dalam melakukan pendampingan penerbitan NIB dan sertifikat halal.



Gambar 35. Workshop Pendampingan Proses Produk Halal (P3H)

9) Penyediaan Sarana Pemasaran Kelautan dan Perikanan

Penyediaan sarana pemasaran kelautan dan perikanan berupa *coolbox* bertujuan untuk menjaga mutu dan kesegaran produk hasil kelautan dan perikanan selama proses distribusi dan pemasaran. Dengan adanya *coolbox*, produk dapat disimpan pada suhu yang sesuai sehingga mampu

mempertahankan kualitas, memperpanjang umur simpan, serta mengurangi risiko kerusakan atau penurunan mutu. Selain itu, penyediaan *coolbox* bertujuan untuk mendukung penerapan rantai dingin (*cold chain*) pada tingkat pelaku usaha, khususnya skala mikro dan kecil, sehingga produk yang dipasarkan tetap aman, higienis, dan memenuhi standar keamanan pangan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen serta memperluas jangkauan pemasaran. Periode Triwulan I telah disalurkan 100 unit *coolbox* kepada penerima bantuan. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain :

a. Penyaluran Bantuan *Cool Box* di Papua

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 25–29 Januari 2026 oleh SERUNI Bidang IV yang dipimpin oleh Kementerian ESDM, didampingi oleh DWP KKP serta kementerian terkait lainnya melalui rangkaian kegiatan KMP di Kabupaten Merauke dan Kota Jayapura, Provinsi Papua. Salah satu fokus kegiatan adalah penyaluran bantuan sektor kelautan dan perikanan kepada nelayan sebagai bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat pesisir.

Penyaluran bantuan dengan variasi jenis dan jumlah tersebut mencerminkan pendekatan yang komprehensif, tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga memperhatikan aspek keselamatan dan kualitas hasil perikanan. Seluruh proses penyaluran dilakukan melalui koordinasi antara SERUNI, KKP, pemerintah daerah, dan dinas teknis setempat guna memastikan bantuan tepat sasaran dan dimanfaatkan secara optimal. Melalui dukungan sarana penangkapan dan penyimpanan hasil perikanan tersebut, diharapkan nelayan di Jayapura dan Merauke dapat meningkatkan hasil tangkapan, menjaga mutu ikan, serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan. Kegiatan ini sekaligus mencerminkan komitmen Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mendorong pembangunan perikanan tangkap yang inklusif, aman, dan berkelanjutan di wilayah timur Indonesia.



Gambar 36. Penyaluran Bantuan Cool Box di Papua

10) Penyediaan Sarana Penanganan dan Pengolahan Hasil KP

Penyediaan sarana penanganan dan pengolahan hasil kelautan dan perikanan berupa peralatan pengolahan dan *chest freezer* bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas proses produksi pada Unit Pengolahan Ikan (UPI), khususnya skala mikro dan kecil. Peralatan pengolahan mendukung efisiensi dan konsistensi proses produksi, sehingga menghasilkan produk yang lebih higienis, seragam, dan sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan. Selain itu, penyediaan chest freezer bertujuan untuk menjaga mutu dan keamanan produk melalui penerapan rantai dingin (*cold chain*), baik pada tahap penyimpanan bahan baku maupun produk jadi. Dengan suhu penyimpanan yang terkontrol, risiko kerusakan, pembusukan, dan kontaminasi dapat diminimalkan, sehingga umur simpan produk menjadi lebih panjang dan kualitas tetap terjaga. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain :

a. Pembahasan dan Penyusunan Modeling Unit Pengolahan Ikan (UPI) Mendukung Budidaya Tematik dan UPI Pindang Modern

Kegiatan pembahasan dan penyusunan modeling Unit Pengolahan Ikan (UPI) dilaksanakan melalui serangkaian rapat dan kunjungan lapangan pada tanggal 22–23 Januari, 28 Januari, 3 Februari, dan 10 Februari 2026. Kegiatan dilakukan secara luring dan hybrid dengan melibatkan Direktorat Prasarana dan Sarana, Direktorat Pengolahan, Direktorat Perikanan Budidaya, BPPMHKP, serta unit kerja terkait lainnya. Fokus utama kegiatan ini adalah penyusunan spesifikasi teknis dan model bisnis UPI dalam mendukung budidaya tematik serta pengembangan UPI Pindang Modern sebagai bagian dari hilirisasi produk perikanan.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa modeling UPI budidaya tematik dirancang sebagai prototipe unit usaha berbasis Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang terintegrasi dengan sistem budidaya (bioflok dan mina padi) serta mendukung pasokan bahan baku untuk dapur SPPG. Hasil analisa usaha menunjukkan bahwa model ini layak dikembangkan dengan indikator kelayakan ekonomi yang baik (NPV positif, IRR >30%, dan payback period sekitar 3 tahun). Selain itu, model bisnis dirancang berbasis klaster wilayah untuk menjamin kontinuitas bahan baku, serta wajib memenuhi Standar Kelayakan Pengolahan (SKP) dan didukung oleh tenaga kerja yang kompeten.

Sementara itu, modeling UPI Pindang Modern dirancang sebagai unit pengolahan berbasis teknologi tepat guna dengan prinsip sanitasi dan higiene pangan yang baik. Model ini terdiri atas beberapa tipe (skala kecil hingga besar) dengan kapasitas 600 kg hingga 4 ton per hari, yang diarahkan untuk meningkatkan efisiensi usaha, menjaga mutu produk, serta adaptif terhadap pelaku usaha eksisting.

Sebagai tindak lanjut, akan dilakukan penyempurnaan desain dan spesifikasi teknis modeling UPI, penyusunan model bisnis dan analisa kelayakan usaha, serta identifikasi lokasi calon penerima bantuan dengan mempertimbangkan kesiapan lahan, bahan baku, dan kelembagaan. Selain itu, akan dilakukan penguatan aspek implementasi melalui pelatihan SDM, koordinasi lintas unit kerja, serta studi banding ke unit usaha yang telah berjalan, guna memastikan keberlanjutan dan efektivitas pelaksanaan program pada Tahun Anggaran 2026.



Gambar 37. Pembahasan dan Penyusunan Modeling Unit Pengolahan Ikan (UPI) Mendukung Budidaya Tematik dan UPI Pindang Modern

11) Penyediaan Sarana Distribusi Logistik Produk KP

Penyediaan sarana distribusi logistik produk kelautan dan perikanan bertujuan untuk memastikan kelancaran penyaluran produk dari sentra produksi ke pasar secara tepat waktu, efisien, dan terjaga mutunya. Dengan dukungan sarana logistik yang memadai, proses distribusi dapat dilakukan dengan lebih efektif sehingga mengurangi risiko keterlambatan dan kerusakan produk.

Selain itu, sarana distribusi logistik bertujuan untuk menjaga kualitas dan keamanan produk, khususnya melalui penerapan sistem rantai dingin (*cold chain*). Hal ini penting untuk produk perikanan yang bersifat mudah rusak, sehingga kualitas, kesegaran, dan nilai jual produk tetap terjaga hingga sampai ke konsumen. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain :

a. Pembahasan Pengalihan Bantuan Pemerintah di Lingkungan Ditjen PDSPKP dalam Rangka Monitoring Pemanfaatan Bantuan

Kegiatan pembahasan pengalihan bantuan pemerintah di lingkungan Ditjen PDSPKP dilaksanakan pada tanggal 15 dan 20 Januari 2026, dihadiri oleh perwakilan Inspektorat Jenderal, Sekretariat Ditjen PDSPKP, dan tim kerja lingkup Direktorat Prasarana dan Sarana. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola penyaluran, pemanfaatan, serta mekanisme pengalihan bantuan pemerintah, khususnya sarana gudang beku portabel (GBP) sebagai bagian dari sistem rantai dingin. Dalam pembahasan disampaikan bahwa penerima bantuan memiliki kewajiban untuk memanfaatkan dan memelihara sarana, membentuk unit pengelola, serta melaporkan pemanfaatan bantuan, dengan larangan terhadap penyalahgunaan, pemindahtanganan, atau perubahan spesifikasi tanpa persetujuan. Pengalihan bantuan dapat dilakukan apabila penerima tidak mampu memenuhi kewajiban, baik atas inisiatif penerima maupun berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.

Sebagai tindak lanjut, diperlukan kelengkapan administrasi seperti proposal calon penerima baru, berita acara penarikan bantuan dari penerima lama, serta penetapan dan serah terima kepada penerima baru. Langkah ini diharapkan dapat memastikan proses pengalihan bantuan berjalan sesuai ketentuan, meningkatkan akuntabilitas, serta menjamin pemanfaatan bantuan pemerintah secara optimal, tepat sasaran, dan berkelanjutan.



Gambar 38. Pembahasan Pengalihan Bantuan Pemerintah di Lingkungan Ditjen PDSPKP dalam Rangka Monitoring Pemanfaatan Bantuan

12) Penyediaan Sarana Sistem Rantai Dingin Hasil Mendukung Program Prioritas Presiden

Pada kegiatan Pengadaan Sarana Rantai Dingin dalam rangka mendukung Program Prioritas Presiden, hingga Triwulan I Tahun Anggaran berjalan belum terdapat realisasi pelaksanaan kegiatan. Hal ini disebabkan karena alokasi anggaran untuk kegiatan dimaksud belum tersedia pada periode tersebut, sehingga seluruh tahapan pelaksanaan, baik persiapan, pengadaan, maupun distribusi sarana, belum dapat dilaksanakan.

13) Penilaian Kesesuaian Terhadap Produk Kelautan dan Perikanan

Penilaian kesesuaian terhadap produk kelautan dan perikanan bertujuan untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan telah memenuhi standar mutu, keamanan pangan, serta persyaratan teknis yang berlaku, baik untuk pasar domestik maupun ekspor. Kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, memperkuat daya saing produk, serta mendukung pemenuhan regulasi dan standar yang ditetapkan.

Capaian penilaian kesesuaian pada Triwulan I Tahun 2026 dilaksanakan melalui layanan penilaian kesesuaian produk kelautan dan perikanan, layanan lembaga pemeriksa halal, serta layanan laboratorium kalibrasi. Hingga Triwulan I, capaian kegiatan ini mencapai 24 produk atau sebesar 24% dari target tahunan sebanyak 100 produk, dengan rincian 9 produk dari layanan penilaian kesesuaian produk kelautan dan perikanan dan 15 produk dari layanan lembaga pemeriksa halal. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain :

a. Layanan Penilaian Kesesuaian Produk Kelautan dan Perikanan

Pelaksanaan layanan penilaian kesesuaian produk kelautan dan perikanan pada Triwulan I Tahun 2026 mencakup tahapan kaji ulang permohonan, evaluasi awal, surveilan, serta tinjauan hasil sertifikasi. Kegiatan kaji ulang permohonan dilaksanakan pada Januari–Maret 2026 terhadap sejumlah pelaku usaha untuk berbagai produk olahan ikan sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, evaluasi awal dilakukan untuk menilai kesesuaian produk terhadap standar SNI. Pada tahap surveilan, dilakukan verifikasi lapangan guna memastikan konsistensi penerapan standar pada unit usaha, serta persiapan surveilan untuk kegiatan lanjutan termasuk di luar negeri. Tahap akhir berupa tinjauan hasil sertifikasi menghasilkan rekomendasi penerbitan

Sertifikat Kesesuaian dan/atau SPPT SNI, yang didukung dengan koordinasi lintas unit kerja dalam rangka penjaminan mutu produk secara berkelanjutan.



Gambar 39. Layanan Penilaian Kesesuaian Produk Kelautan dan Perikanan

b. Layanan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)

Pelaksanaan layanan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) pada Triwulan I Tahun 2026 difokuskan pada penguatan kelembagaan, sosialisasi dan pendampingan, serta pelaksanaan proses sertifikasi halal. Penguatan kelembagaan dilakukan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman, rapat koordinasi terkait kewajiban sertifikasi halal, serta sosialisasi SOP layanan LPH guna meningkatkan kesiapan internal dan sinergi dengan pemangku kepentingan. Selain itu, dilakukan kegiatan sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku usaha dan penyuluh perikanan, termasuk pemanfaatan sistem SIHALAL untuk mempercepat proses pengajuan sertifikasi. Pada tahap implementasi, dilaksanakan audit visitasi kepada pelaku usaha serta sidang fatwa untuk penetapan kehalalan produk sebagai bagian dari proses sertifikasi halal. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha serta mempercepat sertifikasi halal produk kelautan dan perikanan.

c. Layanan Laboratorium Kalibrasi

Pelaksanaan layanan laboratorium kalibrasi pada Triwulan I Tahun 2026 meliputi kegiatan operasional teknis, penguatan kompetensi SDM dan sistem manajemen, serta persiapan akreditasi laboratorium. Kegiatan operasional dilakukan melalui verifikasi dan kalibrasi berbagai peralatan laboratorium guna memastikan akurasi dan keandalan alat ukur. Penguatan kapasitas dilakukan melalui pelatihan teknis, integrasi dokumen, serta sosialisasi sistem manajemen laboratorium berbasis SNI ISO/IEC 17025:2017. Selain itu, dilakukan persiapan akreditasi melalui uji banding dengan laboratorium

eksternal serta audit internal, yang menghasilkan sejumlah temuan sebagai dasar perbaikan. Secara keseluruhan, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan laboratorium kalibrasi serta memastikan kesiapan dalam memenuhi standar akreditasi yang berlaku

14) Pengujian Produk Kelautan dan Perikanan (BBP3KP)

Laboratorium BBP3KP telah melaksanakan berbagai kegiatan pengujian nutrisi dan keamanan produk perikanan serta pemeliharaan sistem manajemen mutu laboratorium sesuai SNI ISO/IEC 17025 secara konsisten. Kegiatan pengujian meliputi uji kimia, fisika, sensori, cemaran logam, dan cemaran mikrobiologi terhadap 70 sampel produk kelautan dan perikanan dengan total 163 data uji. Produk yang diuji terdiri dari klien laboratorium yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sebagian besar produk, yaitu 62 produk, memenuhi persyaratan mutu sesuai standar, sementara 8 produk tidak memenuhi persyaratan sesuai standar yang ditetapkan. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain :

a. Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu dan Persyaratan Teknis Laboratorium sesuai SNI ISO/IEC 17025

Penguatan sistem manajemen mutu dan integrasi laboratorium dilakukan melalui rapat perencanaan kegiatan tahun 2026, kaji ulang dokumen integrasi laboratorium pengujian dan kalibrasi, serta pelaksanaan Temu Teknis BBP3KP Tahun 2026 untuk penyelarasan program kerja dan penguatan sistem manajemen mutu. Peningkatan kompetensi personel dan pengembangan layanan pengujian dilaksanakan melalui pelatihan pengoperasian GC–MS, keikutsertaan pada presentasi set uji halal berbasis PCR, serta pembentukan dan evaluasi asesor sensori produk keripik ikan dan ikan beku. Persiapan penambahan ruang lingkup akreditasi laboratorium dilakukan melalui koordinasi uji profisiensi matriks garam, penyusunan laporan verifikasi metode dan ketidakpastian pengukuran, koordinasi pelatihan pengujian logam berat pada garam, serta pengisian formulir KAN sebagai evaluasi kesiapan penambahan ruang lingkup akreditasi.



Gambar 40. Pelatihan pengoperasian alat GCMS sesuai metode pengujian etanol pada makanan

b. Pembuatan Bahan Acuan dalam rangka Jaminan Mutu Hasil Pengujian Laboratorium

Laboratorium BBP3KP melaksanakan kegiatan pembuatan bahan acuan mikrobiologi dalam rangka mendukung jaminan mutu hasil pengujian sesuai SNI ISO 17034:2024. Kegiatan diawali pada bulan Januari dengan identifikasi bakteri *Staphylococcus aureus* dari sampel uji yang menunjukkan hasil positif uji koagulase (+4), kemudian bakteri dipelihara pada media BHI sebagai persiapan pembuatan bahan acuan. Selanjutnya pada bulan Februari dilakukan produksi bahan acuan mikrobiologi batch 1 sebanyak 63 vial dan dilanjutkan dengan uji homogenitas terhadap 10 vial yang menunjukkan hasil positif *Staphylococcus aureus* dengan kondisi vakum baik, serta direncanakan untuk uji karakterisasi menggunakan metode sequencing. Pada bulan Maret dilakukan identifikasi bakteri *Escherichia coli* sebagai upaya penambahan ruang lingkup produksi bahan acuan, dimana hasil uji biokimia menunjukkan karakteristik sesuai *E. coli* dan direncanakan dilanjutkan dengan uji penegasan pada periode berikutnya.

c. Pemeliharaan Sistem Manajemen Produsen Bahan Acuan sesuai SNI ISO 17034

Pada Triwulan I Tahun 2026, kegiatan pemeliharaan sistem manajemen dan persyaratan teknis Produsen Bahan Acuan (PBA) SNI ISO/IEC 17034 diawali dengan rapat perencanaan kegiatan tahun 2026 pada Januari yang membahas sosialisasi dan promosi layanan PBA, rencana studi banding, serta penambahan ruang lingkup bahan acuan untuk *Escherichia coli* dan *Salmonella*. Selain itu, dilakukan identifikasi rencana integrasi dokumen sistem manajemen ISO/IEC 17034 dengan ISO/IEC 17043 dalam rangka pembentukan Penyelenggara Uji Profisiensi (PUP) BBP3KP. Pada bulan Februari, melalui Temu Teknis BBP3KP Tahun 2026, ditetapkan penguatan

peran PBA melalui penambahan ruang lingkup isolat *Salmonella* dan *E. coli* serta pengembangan laboratorium biomolekuler, yang ditindaklanjuti dengan identifikasi kebutuhan pelatihan teknis biomolekuler. Selanjutnya pada bulan Maret dilakukan persiapan kaji ulang dokumen melalui identifikasi dokumen dan status revisi, pengumpulan bahan masukan dari hasil audit dan umpan balik, serta perencanaan pelaksanaan kaji ulang untuk memastikan kesesuaian dokumen dengan persyaratan terbaru.



Gambar 41. Pemeliharaan Sistem Manajemen Produsen Bahan Acuan sesuai SNI ISO 17034

15) Fasilitas Layanan Ruang Lingkup SNI Produk Kelautan dan Perikanan (BBP3KP)

Fasilitas layanan ruang lingkup Standar Nasional Indonesia (SNI) produk kelautan dan perikanan bertujuan untuk memperluas cakupan penerapan standar pada berbagai jenis produk hasil kelautan dan perikanan. Melalui fasilitas ini, diharapkan semakin banyak produk yang dapat memenuhi persyaratan SNI sehingga memiliki jaminan mutu, keamanan pangan, dan kesesuaian terhadap regulasi yang berlaku. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain :

a. Perluasan ruang lingkup Layanan Sertifikasi SNI Produk Kelautan dan Perikanan

Kegiatan perluasan ruang lingkup LSPPro-HP BBP3KP dilaksanakan melalui penyelesaian audit kecukupan dokumen, rapat koordinasi pembahasan perluasan ruang lingkup tanggal 20 Januari 2026, penyiapan contoh ikan beku untuk seleksi asesor sensori, serta koordinasi dan identifikasi calon klien di CV Vatra Mandiri Depok tanggal 20 Februari 2026 untuk produk fillet ikan beku. Selanjutnya dilakukan persiapan asesmen perluasan ruang lingkup oleh KAN dan pelaksanaan asesmen ulang serta perluasan ruang lingkup tanggal 12–13 Maret 2026, dengan pengajuan penambahan 15 ruang lingkup produk sehingga total ruang lingkup LSPPro-HP BBP3KP menjadi 37 ruang lingkup.



Gambar 42. Kegiatan perluasan ruang lingkup LSPPro-HP

b. Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu LSPPro-HP sesuai SNI ISO/IEC 17065:2012

Pemeliharaan sistem manajemen mutu dilakukan melalui penyelesaian audit kecukupan dokumen reakreditasi, rapat internal tindak lanjut temuan audit pada 21 Januari 2026, Inhouse Training Bedah SNI Produk Perikanan pada 23 Januari 2026, serta pembayaran iuran tahunan Lembaga Penilaian Kesesuaian pada 26 Januari 2026. Selanjutnya pada Februari 2026 dilakukan pengajuan dokumen hasil perbaikan melalui aplikasi KANMIS dan persiapan asesmen reakreditasi. Setelah asesmen ulang dan perluasan ruang lingkup pada 12–13 Maret 2026, dilakukan tindak lanjut temuan asesmen melalui penyusunan rencana perbaikan dan pemenuhan dokumen pendukung.



Gambar 43. Asesmen reakreditasi dan perluasan ruang lingkup oleh KAN

16) Fasilitas Inkubasi Bisnis bagi UMKM Kelautan Perikanan (BBP3KP)

Fasilitas inkubasi bisnis bagi UMKM kelautan dan perikanan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian pelaku usaha melalui pendampingan yang terstruktur dan berkelanjutan. Kegiatan ini mencakup penguatan aspek manajerial, teknis produksi, inovasi produk, serta pengelolaan usaha, sehingga UMKM mampu berkembang dari tahap rintisan menuju usaha

yang lebih matang dan berdaya saing. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain :

a. Pendampingan UMKM Kelautan dan Perikanan

Kegiatan dilaksanakan melalui beberapa kegiatan, yaitu pendampingan penerapan GMP dan SSOP pada UMKM Levanict 88 di Ambon oleh Satker BBP3KP Ambon tanggal 9 dan 28 Januari 2026, bimbingan teknis pengolahan produk kelautan dan perikanan bersama UMKM Poklahsar Lobangahiji untuk produk rolade ikan tanggal 19 Januari 2026 oleh Satker BBP3KP Palabuhanratu, fasilitasi pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) UMKM Jeger Food tanggal 21 Januari 2026 oleh Satker BBP3KP Mataram, konsultasi analisa usaha cookies rumput laut tanggal 23 Januari 2026 oleh Satker BBP3KP Mataram, pendampingan pembuatan NIB tanggal 27 dan 29 Januari 2026 oleh Satker BBP3KP Palabuhanratu, dan pendampingan UMKM Le-Box (Lele dalam Box) oleh Satker BBP3KP Palabuhanratu tanggal 18 Februari 2026.

b. Pengembangan Produk dan Diseminasi Teknologi Pengolahan

Kegiatan pengembangan produk dan diseminasi teknologi pengolahan dilaksanakan oleh Satker BBP3KP Ambon, Palabuhanratu, dan Mataram melalui uji coba produk rolade ikan tuna dan nugget ikan kakap tanggal 15 Januari 2026 oleh Satker BBP3KP Palabuhanratu, uji terap pembuatan gyoza tilapia tanggal 26 Januari 2026 oleh Satker BBP3KP Mataram, serta pelaksanaan Workshop Diversifikasi dan Inovasi Produk Gyoza Tilapia sebagai narasumber pada tanggal 28 Januari 2026 oleh Satker BBP3KP Mataram.

Selanjutnya, Satker BBP3KP Palabuhanratu melaksanakan uji coba produk Shrimp Spring Roll Tail On pada tanggal 2 dan 12 Februari 2026, serta berpartisipasi sebagai narasumber dalam Workshop Diversifikasi dan Inovasi Produk Pangan edisi Shrimp Roll pada tanggal 19 Februari 2026. Selain itu, Satker BBP3KP Palabuhanratu menerima kunjungan mahasiswi IPB University pada tanggal 24 Februari 2026 dalam rangka diseminasi teknologi pengolahan produk kelautan dan perikanan.



Gambar 44. Pelaksanaan Workshop Diversifikasi dan Inovasi Produk

17) Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan Bernilai Tambah (BBP3KP)

Kegiatan penerapan produk kelautan dan perikanan bernilai tambah bertujuan untuk mendorong pelaku usaha, khususnya UMKM, agar mampu mengolah hasil perikanan menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi melalui inovasi dan diversifikasi produk. Melalui kegiatan ini, pelaku usaha didorong untuk tidak hanya menjual bahan baku, tetapi juga menghasilkan produk olahan yang lebih siap konsumsi, berkualitas, dan memiliki daya saing di pasar. Periode Triwulan I belum terdapat keluaran berapa produk kelautan dan perikanan bernilai tambah yang diterapkan. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain :

a. Fasilitasi Uji Terap dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan

Kegiatan fasilitasi uji terap dan pengembangan produk kelautan dan perikanan dilaksanakan melalui luring pada tanggal 18 Februari 2026 di Ruang Rapat UTTPP BBP3KP. Rapat ini membahas progres kegiatan fasilitasi uji terap produk kelautan dan perikanan serta inovasi produk dan teknologi pengolahan dan pemasaran. Disampaikan bahwa beberapa produk pengembangan seperti mochi rumput laut, fish kuro, akar kelapa, dan albumin telah siap dilakukan uji coba untuk memperoleh hasil yang optimal. Selain itu, dibahas pula usulan UMKM calon peserta kegiatan fasilitasi uji terap produk kelautan dan perikanan yang berasal dari 6 provinsi dan 16 kabupaten/kota sebanyak 130 usulan UMKM, dengan 99 UMKM yang telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti kegiatan pendampingan.

18) Diseminasi Masyarakat pada Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan (BBP3KP)

Diseminasi kepada masyarakat terkait pengujian dan penerapan produk kelautan dan perikanan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku usaha serta masyarakat terhadap pentingnya pengujian mutu,

keamanan pangan, dan kesesuaian standar produk. Melalui kegiatan ini, informasi mengenai hasil pengujian, standar yang berlaku, serta praktik pengolahan yang baik dapat tersampaikan secara luas dan mudah dipahami. Capaian Masyarakat yang Menerima Diseminasi Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan dilaksanakan melalui kegiatan penyusunan bahan informasi berupa konten (media sosial, cetak, elektronik/website) dan penyebarluasan informasi pengujian penerapan produk kelautan dan perikanan. Capaian tersebut pada triwulan I yaitu 201 orang atau setara 13,4% dari target 1500 orang. Dilihat dari partisipasinya, capaian tersebut didukung oleh pelaksanaan 4 event dengan partisipasi responsif gender, terdiri atas 64 laki-laki (31,84%) dan 137 perempuan (68,15%).

1) Penyusunan Bahan Informasi dan Peliputan Kegiatan

Ditjen PDSPKP melaksanakan peliputan dan pengambilan gambar pada 23 (dua puluh tiga) kegiatan untuk menyusun bahan informasi pengujian penerapan produk kelautan dan perikanan. Peliputan dilaksanakan sebanyak 9 kegiatan pada Januari 2026, 10 kegiatan pada Februari 2026, dan 4 kegiatan pada Maret 2026. Kegiatan yang diliput antara lain dokumentasi *handbook*, forum konsultasi pemangku kepentingan, penerapan pengolahan nori *Ulva* sp., Temu Teknis BBP3KP, pelatihan fillet ikan patin, serta asesmen KAN dan konten mutu air. Selain itu, Tim juga menyusun konten media sosial sebanyak 22 konten pada Januari 2026, 14 konten pada Februari 2026, dan 14 konten pada Maret 2026 sebagai bahan diseminasi informasi kepada masyarakat.

2) Penyebarluasan informasi pengujian penerapan produk kelautan dan perikanan

Penyebarluasan informasi bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan stakeholder terhadap tugas dan fungsi, layanan, serta inovasi teknologi pengolahan produk kelautan dan perikanan yang dikembangkan oleh BBP3KP. Pada periode triwulan I, penyebarluasan informasi dilaksanakan melalui kegiatan studi lapangan *International Blue Economist Certification Training Course Batch 10* tanggal 19 Januari 2026 yang disertai demonstrasi pengolahan beras analog rumput laut, kunjungan Pusat Riset Teknologi Manufaktur Peralatan BRIN tanggal 5 Februari 2026 yang disertai demonstrasi pengolahan beras rumput laut, Festival Ikan Nusantara di

Universitas Satya Negara Indonesia tanggal 13 Februari 2026 yang disertai demonstrasi pengolahan gyoza dan gohyong ikan tuna, kunjungan *Sustainablue Center* Universitas Indonesia tanggal 24 Februari 2026 yang disertai demonstrasi pengolahan beras rumput laut, serta kegiatan Pesantren Kilat Pra-Lansia Ramadhan Wanita PUI tanggal 4 Maret 2026 yang disertai demonstrasi pengolahan gyoza ikan tuna.

3. Realisasi anggaran

Ditjen PDSPKP telah mengalokasikan anggaran dalam rangka pencapaian indikator kinerja Nilai Pemasaran Produk Perikanan Dalam Negeri sebesar Rp153.033.667.000,- dengan blokir anggaran sebesar Rp21.531.332.000,- dan sampai dengan periode Triwulan I tahun 2026 telah direalisasikan sebesar Rp4.506.131.332,- atau setara dengan 3,42% dari pagu efektif.

D. IKU 4. Persentase UMKM Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan Naik Kelas

Persentase UMKM pengolahan produk kelautan dan perikanan naik kelas menunjukkan kenaikan kelas usaha berdasarkan 6 aspek usaha yang telah ditentukan sesuai dengan Kepdirjen Nomor 56 tahun 2024. Aspek usaha yang menjadi indikator terdiri dari aspek legalitas, sumberdaya manusia, produksi, keuangan, pemasaran dan operasional.

Usaha mikro dan usaha kecil bidang pengolahan produk KP yang meningkat skalanya dihitung berdasarkan 6 aspek usaha (legalitas, peningkatan omset, peningkatan aset, peningkatan produksi, perluasan pasar, peningkatan tenaga kerja). Berdasarkan Kepdirjen PDSPKP No 56 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Usaha Mikro Kecil dan Menengah Naik Kelas Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, penetapan kelas usaha dari pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan diperoleh dari total pembobotan, dengan rincian:

- a. Kelas Mikro, merupakan kelas terbawah dengan batas nilai skoring 0 sampai dengan 50;
- b. Kelas Kecil, dengan batas nilai skoring 51 sampai dengan 70;
- c. Kelas Menengah, dengan batas nilai skoring 71 sampai dengan 100.

Tabel 6. Ikhtisar Pencapaian Persentase UMKM Pengolahan Produk KP Naik Kelas

Indikator Kinerja	Target			Realisasi			% Realisasi Terhadap Target TW I 2026	% Realisasi s.d TW I Terhadap Target 2026	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi TW I 2025
	TW I 2026	TW I 2025	Tahun 2026	TW I 2026	TW I 2025	S.d TW I 2026			
Persentase UMKM Pengolahan Produk KP Naik Kelas (%)	0,5	-	5,5	0,7	-	0,7	120	12,73	-

1. Analisa Capaian Indikator Kinerja Persentase UMKM Pengolahan Produk KP Naik Kelas

Capaian indikator kinerja Target Presentase UMKM Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan Naik Kelas Triwulan I tahun 2026 sebesar 0,7% atau setara 120% terhadap target Triwulan I tahun 2026 sebesar 0,5%, dan setara dengan 12,7% jika dibandingkan dengan target tahun 2026 sebesar 5,5%. Realisasi persentase UMKM Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan Naik Kelas sebesar 0,7% berasal dari 6 UMKM dari 855 UMKM terkurasi. Capaian tersebut tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada Triwulan I tahun 2025 karena pada periode tersebut belum terdapat realisasi persentase UMKM Naik kelas.

2. Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja

Ditjen PDSPKP telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini antara lain:

2) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Usaha pada Lembaga Usaha KP

Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Lembaga Usaha Kelautan dan Perikanan merupakan langkah untuk membangun ekosistem usaha dalam mendorong pengembangan dan keberlanjutan usaha yang berdaya saing. Upaya yang dilakukan yaitu dengan memperkuat dan meningkatkan kapasitas kelembagaan pelaku usaha agar mampu meningkatkan produktivitas, efisiensi biaya dan meningkatkan posisi tawar sehingga dapat meningkatkan skala usaha dan kesejahteraan pelaku usaha. Output kegiatan yang dihasilkan adalah jumlah UMKM yang difasilitasi dalam kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan, yang mencerminkan cakupan intervensi program.

Jumlah lembaga usaha kelautan dan perikanan yang ditingkatkan dan dibina kapasitas kelembagaannya pada Tahun 2026 ditargetkan sebanyak 120 lembaga, dengan target capaian pada Triwulan I sebesar 2 lembaga. Hingga akhir Triwulan I Tahun 2026, realisasi capaian telah mencapai 2 lembaga usaha, sehingga target triwulanan telah terpenuhi sebesar 100%. Apabila dibandingkan dengan target tahunan, capaian tersebut setara dengan 1,66% dari total target yang ditetapkan. Adapun kegiatan yang telah dilakukan antara lain :

a. Monitoring dan Evaluasi Operasional Koperasi Desa Merah Putih

Kegiatan monitoring dan evaluasi operasional Koperasi Desa Merah Putih dilaksanakan pada tanggal 8 Januari 2026 di Koperasi Desa Merah Putih Mekarmukti Cihampelas dan tanggal 9 Januari 2026 di Koperasi Desa Merah Putih Mekarsari Kecamatan Cipongkor. Kegiatan ini bertujuan untuk menilai kesiapan operasional, kapasitas kelembagaan, serta perkembangan usaha koperasi dalam mendukung pengembangan usaha kelautan dan perikanan berbasis budidaya tematik.

Secara umum, kedua koperasi menunjukkan potensi pengembangan usaha yang cukup baik, namun masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan lahan, permodalan, kapasitas SDM, serta penguatan kemitraan usaha. Oleh karena itu, diperlukan dukungan lanjutan berupa peningkatan kapasitas kelembagaan, fasilitasi sarana dan prasarana, serta penguatan akses pasar dan pembiayaan guna memastikan keberlanjutan dan optimalisasi kinerja koperasi dalam mendukung pengembangan sektor kelautan dan perikanan.



Gambar 45. Koperasi Desa Merah Putih Mekarmukti Cihampelas



Gambar 46. Koperasi Desa Merah Putih Mekarsari Kecamatan Cipongkor

b. Bimbingan Teknis Tata Kelola Usaha Rantai Dingin yang Efisien dan Berkelanjutan

Kegiatan bimbingan teknis dilaksanakan pada tanggal 4 Februari 2026 dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan kapasitas pengelolaan unit usaha rantai dingin, meliputi *cold storage*, pabrik es, dan kendaraan berpendingin, bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pengelola Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), serta mendorong optimalisasi operasional unit usaha tersebut. Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 200 peserta yang terdiri dari pengurus koperasi pengelola KNMP, perwakilan dinas kelautan dan perikanan daerah, penyuluh perikanan, serta perwakilan unit kerja lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan. Narasumber yang dihadirkan berasal dari pemerintah, asosiasi, dan pelaku usaha koperasi yang telah mengelola unit rantai dingin, dengan materi mencakup pengelolaan usaha ice slurry, pabrik es balok, gudang beku portabel, serta kendaraan berpendingin. Selain itu, peserta juga mendapatkan gambaran model bisnis dan praktik baik dalam pengelolaan unit usaha rantai dingin sebagai referensi untuk implementasi di lokasi masing-masing.

3) Fasilitasi UMKM KP pada Literasi Keuangan dan Akses Pembiayaan

Kegiatan Fasilitasi Literasi Keuangan dan Akses Pembiayaan Kredit Program (Timja Pembiayaan) merupakan upaya untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap pengelolaan keuangan sekaligus memperluas akses terhadap sumber pembiayaan formal, khususnya kredit program. Kegiatan ini mencakup edukasi literasi keuangan seperti pencatatan usaha, penyusunan laporan keuangan sederhana, manajemen arus kas, serta pemahaman produk dan skema kredit program. Selain itu, dilakukan pendampingan dalam proses pengajuan pembiayaan, mulai dari sosialisasi akses pembiayaan, koordinasi tim Tim Pembinaan dan Pemantauan Evaluasi KUR sektor KP, hingga fasilitasi dan koordinasi lembaga keuangan dan pemangku

kepentingan untuk mengatasi kendala akses pembiayaan serta melakukan monitoring realisasi kredit. Output kegiatan yang dihasilkan adalah jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam literasi keuangan dan akses pembiayaan.

Target pelaku usaha yang difasilitasi dalam literasi keuangan dan akses pembiayaan pada tahun 2026 sebanyak 750 UMKM, sedangkan target pada triwulan I tahun 2026 adalah sebanyak 30 UMKM. Realisasi capaian jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam literasi keuangan dan akses pembiayaan pada triwulan I tahun 2026 adalah 30 lembaga usaha, hal ini sesuai target dan telah mencapai 100%, jika dibandingkan dengan target tahun 2026 maka realisasi pelaku usaha yang telah difasilitasi sebesar 4%. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain :

a. Peningkatan Kompetensi Pemberdayaan Usaha

Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pemberdayaan Usaha dilaksanakan dalam dua sesi, yaitu sesi pembelajaran pada tanggal 7 Januari 2026 di Ruang Rapat Arwana I, Gedung Mina Bahari II Lantai 14, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta sesi penilaian kompetensi pada tanggal 9 Januari 2026 di Hotel El-Royal Bandung. Masing-masing sesi diikuti oleh 40 peserta yang terdiri dari perwakilan BPPSDMKP, BPPMHKP, pegawai Direktorat Pemberdayaan Usaha, serta tim penilai kompetensi.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi ASN Direktorat Pemberdayaan Usaha agar memiliki kemampuan yang terstandar sesuai Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Materi yang diberikan mencakup 10 pokok bahasan, yaitu studi proses produksi, perhitungan biaya investasi, pengelolaan izin usaha industri, survei pasar ritel, pemasaran produk, pembukuan keuangan, identifikasi elemen pemasaran, komunikasi efektif, pengembangan kematangan emosional dan motivasi kerja, serta pengoperasian komputer.

Pelaksanaan uji kompetensi dilakukan melalui ujian tertulis dan observasi yang dinilai oleh asesor bersertifikat BNSP. Sebagai tindak lanjut, peserta yang dinyatakan lulus dan memperoleh sertifikasi akan ditugaskan untuk melakukan pendampingan kepada UMKM dalam rangka pengembangan usaha, sehingga diharapkan dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kapasitas pelaku usaha kelautan dan perikanan.



Gambar 47. Peningkatan Komptensi Pemberdayaan Usaha

b. Temu Fasilitas Akses Pembiayaan

Kegiatan Temu Fasilitas Akses Pembiayaan di Kabupaten Bandung telah dilaksanakan pada tanggal 5 Februari 2026 di Aula Desa Cukanggenteng, Kabupaten Bandung. Kegiatan dihadiri perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Barat, perwakilan PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Cabang Jawa Barat, perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, perwakilan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung dan sebagai peserta adalah 84 pelaku usaha pemindang ikan di Desa Cukanggenteng, Kecamatan Pasirjambu. Sebanyak 84 pelaku usaha pemindang ikan telah memperoleh pemahaman mengenai literasi keuangan dan perlindungan konsumen, sehingga diharapkan mampu mengelola usaha secara lebih tertib dan aman.

Dari jumlah tersebut, 44 pelaku usaha telah resmi menjadi nasabah program PNM Mekaar, sementara 40 pelaku usaha lainnya menyatakan minat untuk bergabung. Melalui proses kurasi, telah teridentifikasi sejumlah pelaku usaha yang dinilai siap untuk difasilitasi akses pembiayaan. Selain itu, kegiatan ini juga digunakan untuk membangun komitmen awal sinergi antara KKP, Pemerintah Daerah, dan PNM dalam pengembangan ekosistem pembiayaan berbasis komunal yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.



Gambar 48. Temu Fasilitas Akses Pembiayaan

c. *Training of Trainers* (ToT) dalam rangka Uji Coba Modul Literasi Keuangan dan Akses Pembiayaan UMKM Sektor Kelautan dan Perikanan

Kegiatan *Training of Trainers* (ToT) dalam rangka Uji Coba Modul Literasi Keuangan dan Akses Pembiayaan UMKM Sektor Kelautan dan Perikanan telah dilaksanakan pada tanggal 9 - 11 Maret 2026 di Common Room Gedung Mina Bahari III Lantai 6, KKP. Kegiatan dihadiri oleh Direktur Pemberdayaan Usaha, tim penyusun modul, perwakilan Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan BPPSDM KP, serta fasilitator materi untuk melakukan simulasi penyampaian seluruh modul pembelajaran. Berdasarkan hasil uji coba dan diskusi selama kegiatan ToT, diperoleh beberapa masukan antara lain perlunya penyederhanaan metode penyampaian materi penyusunan laporan keuangan agar lebih sesuai dengan tingkat literasi keuangan pelaku usaha mikro, serta penambahan simulasi perencanaan keuangan pada kondisi tidak ideal (*contingency plan*) dan penguatan materi terkait perencanaan tabungan usaha berbasis target.

Sebagai tindak lanjut, tim penyusun akan melakukan penyempurnaan materi modul berdasarkan hasil uji coba. Modul yang telah disempurnakan selanjutnya akan dimanfaatkan dalam kegiatan peningkatan kapasitas pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan pada wilayah prioritas, termasuk mendukung pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih dan Kampung Budidaya Tematik, serta menjadi bahan pembelajaran dalam pengembangan *corporate university* (corpu) di lingkungan Ditjen PDSPKP khususnya Direktorat Pemberdayaan Usaha.



Gambar 49. ToT Uji Coba Modul Literasi Keuangan dan Akses Pembiayaan UMKM Sektor Kelautan dan Perikanan

4) Penumbuhan dan Pembinaan Wirausaha KP

Kegiatan Penumbuhan dan Pembinaan Wirausaha Kelautan dan Perikanan (KP) merupakan upaya untuk menciptakan dan mengembangkan wirausaha baru serta memperkuat kapasitas wirausaha yang sudah ada agar lebih mandiri, inovatif, dan berdaya saing. Kegiatan ini meliputi identifikasi dan seleksi calon wirausaha, pelatihan kewirausahaan dan manajemen usaha, pendampingan penyusunan rencana bisnis, serta pembinaan berkelanjutan dalam aspek produksi, pemasaran, dan pengelolaan keuangan. Output kegiatan adalah jumlah wirausaha KP yang ditumbuhkan dan dibina. Target wirausaha KP yang ditumbuhkan dan dibina pada tahun 2026 sebanyak 3.650 UMKM, sedangkan target pada triwulan I tahun 2026 adalah sebanyak 225 UMKM. Realisasi capaian wirausaha KP yang ditumbuhkan dan dibina pada triwulan I tahun 2026 adalah 340 UMKM, capaian ini melebihi dari target sebesar 151,11%, jika dibandingkan dengan target tahun 2026 maka realisasi pelaku usaha yang telah difasilitasi sebesar 9,31 %. Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain:

a. *Business Matching* UMKM Hasil Kelautan dan Perikanan dengan *Retail Modern*

Kegiatan *Business Matching* UMKM Hasil Kelautan dan Perikanan dengan *Retail Modern* telah dilaksanakan pada 12 Februari 2026 di Ruang Auditorium Tuna, Gedung Mina Bahari IV, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta Pusat, dengan tujuan memperluas akses pasar UMKM sektor kelautan dan perikanan serta meningkatkan daya saing produk melalui kemitraan dengan *retail modern*. Kegiatan ini diikuti oleh 50 UMKM terpilih, terdiri atas 30 peserta luring dan 20 peserta daring, serta mempertemukan UMKM dengan 5 buyer *retail modern*, yaitu PT Marco Sekawan, HIPINDO, PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk, PT Indomarco Prismaatama, dan PT Cakra Berkah Rejekindo. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebanyak 27 UMKM berhasil menandatangani LOI dengan estimasi total nilai kerja sama sebesar Rp5.945.230.720 untuk jangka waktu 6 bulan. Sebagai tindak lanjut, fasilitasi *pitching* dengan pihak AEON akan dilaksanakan di luar rangkaian kegiatan melalui koordinasi bersama ASPPENDO, disertai proses kurasi produk untuk memastikan kesesuaian dengan standar *retail modern*.



Gambar 50. Business Matching UMKM Hasil Kelautan dan Perikanan dengan Retail Modern

b. *Bimbingan Teknis Kewirausahaan dan Akses Permodalan*

Kegiatan Bimbingan Teknis Kewirausahaan dan Akses Permodalan telah dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2026 di Kota Singkawang (Kalimantan Barat), 4 Maret 2026 di Kota Langsa, Kabupaten Aceh Timur (Aceh), 6 Maret 2026 di Kabupaten Pesisir Selatan (Sumatera Barat), serta di Kabupaten Lampung Tengah (Lampung). Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong penumbuhan dan keberlanjutan usaha sektor kelautan dan perikanan melalui peningkatan kapasitas kewirausahaan serta kemudahan akses pembiayaan bagi pelaku usaha. Setiap kegiatan diikuti oleh sekitar 75 peserta yang terdiri dari nelayan, pembudidaya, pengolah, pemasar hasil perikanan, serta calon wirausaha. Kegiatan juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan, antara lain DPR RI, Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemerintah daerah, serta sektor perbankan. Materi yang disampaikan mencakup penguatan kewirausahaan, potensi sektor kelautan dan perikanan di daerah, prosedur dan akses pembiayaan melalui skema seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan dana bergulir, pengelolaan usaha berkelanjutan, serta aspek legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP). Selain itu, juga disampaikan materi terkait peningkatan kualitas produk, pengendalian mutu, strategi pemasaran, dan pengembangan usaha berbasis nilai tambah.

Secara umum, kegiatan ini memberikan pemahaman yang komprehensif kepada peserta mengenai pengelolaan usaha dan akses permodalan. Namun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi pelaku usaha, antara lain keterbatasan modal, sarana dan prasarana, kapasitas SDM, serta akses pasar. Oleh karena itu, diperlukan tindak lanjut berupa penguatan pelatihan dan pendampingan, pengembangan usaha berbasis klaster, serta

pemanfaatan teknologi guna meningkatkan daya saing dan keberlanjutan UMKM kelautan dan perikanan di berbagai daerah



Gambar 51. Bimbingan Teknis Kewirausahaan dan Akses Permodalan

5) Fasilitasi Kemitraan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan

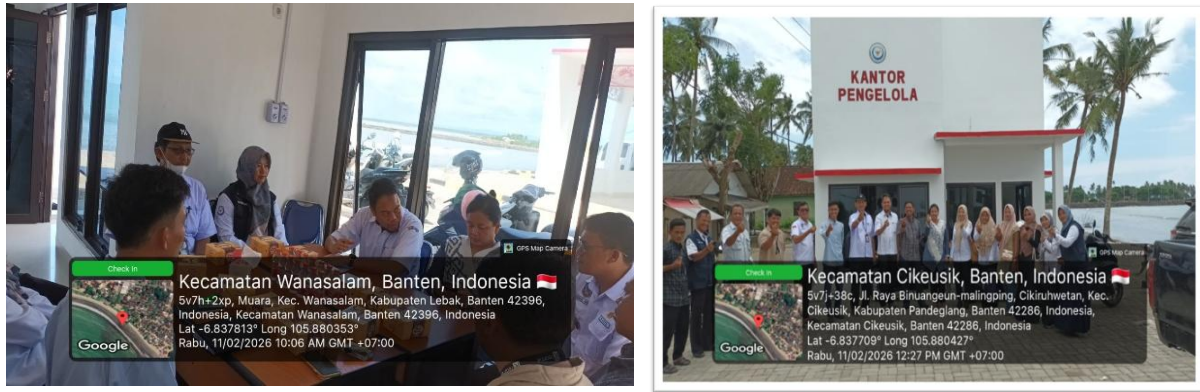
Kegiatan Fasilitasi Kemitraan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan merupakan upaya untuk mempertemukan dan menghubungkan pelaku usaha dengan mitra strategis guna memperkuat rantai nilai, memperluas akses pasar, dan meningkatkan skala usaha. Kegiatan ini meliputi identifikasi potensi dan kebutuhan pelaku usaha, penjajakan dan matchmaking dengan mitra seperti offtaker, industri pengolahan, distributor, eksportir, maupun lembaga keuangan, serta pendampingan dalam penyusunan skema dan perjanjian kemitraan yang saling menguntungkan. Output kegiatan adalah jumlah kesepakatan kemitraan yang terbentuk. Target jumlah kesepakatan kemitraan pada tahun 2026 sebanyak 10 dokumen, pada triwulan I tidak ditetapkan target karena pada triwulan I kegiatan yang dilaksanakan baru pada tahap identifikasi dan verifikasi. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain :

a. Inisiasi Peluang Kemitraan Koperasi Desa Merah Putih

Kegiatan inisiasi peluang kemitraan dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2026 secara hybrid antara Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Tongke-Tongke dengan CV. Bhumiagri Nawasena Perkasa, serta pada tanggal 11 Februari 2026 secara luring antara KDMP Cikiruhwetan Kecamatan Cikeusik dengan Koperasi Produsen Mina Muara Sejahtera (MMS). Kegiatan ini bertujuan untuk menjajaki kerja sama usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) serta penguatan rantai nilai sektor kelautan dan perikanan.

Pada kemitraan antara KDMP Tongke-Tongke dan CV. Bhumiagri Nawasena Perkasa, peluang kerja sama difokuskan pada penyediaan komoditas ikan tuna, khususnya Yellow Fin Tuna untuk pasar ekspor seperti Vietnam dan Amerika Serikat. KNMP Tongke-Tongke di Kabupaten Sinjai memiliki potensi sumber daya yang cukup besar, ditunjang oleh jumlah nelayan dan armada yang memadai serta dukungan sarana rantai dingin seperti gudang beku, ABF, dan kendaraan berpendingin. Penanganan ikan telah dilakukan sejak di atas kapal hingga proses pembekuan setelah pendaratan. Untuk memenuhi standar ekspor, diperlukan penguatan penerapan sistem rantai dingin dan penanganan mutu agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan oleh mitra usaha. Sebagai tindak lanjut, kedua pihak akan melakukan pembahasan lebih lanjut terkait spesifikasi teknis, harga, dan mekanisme kerja sama.

Sementara itu, inisiasi kemitraan antara KDMP Cikiruhwetan dan Koperasi Produsen Mina Muara Sejahtera (MMS) diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan fasilitas KNMP serta penguatan kelembagaan dan model bisnis koperasi. KDMP Cikiruhwetan masih dalam tahap awal pengembangan kelembagaan, dengan rencana anggota sekitar 100 orang dan sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Di sisi lain, Koperasi MMS telah memiliki pengalaman usaha yang lebih matang dengan fasilitas gudang beku, armada kapal, serta jaringan pasar, meskipun masih menghadapi keterbatasan pasokan bahan baku. Potensi kemitraan yang dapat dikembangkan meliputi skema penyewaan fasilitas rantai dingin, kerja sama penyediaan bahan baku, hingga penyertaan modal dengan sistem bagi hasil. Selain itu, kedekatan geografis dengan sentra perikanan Binuangeun menjadi peluang strategis dalam mendukung rantai pasok. Sebagai tindak lanjut, kedua koperasi akan melakukan pembahasan lebih lanjut untuk menentukan skema kemitraan yang paling sesuai dan berkelanjutan.



Gambar 52. Inisiasi peluang kerjasama KDMP Kec. Cikeusik dengan Koperasi Produsen Mina Muara Sejahtera

3. Realisasi Anggaran

Ditjen PDSPKP telah mengalokasikan anggaran dalam rangka pencapaian indikator kinerja Persentase UMKM Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan Naik Kelas sebesar Rp5.818.137.000,- dan sampai dengan periode Triwulan I tahun 2026 telah direalisasikan sebesar Rp1.058.068.070,- atau setara dengan 18,18% dari pagu efektif.

Sasaran Program 2. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

E. IKU 5. Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Lingkup Ditjen PDSPKP

Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi merupakan indikator yang mengukur implementasi reformasi birokrasi general pada Unit Organisasi Eselon I di lingkungan KKP. Nilai diperoleh dari hasil evaluasi seluruh indikator pembentuk yang terdiri dari akuntabilitas kinerja dan keuangan, pembangunan integritas, profesionalitas ASN, pelayanan publik, reformasi hukum, tata laksana, kearsipan, dan pengadaan barang/jasa.

Tabel 7. Ikhtisar Pencapaian Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Lingkup Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target			Realisasi			% Realisasi Terhadap Target TW I 2026	% Realisasi s.d TW I Terhadap Target 2026	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi TW I 2025
	TW I 2026	TW I 2025	Tahun 2026	TW I 2026	TW I 2025	S.d TW I 2026			
Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Lingkup Ditjen PDSPKP (Nilai)	-	-	86,5	-	-	-	-	-	-

1. Analisa Capaian Indikator Kinerja Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Lingkup Ditjen PDSPKP

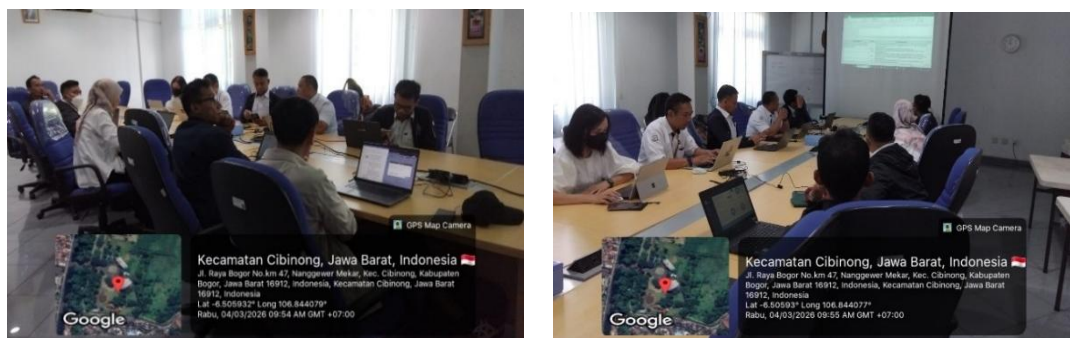
Indikator Kinerja Nilai Reformasi Birokrasi Lingkup Ditjen PDSPKP merupakan indikator yang bersifat tahunan, sehingga pencapaian indikator tersebut akan diukur pada Triwulan IV tahun 2026.

2. Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja

Ditjen PDSPKP telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian indikator kinerja implementasi reformasi birokrasi antara lain:

a. Kegiatan Terkait Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Ditjen PDSPKP diantaranya sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan rapat pembahasan tindak lanjut hasil revidi pengendalian intern pelaporan keuangan (PIPK) PDSPKP tahun 2025 pada tanggal 13 Januari 2026 yang diikuti oleh tim inspektorat IV KKP dan dihadiri oleh seluruh tim PIPK unit eselon II lingkup Ditjen PDSPKP.
- 2) Melaksanakan kegiatan pembahasan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan inspektorat jenderal pada tanggal 4 Maret 2026 yang diikuti oleh Auditor Inspektorat IV KKP, Perwakilan unit eselon II lingkup Ditjen PDSPKP, serta perwakilan Tim Kerja lingkup Setditjen PDSPKP. Dalam pelaksanaan kegiatan dilakukan pembahasan terkait laporan hasil pemeriksaan beserta dokumen tindak lanjut sesuai hasil rekomendasi. Hal ini bertujuan penyelesaian dokumen tindak lanjut hasil rekomendasi dapat terselesaikan dengan status tuntas pada aplikasi <https://sidak.kkp.go.id>.



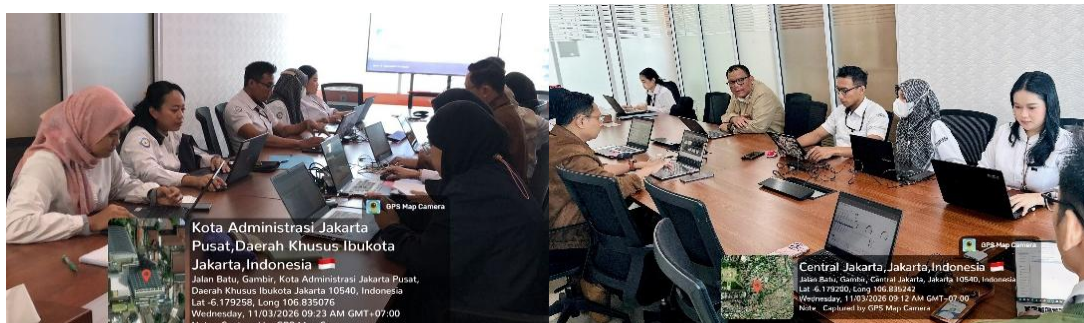
Gambar 53. Pembahasan Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal

- b. Kegiatan Terkait Batas Tertinggi Nilai Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Ditjen PDSPKP diantaranya sebagai berikut:
- 1) Melaksanakan kegiatan verifikasi kelengkapan dokumen pertanggungjawaban;
 - 2) Melaksanakan kegiatan rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Keuangan dan BMN periode Semester II Tahun 2025 (Unaudited) Lingkup Ditjen PDSPKP pada tanggal 12 - 15 Januari 2026. Output kegiatan ini yaitu penyelesaian Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara periode Semester II Tahun 2025 (*Unaudited*);
 - 3) Melaksanakan kegiatan rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Keuangan dan BMN periode Januari dan Februari Lingkup Ditjen PDSPKP pada tanggal 10 Maret 2026. Output kegiatan ini yaitu penyelesaian transaksi *to do list* dan penutupan periode Januari dan Februari pada aplikasi sakti dan *myintress*;
 - 4) Melakukan pemenuhan dokumen pemeriksaan oleh tim BPK RI perihal Pemeriksaan atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- c. Kegiatan terkait Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen PDSPKP, diantaranya sebagai berikut:
- 1) Rapat Pengisian Evaluasi Rencana Aksi Level 1 dan 2 Lingkup Ditjen PDSPKP Periode Triwulan IV Tahun 2025 dilaksanakan tanggal 6 Januari 2026.
 - 2) Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi Lingkup Ditjen PDSPKP periode triwulan IV tahun anggaran 2025 dilaksanakan tanggal 8 Januari 2026.



Gambar 54. Rapat Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi Lingkup Ditjen PDSPKP periode triwulan IV tahun anggaran 2025

- 3) Rapat penyusunan Laporan Kinerja Tahunan (LKJ) Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Level 1 dan Level 2 dilaksanakan tanggal 12 Januari 2026.
- 4) Rapat Verifikasi Capaian Kinerja pada Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2026.
- 5) Rapat Entry Meeting Reviu Laporan Kinerja (LKj) TA 2025 Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2026.D
- 6) Rapat Pembahasan Hasil Reviu Laporan Kinerja (LKj) Level I Tahun 2025 Lingkup Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dilaksanakan tanggal 6 Februari 2026.
- 7) Rapat Rekonsiliasi Kinerja dalam Rangka Persiapan Penilaian SAKIP Tahun 2026 dilaksanakan tanggal 10 Maret 2026.
- 8) Rapat Rekonsiliasi Kinerja dalam Rangka Persiapan Penilaian SAKIP Tahun 2026 dilaksanakan tanggal 11 maret 2026.



Gambar 55. Rapat Rekonsiliasi Kinerja dalam Rangka Persiapan Penilaian SAKIP Tahun 2026

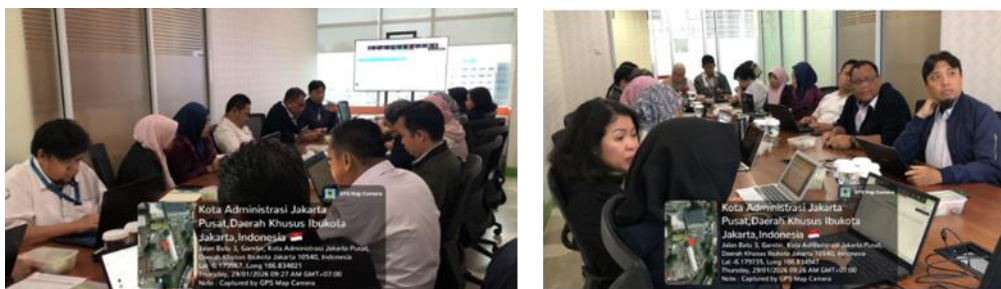
d. Kegiatan Terkait Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen PDSPKP diantaranya sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan monitoring capaian IKPA terhadap progres pengisian Capaian Output periode Maret 2026 dengan Biro Keuangan dan BMN Sekretariat Jenderal Kementerian kelautan dan Perikanan. Berdasarkan Aplikasi OMSPAN per tanggal 31 Maret 2026 data capaian IKPA Ditjen PDSPKP periode Maret 2026 sebesar 67,83.
- 2) Keikutsertaan dalam rapat Monitoring Pelaksanaan IKPA Periode Maret Tahun 2026 di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang

dilaksanakan oleh Biro Keuangan dan BMN, KKP pada tanggal 9 April 2026.

e. Kegiatan Terkait Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen PDSPKP diantaranya sebagai berikut:

- 1) Rapat Penginputan Usulan Revisi Buka Blokir Anggaran Tahun 2026 pada Aplikasi SAKTI dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2026.
- 2) Rapat Pembahasan kegiatan anggaran pemberdayaan masyarakat (aspirasi), kegiatan dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2026.
- 3) Rapat Koordinasi Persiapan Sosialisasi Bantuan Pemerintah (BP) Tahun 2026 kepada Tenaga Ahli Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI, kegiatan dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2026.



Gambar 56. Rapat Koordinasi Persiapan Sosialisasi Bantuan Pemerintah (BP) Tahun 2026

- 4) Rapat Koordinasi pembahasan dukungan Ditjen PDSPKP terhadap Program Prioritas Presiden RI Tahun 2026, kegiatan dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2026



Gambar 57. Rapat Koordinasi pembahasan dukungan Ditjen PDSPKP terhadap Program Prioritas Presiden RI Tahun 2026

- 5) Rapat Pembahasan Revisi Anggaran Kewenangan KPA, kegiatan dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2026.
- 6) Rapat Pembahasan Usulan Pemanfaatan Anggaran pada RO Khusus, kegiatan dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2026.

f. Kegiatan Terkait Nilai Maturitas Struktur dan Proses SPIP Ditjen PDSPKP diantaranya sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan kegiatan monitoring input data pelaksanaan kegiatan SPIP pada bulan desember 2025 melalui aplikasi SILASTI pada tanggal 9 Januari 2026 dan penyusunan laporan SPIP bulan Triwulan IV Tahun 2025.
- 2) Mengikuti kegiatan reviu penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan (PIPK) Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2025 pada tanggal 2 s.d 4 Februari 2026, yang diselenggarakan oleh Kepala Biro Keuangan dan BMN.
- 3) Keikutsertaan pada rapat persiapan pembinaan SPIP tahun 2026 oleh tim BPKP, sesuai dengan surat Deputy Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pangan, Nomor PE.09.01/SP-63/D3/3/2026 hal pengembangan informasi awal dan pembinaan SPIP tahun 2026.



Gambar 58. Kegiatan persiapan pembinaan SPIP tahun 2026 oleh tim BPKP

g. Kegiatan Terkait Indeks Profesionalitas ASN Ditjen PDSPKP diantaranya sebagai berikut:

- 1) Rapat Monitoring dan Evaluasi Disiplin dan Kinerja Pegawai Triwulan IV Tahun 2025, 19 Januari 2026;



Gambar 59. Rapat Monitoring dan Evaluasi Disiplin dan Kinerja Pegawai Triwulan IV

- 2) Rapat Persiapan Penyusunan Rumusan Ruang Lingkup Tugas Jabatan Fungsional Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, 26 Januari 2026;
- 3) Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal PDSPKP, 30 Januari dan 9 Maret 2026;
- 4) Rapat Tindak Lanjut Pengembangan Kompetensi ASN melalui Corporate University bidang PDSKP, 6 Februari 2026;
- 5) Rapat Pembahasan Final Perumusan Ruang Lingkup Tugas Jabatan Fungsional Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, 10 Februari 2026;
- 6) Rapat Sosialisasi dan Pembinaan Jabatan Fungsional Non Bidang Kelautan dan Perikanan, 26 Februari 2026;
- 7) Rapat Rekonsiliasi Data Kepegawaian dan Implementasi DNS-SIASN lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP, 12 Maret 2026.

h. Kegiatan Terkait Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Ditjen PDSPKP diantaranya sebagai berikut:

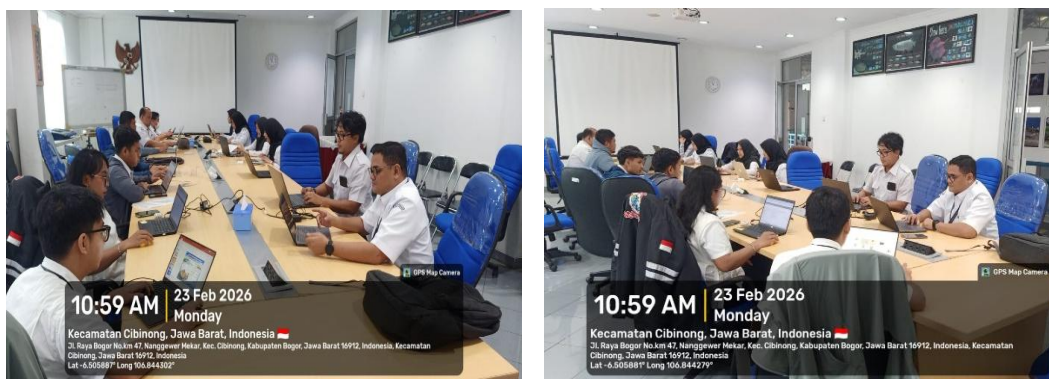
- 1) Rapat Revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- 2) Kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan KKP dilaksanakan pada tanggal 18 September 2025.



Gambar 60. Sosialisasi Permen KP Nomor 13 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan KKP

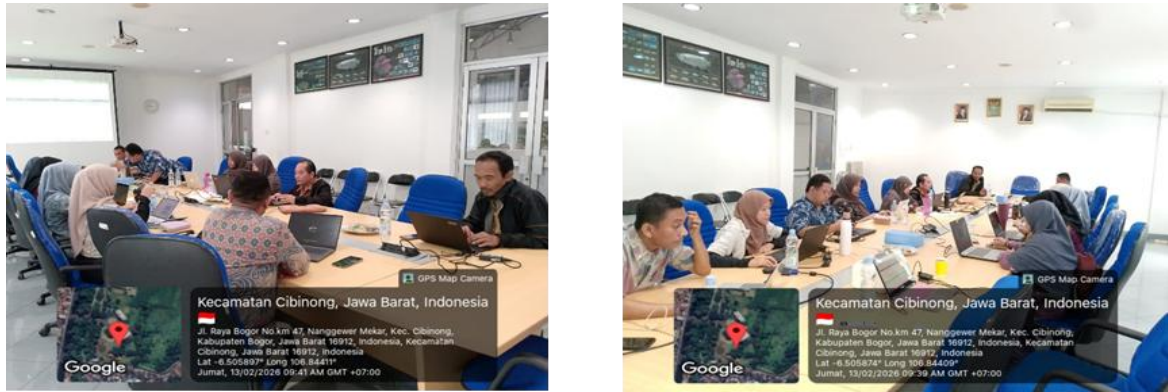
- i. Kegiatan Terkait Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP diantaranya sebagai berikut:
- 1) Rapat pemutakhiran rencana umum pengadaan barang/jasa dan monitoring pengadaan barang/jasa lingkup Ditjen PDSPKP.
Rapat dilaksanakan pada tanggal 29-30 Januari 2026.
 - 2) Evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa tahun 2025 dan monitoring progres pengadaan Barang/Jasa tahun 2026 Lingkup Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.
 - 3) Pemutakhiran RUP PBJ Lingkup Ditjen PDSPKP Tahun 2026. Kegiatan pemutakhiran RUP PBJ Lingkup Ditjen PDSPKP Tahun 2026 dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator kinerja Rencana Umum Pengadaan (RUP) Lingkup Ditjen PDSPKP Triwulan I 2026, dilaksanakan di Ruang Rapat Karaginan GMB III KKP tanggal 13 Maret 2026.
- j. Kegiatan Terkait Nilai Pembangunan Integritas Ditjen PDSPKP diantaranya sebagai berikut:
- 1) Pelaksanaan Apel Pagi dan Briefing Reformasi Birokrasi setiap hari senin yang dilaksanakan oleh seluruh unit kerja eselon II lingkup Ditjen PDSPKP;
 - 2) Penanganan Pengaduan lingkup Ditjen PDSPKP Bulan Januari, Februari, dan Maret 2026 dan konsultasi/pengaduan yang diterima selain melalui SP4N LAPOR! telah seluruhnya diinput pada aplikasi SP4N LAPOR! dengan status tuntas. Laporan penanganan pengaduan juga telah disampaikan kepada Inspektorat V selaku Tim Penanganan Pengaduan Kementerian secara berjenjang;
 - 3) Mengikuti kegiatan FGD Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal KKP pada 28 Januari 2026;
 - 4) Mengikuti Rapat Pengisian Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) KKP Triwulan IV Tahun 2025 pada 28 Januari 2026;
 - 5) Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi e-ZI versi 2.0 dalam rangka Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada 19 Februari 2026;

- 6) Rapat Pemantauan Pembangunan Zona Integritas Direktorat Pemberdayaan Usaha dan Direktorat Pemasaran pada tanggal 23 Februari 2026;



Gambar 61. Rapat Pemantauan Pembangunan Zona Integritas Direktorat Pemberdayaan Usaha dan Direktorat Pemasaran

- k. Kegiatan Terkait Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan diantaranya sebagai berikut:
- 1) Rapat berdasarkan undangan Direktorat Pemasaran Nomor B.958/DJPDSPKP.5/TU.330/II/2026 yang dilaksanakan tanggal 27 Februari 2026 di Ruang Rapat I, GMB III lantai 15, dipimpin oleh Katimja Pemetaan dan Analisis Pasar dalam Negeri, dan dihadiri oleh perwakilan Tim Kerja Hukum PDSPKP dan Direktorat Pemasaran; dan
 - 2) Rapat berdasarkan undangan Direktorat Pemasaran Nomor B.1060/DJPDSPKP.5/TU.330/III/2026 yang dilaksanakan 5 Maret 2026 di Ruang Rapat Direktorat Pemasaran, GMB III lantai 12A, dipimpin oleh perwakilan timja Direktorat Pemasaran, dan dihadiri oleh perwakilan Tim Kerja Hukum PDSPKP dan Direktorat Pemasaran.
- l. Kegiatan Terkait Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan 3 dan SOP Ditjen PDSPKP diantaranya sebagai berikut:
- 1) Menghadiri rapat Identifikasi Standar Operasional Prosedur Direktorat Pemasaran pada tanggal 13 Februari 2026;
 - 2) Rapat Identifikasi Standar Operasional Prosedur pasca SOTK baru di lingkungan Ditjen PDSPKP pada tanggal 26 Februari 2026.



Gambar 62. Rapat Identifikasi SOP di Direktorat Pemasaran

3. Realisasi anggaran

Ditjen PDSPKP telah mengalokasikan anggaran dalam rangka pencapaian indikator kinerja Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Lingkup Ditjen PDSPKP sebesar Rp109.223.854.000,- dan sampai dengan periode Triwulan I tahun 2026 telah direalisasikan sebesar Rp31.990.207.000,- atau setara dengan 29,29%. dari pagu efektif.

3. Alokasi Anggaran Ditjen PDSPKP

Alokasi anggaran pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan adalah sebesar Rp276.024.243.000,- (*Dua ratus tujuh puluh enam miliar dua puluh empat juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah*) yang seluruhnya merupakan APBN rupiah murni dan PNPB. Dari pagu anggaran tersebut, terdapat blokir dan efisiensi anggaran sebesar Rp21.906.773.000,- (*Dua puluh satu miliar sembilan ratus enam juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah*) sehingga pagu anggaran efektif menjadi sebesar Rp254.117.470.000,- (*Dua ratus lima puluh empat miliar seratus tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah*) Realisasi anggaran Ditjen PDSPKP sampai dengan Triwulan I tahun 2026 adalah sebesar Rp39.464.055.000,- (*Tiga puluh sembilan miliar empat ratus enam puluh empat juta lima puluh lima ribu rupiah*) atau setara dengan 14,30% terhadap total pagu anggaran awal atau 15,53% terhadap pagu anggaran pagu efektif.

Tabel 8. Realisasi Penyerapan Anggaran Ditjen PDSPKP berdasarkan Jenis Kegiatan Tahun 2026 (Dalam Rp.000)

Satker	Pagu Awal	Blokir/Efisiensi	Pagu Efektif	Realisasi	% Realisasi Thd Pagu Awal	% Realisasi Thd Pagu Efektif
Pemasaran, Akses dan Promosi Hasil KP	33.394.693	649.773	32.744.920	3.264.583	9,78	9,97
Pengolahan dan Bina Mutu Hasil KP	5.943.502	0	5.943.502	1.149.387	19,34	19,34
Dukungan Ditjen PDSPKP	109.223.854	0	109.223.854	31.990.207	29,29	29,29
Pengelolaan Prasarana dan Sarana Logistik KP	116.724.410	21.257.000	95.467.410	1.500.621	1,29	1,57
Investasi dan	6.518.952	0	6.518.952	1.407.235	21,59	21,59
BBP3KP	4.218.832	0	4.218.832	152.022	3,60	3,60
Jumlah	276.024.243	21.906.773	254.117.470	39.464.055	14,30	15,53

Sumber: Aplikasi Myintress Kemenkeu per April 2026

Tabel 9. Realisasi Penyerapan Anggaran Ditjen PDSPKP Menurut Kewenangan Tahun 2026 (Dalam Rp.000)

Jenis Belanja	Pagu	AA/Blokir	Pagu Setelah AA	Realisasi	%Realisasi Thd Pagu Awal	%Realisasi Thd Pagu Efektif
Belanja Pegawai	86.281.697	-	86.281.697	25.627.235	29,70	29,70
Belanja Barang	163.513.505	21.766.773	141.746.732	13.826.375	8,46	9,75
Belanja Modal	26.229.041	140.000	26.089.041	10.445	0,04	0,04
Jumlah	276.024.243	21.906.773	254.117.470	39.464.055	14,30	15,53

Sumber: Aplikasi Myintress Kemenkeu per April 2026

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan

Laporan Kinerja (LKj) Ditjen PDSPKP Triwulan I Tahun 2026 menyajikan capaian Sasaran Program dan Indikator Kinerja. Capaian dimaksud selanjutnya dilakukan analisis dan evaluasi serta perbandingan terhadap capaian periode sebelumnya sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam satu periode Renstra yang berkesinambungan.

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja Ditjen PDSPKP berbagai upaya telah dilakukan seperti koordinasi pelaksanaan dan monitoring evaluasi pelaksanaan rencana aksi dalam rangka mencapai indikator kinerja. Secara umum, indikator kinerja Ditjen PDSPKP yang dapat dihitung sampai dengan Triwulan I tahun 2026 telah tercapai dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan Nilai Capaian Kinerja Organisasi (NKO) yang terukur pada Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) mencapai 83,79.

2. Permasalahan dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil pengukuran atas kinerja Ditjen PDSPKP periode Triwulan IV tahun 2025, terdapat satu indikator kinerja yang tidak mencapai target yakni Nilai Ekspor Rumput Laut. Adapun permasalahan dan rencana tindak lanjut ke depan antara lain:

Tabel 10. Permasalahan dan Rekomendasi atas Indikator kinerja yang tidak mencapai target pada Triwulan I Tahun 2026

Indikator Kinerja	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
Nilai Ekspor Rumput Laut	Perlambatan ekonomi global dan penyesuaian pada industri pengolahan pada pasar utama (Tiongkok), dan pelemahan permintaan akibat perlambatan ekonomi global pada pasar alternatif (Uni Eropa, Jepang, dan ASEAN)	• Penerbitan Sertifikat Standar PT Seaweed Indonesia Trading • Koordinasi dengan Asosiasi Industri Rumput Laut. • Pembahasan <i>Launching Forum to Boost The Seafood / Aquatic Business Between Indonesia And China</i> bersama China Fisheries Association(CFA)

Indikator Kinerja	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
		• Webinar terkait Rumput Laut • Penjajakan Kerjasama Akses Pasar Pengolah Rumput Laut • Penyusunan Profilling Industri Karagenan
Nilai Ekspor Produk Perikanan Lainnya	Pelemahan permintaan global menjadi faktor utama, seiring kondisi ekonomi dan geopolitik dunia yang masih menunjukkan kehati-hatian.	• Percepatan penyelesaian isu hambatan non-tarif di pasar utama (AS, Uni Eropa, Jepang) melalui koordinasi dan rapat pembahasan lintas unit kerja /Eselon I lingkup KKP dan atau K/L terkait; • Pembahasan Launching Forum to Boost The Seafood / Aquatic Business Between Indonesia And China bersama China Fisheries Association(CFA) • Penumbuhan eksportir baru yang memanfaatkan tarif preferensi IJ-EPA; • Promosi Produk perikanan pada pameran Indonesia Internasional Seafood and Meat (IISM)

3. Tindak Lanjut Rekomendasi pada Laporan Kinerja Tahun 2025

Tindak lanjut yang telah dilakukan pada Triwulan I tahun 2026 atas rekomendasi pada Laporan Kinerja tahun 2025 antara lain :

Tabel 11. Tindak Lanjut Rekomendasi pada Laporan Kinerja Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut pada Tahun 2025	Tindak Lanjut pada Triwulan I Tahun 2026
1	Nilai Ekspor Rumput Laut	Upaya promosi/sosialisasi terkait biodiversitas dan potensi rumput laut di Indonesia dalam rangka memperluas basis pemanfaatan dan pasar rumput laut.	Koordinasi dan komunikasi intensif dengan pelaku usaha rumput laut, termasuk Unit Pengolahan Rumput Laut (UPRL), eksportir, serta pemangku kepentingan terkait lainnya

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2026



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Machmud**

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Sakti Wahyu Trenggono**

Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Januari 2026

PIHAK KEDUA
Menteri Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sakti Wahyu Trenggono

PIHAK PERTAMA
Plt. Direktur Jenderal Penguatan Daya
Saing Produk Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Machmud

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK
KELAUTAN DAN PERIKANAN

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET
1.	Meningkatnya Nilai Tambah Produk Kelautan dan Perikanan yang Berdaya Saing	1.	Nilai Ekspor Rumput Laut (juta USD)	647
		2.	Nilai Ekspor Produk Perikanan Lainnya (miliar USD)	6,05
		3.	Nilai Pemasaran Produk Perikanan Dalam Negeri (Rp Triliun)	320,8
		4.	Persentase UMKM Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan Naik Kelas (persen)	5,5
2.	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	5.	Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen PDSPKP (nilai)	86,5

Data Anggaran :

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	166.800.389.000
	a. Pemasaran, Akses, dan Promosi Hasil Kelautan dan Perikanan	
	b. Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan	
	c. Pengelolaan Prasarana dan Sarana Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan	
	d. Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan	
	e. Pengujian Penerapan Hasil Kelautan dan Perikanan	
2.	Program Dukungan Manajemen	109.223.854.000
Total Anggaran DJPDSPKP Tahun 2026		276.024.243.000

Jakarta, 2 Januari 2026

PIHAK KEDUA
Menteri Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sakti Wahyu Trenggono

PIHAK PERTAMA
Plt. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Machmud